



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dengan menyusun rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
10. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.
12. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen rencana aksi program dan kegiatan tahunan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bandung Barat dengan sasaran rumah tangga dan individu dalam basis data terpadu (BDT) dan atau Data terpadu Fakir Miskin yang merupakan penjabaran dari Isu strategis dan Indikator Kinerja Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD Penanggulangan kemiskinan merupakan dokumen perencanaan berisi program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang disusun dengan target pencapaian menggunakan BDT dan/atau data terpadu Fakir Miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk:

- a. menetapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan target masyarakat miskin dan rentan miskin dalam BDT dan/atau data terpadu Fakir Miskin; dan

- b. memandu intervensi program dan kegiatan dari Perangkat Daerah pelaksana penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah; dan
- b. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan meliputi :
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. indikator sasaran;
 - d. program dan kegiatan;
 - e. indikator kinerja;
 - f. data capaian; dan
 - g. target pencapaian;
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya pencapaian penurunan kemiskinan pada tahun 2023.
- (3) RAD Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Profil Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Bab III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- d. Bab IV Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat;
 - e. Bab V Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Para Pihak; dan
 - f. Bab VI Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana ayat (1) huruf a memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan sistematika penulisan Laporan RAD Penanggulangan Kemiskinan.
 - (3) Profil Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat gambaran umum wilayah Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan kondisi fisik yang terdiri atas kondisi geografis dan wilayah administratif, potensi wilayah, dan permasalahan kemiskinan daerah dan juga memuat hasil evaluasi dan hasil monitoring pencapaian target pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tahun 2016-2018.
 - (4) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tentang penjelasan mengenai pendekatan yang dilakukan, model intervensi berdasarkan sasaran dan wilayah miskin di daerah (individu maupun kelurahan/kecamatan) pada tahun 2019-2023, dan juga memuat target-target indikator kemiskinan yang dicanangkan untuk lima tahun kedepan.
 - (5) Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat penjelasan mengenai rekapitulasi kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2019-2023.
 - (6) Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat penjelasan mengenai pihak yang terkait, serta tata kerja di setiap para pihak tersebut.
 - (7) Penutup sebagaimana pada ayat (1) huruf f memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati Selaku Ketua TKPK Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku penanggungjawab TKPK Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur selaku penanggung jawab TKPK Tingkat Provinsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 November 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 26 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 33 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TAHUN 2019-2023

PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Acuan Kebijakan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu masyarakat miskin juga ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif serta ketidakmampuan dalam menjangkau/mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan selama ini adalah database kemiskinan yang belum akurat maupun variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan seseorang (kepala keluarga) serta keterpaduan program antar OPD dan dengan Dunia Usaha serta masyarakat. Untuk itu penyediaan database yang akurat perlu dilakukan sehingga ukuran kemiskinan telah mendekati realita yang ada dilapangan dan keterpaduan program perlu disinergikan.

Penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang kemudian diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. RAD wajib dibuat oleh setiap daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tiap daerah.

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan dokumen strategi aksi untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. Secara khusus, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD. Dengan demikian, dokumen RAD selanjutnya dapat menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk memastikan strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka RAD harus dijabarkan atau dilaksanakan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan akan diintegrasikan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RAD diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi para pelaku pembangunan, sehingga strategi dan rencana aksi dan sasaran RAD tidak hanya menjadi gerakan pemerintah daerah tetapi juga menjadi gerakan bersama semua pelaku pembangunan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran RAD akan dapat terwujud sesuai dengan batas waktu yang telah direncanakan.

1.2. Pendekatan Kebijakan Nasional

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi triple-track problem, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun namun penurunannya melambat. Kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah/provinsi (wilayah timur dan wilayah barat) maupun kesenjangan pendapatan/konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). Dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya.

Menurut Perpres Nomor 15/2010, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perpres tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mendukung kebijakan nasional, maka di Kabupaten Bandung Barat telah menyusun strategi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan seperti:

1. Meningkatkan peran pendidikan non formal terhadap pengetahuan agama dan pengetahuan tentang upaya peningkatan perekonomian keluarga.
2. Mengoptimalkan fungsi dakwah dan lembaga-lembaga keagamaan.
3. Pemenuhan kebutuhan kalori ibu hamil bagi keluarga miskin.
4. Perbaikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil pasca melahirkan dan masyarakat miskin.
5. Mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin.
6. Mengoptimalkan layanan pendidikan bagi keluarga miskin berprestasi.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal.
8. Memotivasi angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilan.
9. Memberikan motivasi dan meningkatkan kemampuan serta mengali ide produk yang akan dijual.
10. Meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam upaya pemberian modal usaha ringan tanpa agunan.
11. Meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemberian pinjaman bagi KUBE dan LKM.
12. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial berbasis keluarga.
13. Meningkatkan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
14. Menyediakan informasi tentang keluarga miskin secara lengkap.

Kemudian arah dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut dijabarkan dalam program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

1.3. Pokok Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Maksud penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk menjabarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan tujuan penyusunan RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019–2023 adalah untuk:

1. Membangun konsensus bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar (right based approach) serta pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan.
2. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).
3. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan lembaga lainnya.
4. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

BAB II

PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Basis Data Terpadu (BDT) merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan sumber data lain yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari 2012-2014. Data ini perlu dilakukan update. Misalnya rumah tangga pengganti penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/ muskel). Kegiatan PBDT 2015, yang dilaksanakan sekitar bulan April-Juli 2015, perlu dilakukan karena selama periode 2011-2015 besar kemungkinan telah terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat khususnya penerima bantuan program sosial.

BDT untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah dalam skala nasional maupun daerah di Indonesia. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli - Desember 2015 (PBDT 2015).

PBDT 2015 memuat 40% penduduk berpenghasilan terendah yang terbagi menjadi 4 desil, dimana desil 1 (10% berpenghasilan terendah) dikategorikan penduduk sangat miskin.

Kegiatan serupa pernah dilakukan pada tahun 2008 dan 2011 dengan nama Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS 2011). Hasil dari kegiatan tersebut juga memuat output yang sama dengan PBDT 2015, hanya saja dalam PBDT 2015 ada penambahan indikator baru yaitu berkaitan dengan Keluarga Berencana.

Basis Data Terpadu digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Basis Data Terpadu membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Basis Data Terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Basis Data Terpadu dengan memperolehnya dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tanpa dipungut biaya.

Hingga saat ini BDT telah digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah, di antaranya: Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) serta beberapa program lainnya.

1. Dasar Hukum

- a. Perpres Nomor 166 Tahun 2014: Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014: Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera; dan
- c. Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

2. Tujuan

- a. Mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu agar dapat meminimalkan kekurangan akuratan penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT;
- b. Meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah; dan

- c. Meningkatkan layanan kepada pengguna BDT dalam menentukan penerima program nasional dan daerah.

Terdapat dua kesalahan yang sering terjadi saat melakukan pendataan yaitu masuknya rumah tangga yang secara sosial ekonomi dianggap mampu ke dalam data PBDT (inclusion error) dan tidak masuknya rumah tangga yang tidak mampu dalam BDT (exclusion error).

3. Tahapan Pemutakhiran BDT

Proses pendataan PBDT 2015 di dalam meminimalisir kesalahan dilakukan melalui dua tahap. Pertama menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat desa yang melibatkan ketua komunitas atau SLS satu tingkat di bawahnya. Tahap ini output yang dihasilkan adalah munculnya by name by addrees rumah tangga yang akan di lakukan pencacahan/ pendataan. Kedua dilakukan pencacahan/ pendataan rumah tangga dengan metode survey yang merujuk pada hasil tahap pertama (FKP).

1) Forum Konsultasi Publik (FKP)

Pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dan difasilitasi oleh pendamping independen (fasilitator) untuk memutakhirkan informasi daftar awal dan menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT. FKP akan dilakukan di tingkat desa/kelurahan, namun untuk wilayah padat penduduk dilakukan pada tingkat dusun/RW. Forum Konsultasi Publik bertujuan memperbaiki informasi prelist PBDT, menandai inclusion error, dan mengusulkan rumah tangga tambahan.

2) Pemutakhiran Informasi Rumah Tangga

Dilakukan oleh petugas lokal dan terlatih yang ditujukan untuk memutakhirkan informasi rumah tangga terkait dengan keterangan perumahan, sosial ekonomi anggota rumah tangga, kepemilikan aset dan kepesertaan program.

3) Proses Pendataan

Pendataan PBDT 2015 dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 511 Kabupaten/Kota, 7.074 kecamatan dan 82.190 desa/kelurahan. Target rumah tangga yang dikumpulkan datanya adalah empat puluh persen (40%) rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah secara nasional. Data rumah tangga sasaran yang dikumpulkan dalam PBDT 2015 mencakup nama dan alamat rumah tangga sasaran, keterangan pokok rumah tangga dan keterangan sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga.

4) Jenis Data

Data hasil PBDT 2015 terdiri dari data rumah tangga dan data individu. Berikut jenis data termuat di dalam data PBDT 2015:

1. Nama kepala rumah tangga dan alamat.
2. Kondisi rumah yang terdiri dari:
 - a. status penguasaan bangunan;
 - b. penguasaan lahan;
 - c. luas lantai;
 - d. jenis lantai;
 - e. jenis dinding terluas;
 - f. jenis atap terluas;
 - g. sumber air minum;
 - h. sumber penerangan utama;
 - i. bahan bakar/energi utama untuk memasak;
 - j. fasilitas tempat buang air besar;
 - k. tempat pembuangan akhir tinja; dan
 - l. jumlah kamar tidur.

3. Kondisi sosial ekonomi setiap anggota rumah tangga (ART) yang terdiri dari:
 - a. nama individu (anggota rumah tangga);
 - b. hubungan dengan kepala rumah tangga;
 - c. hubungan dengan kepala keluarga;
 - d. jenis kelamin;
 - e. umur;
 - f. status perkawinan;
 - g. kepemilikan kartu identitas;
 - h. kecacatan;
 - i. penyakit menahun/kronis;
 - j. kehamilan;
 - k. pendidikan; dan
 - l. kegiatan ekonomi anggota rumah tangga.
 - m. Kepemilikan aset dan keikutsertaan program yang terdiri dari:
 - n. kepemilikan asset;
 - o. usaha mikro yang dimiliki; dan
 - p. keikutsertaan berbagai program.

4. Kategori Data

Berdasarkan klasifikasi Data PBDT 2015 terdiri dari dua Klasifikasi rumah tangga dan individu serta kategori basis data:

- a. Klasifikasi : Kepala Rumah tangga dan Individu berupa data agregat dan by name by address.
- b. Kategori Basis data
 - a) Status Kesejahteraan
 - i. Desil 1;
 - ii. Desil 2;
 - iii. Desil 3;
 - iv. Desil 4.
 - b) Kepala RT Perempuan
 - i. Usia < 45 tahun;
 - ii. 45 tahun < usia < 59 tahun;
 - iii. Usia > 59 tahun.
 - c) Klasifikasi usia
 - i. Usia < 6 tahun;
 - ii. 6 tahun < usia < 14 tahun;
 - iii. 14 tahun < usia < 44 tahun;
 - iv. 44 tahun < usia < 59 tahun;
 - v. > 60 tahun.
 - d) Pendidikan
 - i. Anak yang sekolah;
 - ii. Anak yang tidak sekolah.
 - e) Partisipasi sekolah
 - i. SD;

- ii. SMP;
 - iii. SMA;
 - iv. PT (Perguruan Tinggi).
- f) Kecacatan
- i. Usia < 6 tahun;
 - ii. 6 tahun <usia<14 tahun;
 - iii. 14 tahun <usia<44 tahun;
 - iv. 44 tahun <usia< 59 tahun;
 - v. >60 tahun.
- g) Penyakit kronis
- i. Usia < 6 tahun;
 - ii. 6 tahun <usia<14 tahun;
 - iii. 14 tahun <usia<44 tahun;
 - iv. 44 tahun <usia< 59 tahun;
 - v. >60 tahun.
- h) Status bekerja
- i. Bekerja;
 - ii. Tidak bekerja.
- i) Lapangan Pekerjaan Individu
- i. Pertanian;
 - ii. Holtikultura;
 - iii. Perkebunan;
 - iv. Perikanan tangkap;
 - v. Perikanan budidaya;
 - vi. Peternakan;
 - vii. Kehutanan;
 - viii. Pertambangan;
 - ix. Industri pengolahan;
 - x. Listrik dan gas;
 - xi. Bangunan;
 - xii. Perdagangan;
 - xiii. Hotel dan rumah makan;
 - xiv. Transportasi;
 - xv. Informasi dan komunikasi;
 - xvi. Keuangan;
 - xvii. Jasa pendidikan dll;
 - xviii. Pemulung;
 - xix. Lainnya.
- j) Lapangan Pekerjaan KRT
- i. Pertanian;
 - ii. Holtikultura;
 - iii. Perkebunan;
 - iv. Perikanan tangkap;

- v. Perikanan budidaya;
- vi. Peternakan;
- vii. Kehutanan;
- viii. Pertambangan;
- ix. Industri pengolahan;
- x. Listrik dan gas;
- xi. Bangunan;
- xii. Perdagangan;
- xiii. Hotel dan rumah makan;
- xiv. Transportasi;
- xv. Informasi dan komunikasi;
- xvi. Keuangan;
- xvii. Jasa pendidikan dll;
- xviii. Pemulung;
- xix. Lainnya.

k) Bangunan Tempat Tinggal

- i. Milik sendiri;
- ii. Kontrak;
- iii. Bebas sewa;
- iv. Lainnya.

l) Lahan Tempat Tinggal

- i. Milik sendiri;
- ii. Milik orang lain;
- iii. Milik Negara;
- iv. Lainnya.

m) Jenis Lantai terluas

- i. Marmer/Keramik/Ubin;
- ii. Kayu;
- iii. Semen/Bata/Tanah;
- iv. Bambu;
- v. Lainnya.

n) Jenis dinding terluas

- i. Tembok;
- ii. Plesteran anyaman;
- iii. Kayu/Bambu;
- iv. Lainnya.

o) Jenis atap terluas

- i. Beton;
- ii. Genteng;
- iii. Asbes/seng;
- iv. Sirap/bamboo/jerami;
- v. Lainnya.

- p) Sumber air minum
 - i. Air kemasan;
 - ii. Air ledeng;
 - iii. Sumber Terlindung;
 - iv. Sumber Tidak terlindung.
- q) Sumber penerangan utama
 - i. Listrik PLN;
 - ii. Listrik non PLN;
 - iii. Non listrik.
- r) Bahan bakar memasak
 - i. Listrik/Gas;
 - ii. Minyak tanah;
 - iii. Briket/Arang/Kayu;
 - iv. Tidak memasak dirumah.
- s) Fasilitas tempat BAB
 - i. Jamban sendiri;
 - ii. Jamban bersama/umum;
 - iii. Tidak ada.
- t) Pembuangan akhir tinja
 - i. Tangki/SPAL;
 - ii. Lubang tanah;
 - iii. Lainnya.

Data PBDT 2015 berbeda dengan data PPLS 2011. Perbedaan tersebut adalah adanya tambahan indikator tentang Keluarga Berencana dan informasi program bagi RTS . Data PBDT 2015 terdiri dari desil 1 sampai desil 4 dengan sebaran per kecamatan hingga desa. Desil 1 merupakan 10% penduduk berpenghasilan terendah. Data jumlah total rumah tangga sebanyak 142.069 KK dan jumlah total individu sebanyak 487.855 orang. Jumlah ini setara dengan 29,78 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Bandung Barat 2015 sebesar 1.638.388 jiwa. Data PBDT 2015 terperinci sebagai berikut:

Status Kesejahteraan

Status kesejahteraan terbagi dalam 4 desil dengan jumlah rumah tangga sebanyak 142.069 KK dan jumlah individu sebanyak 487.855 orang. jumlah rumah tangga dari desil 1 sampai desil 3 adalah 126.326 dengan jumlah terendah adalah Kecamatan Parongpong dan tertinggi Kecamatan Cihampelas. Sedangkan jumlah individu sebanyak 474.153 orang dengan jumlah terendah adalah Kecamatan Cisarua dan tertinggi adalah Kecamatan Cihampelas.

Dibandingkan dengan data PPLS 2011 yang mencakup 3 kelompok, jumlah Rumah Tangga maupun jumlah individu mengalami perubahan, dimana di PPLS 2011 jumlah Rumah Tangga sebanyak 109.433 KK dan jumlah individu sebanyak 469.093 orang sebagaimana table berikut.

Tabel 1:Perbandingan Jumlah Rumah Tangga

Kecamatan	PPLS 2011				PBDT 2015					Kenaikan/ Selisih
	Kelompok 1 (paling miskin)	Kelompok 2	Kelompok 3	Total	Jml RT Desil 1 *)	Jml RT Desil 2 *)	Jml RT Desil 3 *)	Jml RT Desil 4 *)	Jml RT TOTAL	
BATUJAJAR	3.195	2.860	3.144	9.199	2.357	2.882	585	337	6.161	-3.038
CIHAMPELAS	3.753	2.848	2.979	9.580	6.212	6.197	1.137	632	14.178	4.598
CIKALONG WETAN	3.437	2.482	2.513	8.432	6.070	3.723	457	226	10.476	2.044
CILILIN	3.588	2.581	2.113	8.282	5.680	4.253	616	365	10.914	2.632
CIPATAT	4.369	2.692	2.585	9.646	7.322	4.360	610	262	12.554	2.908
CIPEUNDEUY	2.873	2.020	1.791	6.684	4.673	3.556	427	186	8.842	2.158
CIPONGKOR	4.974	2.609	2.272	9.855	6.554	3.497	368	175	10.594	739
CISARUA	1.483	960	1.012	3.455	1.761	2.270	525	257	4.813	1.358
GUNUNGHALU	2.744	1.590	1.500	5.834	4.296	2.496	180	51	7.023	1.189
LEMBANG	3.793	2.958	3.222	9.973	5.363	5.350	995	660	12.368	2.395
NGAMPRAH	2.109	1.880	2.420	6.409	3.303	4.091	914	584	8.892	2.483
PADALARANG	2.580	2.311	2.755	7.646	4.507	5.631	1.104	717	11.959	4.313
PARONGPONG	1.212	1.024	1.026	3.262	1.759	2.083	446	284	4.572	1.310
RONGGA	2.601	1.348	1.167	5.116	4.657	2.195	95	43	6.990	1.874
SINDANGKERTA	2.972	1.712	1.376	6.060	3.524	2.770	299	131	6.724	664
SAGULING					2.089	2.374	364	182	5.009	5.009
Total	45.683	31.875	31.875	109.433	70.127	57.728	9.122	5.092	142.069	

Tabel 2:Perbandingan Jumlah Individu

Nama Kecamatan	PPLS 2011				PBDT 2015				
	Kelompok 1 (paling miskin)	Kelompok 2	Kelompok 3	Total	Individu Desil 1 *)	Individu Desil 2 *)	Individu Desil 3 *)	Individu Desil 4 *)	Individu TOTAL
BATUJAJAR	15.775	11.087	10.331	37.193	10.568	8.717	1.339	924	21.548
CIHAMPELAS	21.277	12.028	10.380	43.685	28.150	19.857	3.189	2.018	53.214
CIKALONG WETAN	19.004	10.046	8.240	37.290	25.659	9.373	951	495	36.478
CILILIN	18.524	9.790	6.584	34.898	23.895	12.357	1.510	1.091	38.853
CIPATAT	24.080	10.887	8.565	43.532	31.287	11.031	1.315	663	44.296
CIPEUNDEUY	14.730	7.686	5.644	28.060	19.477	9.336	926	499	30.238
CIPONGKOR	26.212	9.579	6.732	42.523	27.750	8.650	855	527	37.782
CISARUA	7.082	3.369	2.817	13.268	7.076	5.567	803	473	13.919
GUNUNGHALU	13.370	5.040	3.439	21.849	16.429	4.862	291	129	21.711
LEMBANG	20.835	12.407	11.615	44.857	22.597	15.202	2.162	1.638	41.599
NGAMPRAH	12.246	8.238	8.830	29.314	14.329	11.691	2.102	1.624	29.746
PADALARANG	14.277	9.706	9.711	33.694	19.421	16.855	2.590	2.076	40.942
PARONGPONG	6.303	3.912	3.198	13.413	7.984	5.833	837	610	15.264
RONGGA	12.879	4.535	3.123	20.537	18.447	4.520	219	101	23.287
SINDANGKERTA	15.182	6.003	3.795	24.980	14.958	6.937	660	370	22.925
SAGULING					8.278	6.493	818	464	16.053
Total	241.776	124.313	103.004	469.093	296.305	157.281	20.567	13.702	487.855

Tabel 3:Perempuan Kepala Keluarga

Kecamatan	PPLS 2011				PDBT 2015			
	Usia dibawah 45 TH	Usia 45 - 60	Usia 60+	TOTAL	Usia di bawah 45 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	TOTAL
BATUJAJAR	274	528	310	1.112	202	405	713	1.320
CIHAMPELAS	315	741	414	1.470	527	799	1.369	2.695
CIKALONG WETAN	244	570	322	1.136	323	689	1.220	2.232
CILILIN	236	567	472	1.275	317	585	1.175	2.077
CIPATAT	251	632	392	1.275	374	837	1.517	2.728
CIPEUNDEUY	181	375	245	801	254	480	997	1.731
CIPONGKOR	281	667	496	1.444	317	602	1.198	2.117
CISARUA	152	331	237	720	197	393	837	1.427
GUNUNGHALU	237	504	587	1.328	242	542	1.187	1.971
LEMBANG	304	674	336	1.314	496	898	1.429	2.823
NGAMPRAH	189	432	203	824	372	634	1.136	2.142
PADALARANG	269	574	331	1.174	444	808	1.396	2.648
PARONGPONG	121	260	148	529	185	397	748	1.330
RONGGA	155	358	301	814	198	400	814	1.412
SAGULING					135	216	481	832
SINDANGKERTA	175	436	342	953	197	391	996	1.584
Grand Total	3.384	7.649	5.136	16.169	4.780	9.076	17.213	31.069

Tabel 4:Klasifikasi Usia

Kecamatan	Usia di bawah 6 tahun	Usia 6 - 14 tahun	Usia 15 - 44 tahun	Usia 45 - 59 tahun	Usia 60 tahun keatas	Total
BATUJAJAR	1.625	4.120	9.535	3.734	2.530	21.544
CIHAMPELAS	4.472	10.468	25.355	8.174	4.743	53.212
CIKALONG WETAN	2.915	7.541	15.775	6.075	4.172	36.478
CILILIN	3.105	7.549	17.797	6.296	4.102	38.849
CIPATAT	3.529	8.679	19.576	7.323	5.185	44.292
CIPEUNDEUY	2.155	6.000	13.167	5.576	3.340	30.238
CIPONGKOR	3.103	7.450	17.110	6.053	4.063	37.779
CISARUA	972	2.436	5.937	2.436	2.137	13.918
GUNUNGHALU	1.419	3.927	9.070	3.881	3.408	21.705
LEMBANG	3.352	7.980	18.332	7.072	4.838	41.574
NGAMPRAH	2.456	5.476	13.153	5.125	3.533	29.743
PADALARANG	2.959	7.802	18.173	7.261	4.727	40.922
PARONGPONG	935	2.877	6.900	2.557	1.995	15.264
RONGGA	2.258	4.645	10.463	3.326	2.587	23.279
SAGULING	1.376	2.810	7.499	2.647	1.720	16.052
SINDANGKERTA	1.728	4.280	10.015	3.764	3.138	22.925
Grand Total	38.359	94.040	217.857	81.300	56.218	487.774

Tabel 5:Pendidikan Anak Usia Sekolah

Kecamatan	Anak yang Bersekolah				Anak yang Tidak Bersekolah				GRAND TOTAL
	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun	TOTAL	Usia 7-12 tahun	Usia 13-15 tahun	Usia 16-18 tahun	TOTAL	
BATUJAJAR	2.553	1.364	558	4.475	154	231	735	1.120	5.595
CIHAMPELAS	6.772	3.105	1.014	10.891	282	855	2.352	3.489	14.380
CIKALONG WETAN	4.758	1.916	531	7.205	249	925	1.772	2.946	10.151
CILILIN	4.729	2.287	826	7.842	214	586	1.459	2.259	10.101
CIPATAT	5.442	2.497	819	8.758	302	924	1.953	3.179	11.937
CIPEUNDEUY	3.725	1.741	565	6.031	218	635	1.415	2.268	8.299
CIPONGKOR	4.761	2.056	705	7.522	188	812	1.733	2.733	10.255
CISARUA	1.465	655	177	2.297	123	299	510	932	3.229
GUNUNGHALU	2.373	1.237	347	3.957	142	478	843	1.463	5.420
LEMBANG	5.102	2.171	791	8.064	286	728	1.464	2.478	10.542
NGAMPRAH	3.411	1.636	722	5.769	210	391	914	1.515	7.284
PADALARANG	4.895	2.457	1.056	8.408	269	518	1.416	2.203	10.611
PARONGPONG	1.795	863	312	2.970	134	214	539	887	3.857
RONGGA	2.932	1.304	368	4.604	133	446	940	1.519	6.123
SAGULING	1.821	908	411	3.140	70	207	544	821	3.961
SINDANGKERTA	2.748	1.250	478	4.476	149	418	933	1.500	5.976
Grand Total	59.282	27.447	9.680	96.409	3.123	8.667	19.522	31.312	127.721

Tabel 6: Partisipasi Sekolah

Kecamatan	SD/SDLB/Paket A/MI	SMPT/SMPLB/Paket B/MTs	SMA/SMK/SMALB/Paket C/MA	Perguruan Tinggi	Total
BATUJAJAR	2.710	1.350	577	14	4.651
CIHAMPELAS	7.062	3.115	1.132	15	11.324
CIKALONG WETAN	4.824	2.142	617	11	7.594
CILILIN	4.972	2.309	857	16	8.154
CIPATAT	5.707	2.537	868	16	9.128
CIPEUNDEUY	3.902	1.848	557	18	6.325
CIPONGKOR	4.994	2.074	680	15	7.763
CISARUA	1.521	662	170	6	2.359
GUNUNGHALU	2.487	1.290	338	5	4.120
LEMBANG	5.171	2.241	943	22	8.377
NGAMPRAH	3.504	1.692	787	21	6.004
PADALARANG	5.068	2.570	1.202	24	8.864
PARONGPONG	1.813	906	347	8	3.074
RONGGA	3.111	1.320	378	13	4.822
SAGULING	1.927	874	447	13	3.261
SINDANGKERTA	2.833	1.260	484	13	4.590
Grand Total	61.606	28.190	10.384	230	100.410

Tabel 7:Status Bekerja

KECAMATAN	Usia 5 - 14 tahun Bekerja	Usia 15 - 59 tahun Bekerja	Usia 60 tahun keatas Bekerja	Total Bekerja	Usia 5 - 14 tahun Tidak Bekerja	Usia 15 - 59 tahun Tidak Bekerja	Usia 60 tahun keatas Tidak Bekerja	Total Tidak Bekerja
BATUJAJAR	4	4.650	531	5.185	4.474	8.619	1.999	15.092
CIHAMPELAS	18	12.848	1.219	14.085	11.404	20.681	3.523	35.608
CIKALONG WETAN	30	10.808	2.074	12.912	8.284	11.042	2.098	21.424
CILILIN	14	9.047	1.272	10.333	8.225	15.046	2.830	26.101
CIPATAT	13	9.463	1.131	10.607	9.429	17.436	4.053	30.918
CIPEUNDEUY	16	7.281	1.028	8.325	6.502	11.461	2.312	20.275
CIPONGKOR	11	8.543	1.171	9.725	8.151	14.621	2.892	25.664
CISARUA	4	4.956	840	5.800	2.677	3.415	1.297	7.389
GUNUNGHALU	8	5.778	1.120	6.906	4.242	7.173	2.288	13.703
LEMBANG	22	12.362	1.624	14.008	8.675	13.043	3.214	24.932
NGAMPRAH	10	7.694	1.010	8.714	5.967	10.584	2.523	19.074
PADALARANG	13	9.827	1.045	10.885	8.494	15.607	3.680	27.781
PARONGPONG	8	3.791	474	4.273	3.091	5.666	1.521	10.278
RONGGA	14	5.764	721	6.499	5.055	8.025	1.865	14.945
SAGULING	23	5.942	848	6.813	3.122	4.205	872	8.199
SINDANGKERTA	15	5.468	867	6.350	4.653	8.311	2.271	15.235
Grand Total	223	124.222	16.975	141.420	102.445	174.935	39.238	316.618

Tabel 8:Lapangan Kerja/Pekerjaan Kepala Keluarga (1)

Kecamatan	Pertanian tanaman padi & palawija	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan tangkap	Perikanan budidaya	Peternakan	Pertambangan/ penggalian	Kehutanan/ pertanian lainnya	Industri pengolahan	Listrik dan gas	Bangunan/ konstruksi
BATUJAJAR	405	11	5	14	20	51	76	5	546	3	935
CIHAMPELAS	1.140	5	25	42	58	69	42	70	1.567	14	2.036
CIKALONG WETAN	2.816	271	399	6	8	203	21	103	441	18	2.739
CILILIN	1.529	194	48	50	55	122	12	105	377	10	1.679
CIPATAT	1.575	6	94	22	9	46	335	39	995	21	2.137
CIPEUNDEUY	1.703	7	319	83	133	40	8	59	278	32	1.977
CIPONGKOR	1.911	215	24	3	6	54	43	76	309	5	3.570
CISARUA	383	1.892	66	12	3	86	22	2	65	3	370
GUNUNGHALU	2.558	30	112	10	-	29	17	38	87	1	1.016
LEMBANG	363	2.775	44	8	-	344	4	49	157	12	2.316
NGAMPRAH	840	50	10	4	2	26	3	7	555	4	1.452
PADALARANG	327	8	34	14	1	18	44	22	943	30	1.990
PARONGPONG	72	848	54	1	-	57	16	6	39	3	1.156
RONGGA	2.489	4	88	1	2	35	9	149	180	1	1.286
SAGULING	2.485	8	1	24	49	14	46	11	118	3	515
SINDANGKERTA	1.332	339	53	2	1	29	9	7	105	2	1.310
Grand Total	21.928	6.663	1.376	296	347	1.223	707	748	6.762	162	26.484

Tabel 9:Lapangan Kerja/Pekerjaan Kepala Keluarga (2)

Kecamatan	Perdagangan	Hotel dan rumah makan	Transportasi dan pergudangan	Informasi & komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyaraaktan, Pemerintahan & Perorangan	Pemulung	Lainnya	TOTAL
BATUJAJAR	309	35	224	-	2	314	76	434	3.465
CIHAMPELAS	1.095	10	987	2	1	1.116	172	841	9.292
CIKALONG WETAN	746	51	420	3	3	492	52	103	8.895
CILILIN	1.037	24	434	3	2	266	70	1.374	7.391
CIPATAT	504	61	566	3	1	506	148	497	7.565
CIPEUNDEUY	409	38	362	2	1	429	28	356	6.264
CIPONGKOR	252	24	220	2	1	168	8	259	7.150
CISARUA	189	37	80	3	-	69	30	194	3.506
GUNUNGHALU	228	11	71	1	-	225	14	322	4.770
LEMBANG	907	209	630	6	2	636	60	550	9.072
NGAMPRAH	480	60	334	4	1	757	100	1.160	5.849
PADALARANG	660	51	532	4	1	586	98	1.702	7.065
PARONGPONG	198	21	82	1	-	156	16	113	2.839
RONGGA	173	16	102	-	-	443	8	52	5.038
SAGULING	126	-	61	1	2	109	5	611	4.189
SINDANGKERTA	210	5	98	1	1	87	21	309	3.921
Grand Total	7.523	653	5.203	36	18	6.359	906	8.877	96.271

Tabel 10:Lapangan Kerja/Pekerjaan Individu (1)

Kecamatan	Pertanian tanaman padi & palawija	Hortikul- tura	Perkebu- nan	Perikana n tangkap	Perikana n budidaya	Peternaka n	Kehutanan / pertanian lainnya	Pertambangan / penggalian	Industri pengolaha n	Listrik dan gas	Bangunan / konstruksi
BATUJAJAR	450	13	8	22	25	64	8	89	1.373	5	1.127
CIHAMPELAS	1.330	7	32	48	70	102	91	54	3.820	19	2.543
CIKALONG WETAN	3.475	433	553	8	9	464	111	30	1.166	27	3.724
CILILIN	1.974	257	52	59	66	254	123	19	796	15	2.165
CIPATAT	1.817	8	118	27	18	83	44	409	1.736	33	2.962
CIPEUNDEUY	1.933	8	473	98	165	45	64	12	662	33	2.590
CIPONGKOR	2.293	351	24	4	7	65	91	48	608	5	4.651
CISARUA	572	3.085	99	20	11	162	2	27	204	8	510
GUNUNGHALU	3.401	38	139	12	-	63	45	26	230	3	1.443
LEMBANG	544	4.280	58	15	3	506	64	7	335	17	3.084
NGAMPRAH	1.127	62	12	7	3	33	9	8	1.424	8	1.882
PADALARANG	370	10	45	21	4	24	29	51	2.302	47	2.535
PARONGPONG	88	1.059	73	1	-	68	7	25	137	4	1.767
RONGGA	3.103	7	122	4	3	44	183	12	304	2	1.578
SAGULING	3.827	17	4	29	74	25	16	66	286	6	659
SINDANGKERT A	2.153	649	81	4	1	61	8	12	279	12	1.922
Grand Total	28.457	10.284	1.893	379	459	2.063	895	895	15.662	244	35.142

Tabel 11:Lapangan Kerja/Pekerjaan Individu (2)

Kecamatan	Hotel dan rumah makan	Perdagangan	Transportasi dan pergudangan	Informasi & komunikasi	Keuangan dan asuransi	Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyaraaktan, Pemerintahan & Perorangan	Pemulung	Lainnya	TOTAL
BATUJAJAR	76	475	263	1	3	467	93	622	5.184
CIHAMPELAS	37	1.731	1.231	8	10	1.599	213	1.140	14.085
CIKALONG WETAN	150	1.206	595	9	6	727	70	149	12.912
CILILIN	53	1.538	536	6	4	385	90	1.941	10.333
CIPATAT	133	811	755	11	4	732	181	726	10.608
CIPEUNDEUY	89	647	456	2	5	569	30	444	8.325
CIPONGKOR	61	476	262	5	3	247	11	513	9.725
CISARUA	85	348	118	8	2	135	34	368	5.798
GUNUNGHALU	35	398	97	1	2	375	17	582	6.907
LEMBANG	634	1.579	828	24	10	1.052	69	900	14.009
NGAMPRAH	133	706	438	6	6	1.135	109	1.606	8.714
PADALARANG	105	1.118	700	8	10	921	122	2.462	10.884
PARONGPONG	88	332	112	2	-	322	18	170	4.273
RONGGA	30	269	116	4	-	620	10	88	6.499
SAGULING	2	213	73	2	2	199	6	1.307	6.813
SINDANGKERTA	39	373	139	5	2	145	22	443	6.350
Grand Total	1.750	12.220	6.719	102	69	9.630	1.095	13.461	141.419

Tabel 12:Kepemilikan Rumah

Kecamatan	Milik sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Bebas sewa
BATUJAJAR	4.980	224	213	744
CIHAMPELAS	11.797	418	140	1.822
CIKALONG WETAN	9.730	103	47	596
CILLIN	9.884	145	210	675
CIPATAT	10.787	199	196	1.372
CIPEUNDEUY	8.170	67	31	574
CIPONGKOR	10.150	31	81	332
CISARUA	4.106	47	52	608
GUNUNGHALU	6.827	11	52	133
LEMBANG	9.515	551	197	2.105
NGAMPRAH	7.043	368	169	1.312
PADALARANG	8.991	623	289	2.056
PARONGPONG	3.924	86	155	407
RONGGA	6.819	10	32	129
SAGULING	4.694	8	180	127
SINDANGKERTA	6.374	16	21	313
Grand Total	123.791	2.907	2.065	13.305

Tabel 13: Sumber Air

Kecamatan	Kemasan	Air Ledeng	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung
BATUJAJAR	828	173	4.700	460
CIHAMPELAS	1.028	57	11.514	1.579
CIKALONG WETAN	38	1.086	6.409	2.943
CILILIN	416	403	6.402	3.693
CIPATAT	495	835	8.686	2.538
CIPEUNDEUY	26	369	5.679	2.768
CIPONGKOR	153	416	5.991	4.034
CISARUA	54	193	1.565	3.001
GUNUNGHALU	9	97	2.187	4.730
LEMBANG	304	994	10.252	818
NGAMPRAH	352	719	6.829	992
PADALARANG	774	570	9.133	1.482
PARONGPONG	128	343	3.780	321
RONGGA	36	66	3.221	3.667
SAGULING	109	59	3.523	1.318
SINDANGKERTA	16	197	3.740	2.771
Grand Total	4.766	6.577	93.611	37.115

Tabel 14:Jenis Penerangan

Kecamatan	Listrik PLN	Listrik non-PLN	Tidak ada listrik
BATUJAJAR	6.108	47	6
CIHAMPELAS	14.050	109	19
CIKALONG WETAN	10.448	17	11
CILILIN	10.797	81	36
CIPATAT	12.361	156	37
CIPEUNDEUY	8.716	47	79
CIPONGKOR	10.544	15	35
CISARUA	4.735	68	10
GUNUNGHALU	6.968	18	37
LEMBANG	12.221	137	10
NGAMPRAH	8.711	137	44
PADALARANG	11.735	181	43
PARONGPONG	4.521	40	11
RONGGA	6.875	83	32
SAGULING	4.944	31	34
SINDANGKERTA	6.681	22	21
Grand Total	140.415	1.189	465

Tabel 15: Bahan Bakar Memasak

Kecamatan	Listrik/Gas	Minyak tanah	Briket/Arang/ Kayu	Tidak memasak di rumah
BATUJAJAR	4.749	6	1.245	161
CIHAMPELAS	10.405	15	3.688	70
CIKALONG WETAN	3.930	7	6.479	60
CILILIN	4.523	1	6.328	62
CIPATAT	4.703	9	7.696	146
CIPEUNDEUY	2.063	1	6.690	88
CIPONGKOR	2.785	4	7.772	33
CISARUA	2.610	1	2.105	97
GUNUNGHALU	737	4	6.271	11
LEMBANG	10.552	12	1.561	243
NGAMPRAH	6.927	11	1.865	89
PADALARANG	9.458	57	2.247	197
PARONGPONG	4.010	5	507	50
RONGGA	452	2	6.518	18
SAGULING	1.982	4	3.018	5
SINDANGKERTA	1.739	3	4.961	21
Grand Total	71.625	142	68.951	1.351

Tabel 16:Kepemilikan Jamban

Kecamatan	Jamban Sendiri	Jamban Bersama/Umum	Tidak ada
BATUJAJAR	3.841	2.155	165
CIHAMPELAS	8.525	5.336	317
CIKALONG WETAN	5.805	3.545	1.126
CILILIN	6.023	4.624	267
CIPATAT	5.836	5.140	1.578
CIPEUNDEUY	5.479	2.596	767
CIPONGKOR	6.320	4.031	243
CISARUA	2.833	1.816	164
GUNUNGHALU	3.516	3.384	123
LEMBANG	8.104	4.174	90
NGAMPRAH	5.939	2.881	72
PADALARANG	6.564	5.183	212
PARONGPONG	3.208	1.306	58
RONGGA	3.246	3.141	603
SAGULING	3.311	1.593	105
SINDANGKERTA	3.576	3.065	83
Grand Total	82.126	53.970	5.973

Tabel 17:Pembuangan Akhir Tinja

Kecamatan	Jamban Sendiri	Jamban Bersama/Umum	Tidak ada
BATUJAJAR	3.841	2.155	165
CIHAMPELAS	8.525	5.336	317
CIKALONG WETAN	5.805	3.545	1.126
CILILIN	6.023	4.624	267
CIPATAT	5.836	5.140	1.578
CIPEUNDEUY	5.479	2.596	767
CIPONGKOR	6.320	4.031	243
CISARUA	2.833	1.816	164
GUNUNGHALU	3.516	3.384	123
LEMBANG	8.104	4.174	90
NGAMPRAH	5.939	2.881	72
PADALARANG	6.564	5.183	212
PARONGPONG	3.208	1.306	58
RONGGA	3.246	3.141	603
SAGULING	3.311	1.593	105
SINDANGKERTA	3.576	3.065	83
Grand Total	82.126	53.970	5.973

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Sebagai upaya tindak lanjut dari latar belakang kondisi kemiskinan dan Analisis Kemiskinan Partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya termasuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan kedalam Arah Kebijakan Umum APBD pada tahun 2013-2018. Hasilnya, penduduk miskin pada tahun 2013: 12,92 % menjadi: 11,49 % pada tahun 2018 atau berkurang 1,43 persen. Ada tiga hipotesis yang dapat dirumuskan, pertama: bahwa terjadinya pengurangan kemiskinan hanya bergantung dari upaya Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan penanggulangan kemiskinan pada arah kebijakan pembangunan daerahnya, kedua: upaya yang dilakukan tidak tepat sasaran/tidak relevan dengan kondisi kemiskinan masyarakat, dan ketiga: upaya yang dilakukan hanya mengangkat kemiskinan dalam jangka pendek (cash programme) oleh karena tidak memberdayakan fakir miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan secara mandiri.

Pada Bab ini akan diidentifikasi upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi kemiskinan mulai dari aspek dibalik munculnya kebijakan penanggulangan kemiskinan hingga implementasi kebijakan tersebut di masyarakat. Dari tahap ini dapat diperoleh informasi posisi dan peran pemberdayaan masyarakat/fakir miskin dalam mengurangi kemiskinan.

3.1 Pembentukan Lembaga Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah membentuk lembaga khusus yang berfokus pada penanganan kemiskinan di wilayahnya yang bertugas memfasilitasi penanggulangan kemiskinan secara tepat dan berhasil guna.

Hal ini kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 800/kep.522-Bappeda/2013.

TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah, pihak dunia usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Bandung Barat merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bertanggung jawab kepada Bupati Bandung Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, TKPK menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaannya di Kabupaten Bandung Barat;
2. Memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tujuan dari keberadaan lembaga khusus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat ini adalah:

1. Mewujudkan kesamaan persepsi, cara pandang dan pendekatan penanggulangan kemiskinan;

2. Mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi dan diseminasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
3. Membangun sistem, mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan terpadu, profesional dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi upaya-upaya kerjasama dan kemitraan lintas sektor dan lintas pelaku secara luas guna meningkatkan intensitas dan mempercepat penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
6. Mendorong percepatan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya TKPK Kabupaten Bandung Barat membentuk Tiga Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yaitu: 1) Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi; 2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan 3) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat. disamping itu membentuk pula Empat Koordinator Kelompok Program, yaitu: 1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; 2) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; 3) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan 4) Kelompok Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan. Keanggotaannya melibatkan unsur masyarakat seperti: Bandung Barat Corporate Social responsibility (BBCSR), Yayasan/LSM, dan Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

3.2. Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan nasional yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), Kabupaten Bandung Barat pun menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah secara mandiri. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dan strategi yang tepat dalam menanggulangnya.

3.3. Komitmen Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mempunyai komitmen yang kuat dalam meminimalisasi kemiskinan yang ada. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain diimplementasikan dalam beberapa kebijakan yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pendidikan baik berupa peningkatan sarana dan prasarana maupun pemberian biaya operasional serta beasiswa;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa pembangunan prasarana kesehatan dan penambahan tenaga medis (baik dokter maupun tenaga medis lainnya termasuk bidan desa);
3. Pembangunan infrastuktur guna mengatasi keterisolasian daerah, seperti jalan, jembatan, dan prasarana umum lainnya; dan

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui optimalisasi potensi yang dimiliki masyarakat, pembinaan kepada masyarakat dan pemberian bantuan sarana produksi;

Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat guna memandirikan masyarakat yang operasionalisasinya dalam bentuk pengembangan kapasitas masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bekerjasama dengan lembaga swadaya maupun perguruan tinggi.

3.4. Perumusan Visi dan Misi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan komitmen dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dan hasil pelaksanaan analisis kemiskinan partisipatif pada Tahun 2017, maka dirumuskan Visi dan Misi Penanggulangan Kemiskinan yang berpedoman kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat. Visi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023 adalah: "Terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat miskin secara mandiri dan bermartabat serta mengurangi penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2023". Adapun misi yang diemban selama 5 tahun kedepan adalah: 1) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan; 2) Memandirikan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan; 3) Mensinergikan seluruh kebijakan dan aksi publik guna penanggulangan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan umum penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang di Kabupaten Bandung Barat adalah melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat miskin secara bertahap serta memandirikan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan.

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat adalah:

- 1) Keberpihakan;
- 2) Partisipatif;
- 3) Berwawasan Gender;
- 4) Keberlanjutan;
- 5) Pemberdayaan;
- 6) Meningkatkan Produktivitas;
- 7) Kebersamaan;
- 8) Keterbukaan;
- 9) Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 10) Sinergitas/Keterpaduan.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh adalah:

- 1) Menaikkan anggaran program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan, dengan melaksanakan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya;
- 2) Menciptakan good governance untuk mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan;

- 3) Melanjutkan program-program yang dinilai berhasil dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan;
- 4) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga terutama bahan makanan pokok.

3.5. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Strategi umum yang ditempuh dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Perluasan Kesempatan;
- c. Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Manusia;
- d. Perlindungan Sosial;
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Sementara strategi khususnya antara lain:

1. Perluasan kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar serta peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas baik kemampuan dasar maupun kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat beradaptasi dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi;
3. Memberikan perlindungan sosial dan rasa aman bagi kelompok rentan (jompo, penyandang cacat, perempuan kepala rumah tangga) tanpa diskriminasi;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pemerintah maupun sosial, ekonomi, dan budaya serta memperluas partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi);
5. Memperluas jaringan kemitraan dan meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait serta seluruh stakeholder baik tingkat lokal/regional/nasional guna mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Adapun kebijakan strategis sebagai landasan operasional rencana aksi untuk masing-masing sektor yang akan mencakup kebijakan strategis pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin ditempuh dengan

- a. Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat;
- b. Kebijakan Strategis Peningkatan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Masyarakat;
- c. Kebijakan Strategis Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Kebijakan Strategis Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- e. Kebijakan Strategis Peningkatan Perlindungan Sosial;
- f. Kebijakan Strategis Pengarusutamaan Gender;

Penjelasan mengenai langkah strategis ke-enam kebijakan tersebut ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18: Kebijakan dan Langkah-Langkah Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

No.	Kebijakan Strategis	Program/Langkah Strategis
1.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan pelayanan pendidikan
2.	Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan kesehatan 2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak 1. Penurunan Angka Kematian Bayi
3.	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<p>Penerobosan isolasi fisik daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membangun fasilitas umum guna mendukung pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru
4.	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar pada aset produksi
		<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan 2. usaha ekonomi masyarakat 3. Penguatan industri rakyat 4. Mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri 5. Pengembangan kawasan pertanian 6. Perwilayahan komoditas Membangun dan mengembangkan industri 7. pengolahan hasil pertanian 8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif Meningkatkan keterlibatan institusi non 9. pemerintah Membentuk forum komunikasi dan 10. meningkatkan koordinasi
5.	Peningkatan Perlindungan Sosial	<p>Pemberian bantuan bagi panti-panti jompo dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. panti asuhan anak
		<p>Pelatihan bagi masyarakat penyandang masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. sosial Pemberian bantuan bagi masyarakat yang 3. mengalami bencana
		<p>Pelayanan kartu sehat bagi masyarakat miskin</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. guna memperoleh layanan kesehatan gratis
		<p>Membangun dan memelihara kamtibmas yang dilandasi rasa kebersamaan, persatuan, dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. kesatuan
6.	Pengarusutamaan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kesetaraan gender dan pemberdayaan 2 Peningkatan kualitas hidup perempuan Peningkatan peran dan kemampuan 3 kelembagaan perempuan 4 Pemberdayaan perempuan pada keluarga miskin 5 Pembinaan Keluarga Berencana

3.6. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Keberadaan TKPK dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 cukup menjadi acuan bagi tetap terprioritaskannya upaya penanggulangan kemiskinan di tahun-tahun berikutnya. Namun RAD merupakan cerminan dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Seiring terjadinya pergantian Kepala Daerah pada tahun 2018, maka perlu dikaji sejauhmana kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut tetap konsisten dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru melalui kebijakan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan RPJMD dilakukan analisis isi terhadap kebijakan dalam RPJMD dengan enam kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RAD berikut implementasinya.

3.7. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor.....Tahun 2018. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025.

Di dalam RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dua arah rencana kebijakan yang dianggap strategis untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Arah kebijakan yang diwajibkan meliputi 26 urusan:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;Penataan Ruang;
5. Perencanaan Pembangunan;
6. Perhubungan;
7. Lingkungan Hidup;
8. Pertanahan;
9. Kependudukan dan catatan Sipil;
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial;
12. Ketenagakerjaan;
13. Koperasi dan UKM;
14. Penanaman Modal;
15. Kebudayaan;

16. Pemuda dan Olahraga;
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
18. Otonomi Daerah, Pembantuan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
19. Ketahanan Pangan;
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Statistik;
22. Kearsipan;
23. Komunikasi dan Informatika; dan
24. Perpustakaan.

Sedangkan arah kebijakan yang menjadi pilihan meliputi 8 urusan:

- a) Pertanian;
- b) Kehutanan;
- c) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- d) Pariwisata;
- e) Perikanan;
- f) Perdagangan;
- g) Industri; dan
- h) Ketransmigrasian.

Dalam rangka penggunaan analisis isi, kebijakan dalam RPJMD akan dijadikan sasaran dalam melihat indikator-indikator apa saja yang akan dijadikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat pada periode tahun 2018-2023. Hasil dari analisis isi, diketahui bahwa indikator-indikator penanggulangan kemiskinan yang terpilih meliputi 15 kebijakan pembangunan yang terdiri dari urusan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Kependudukan;
- g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Sosial;
- i. Koperasi dan UKM;
- j. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l. Ketenaga Kerjaan;
- m. Pariwisata;
- n. Perikanan; serta
- o. Industri dan Perdagangan.

3.8. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam LAKIP PD

Seiring dengan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintah daerah diorientasikan pada prinsip-prinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan daerah dalam rangka mendorong dan mendukung pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi legislatif daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih baik.

Kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut memiliki konsekuensi terhadap daerah untuk mampu mengelola pemerintahannya dengan baik. Salah satu bentuk kewenangan yang luas adalah dimana daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk melihat implementasi upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, dilakukan analisis isi terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dengan memilah pelaksanaan program/kegiatan dalam LAKIP diperoleh data mengenai adanya program/kegiatan yang merupakan implementasi dari upaya penanggulangan kemiskinan. Periode laporan yang dianalisis adalah LAKIP Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang mencakup program/kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan yang diterima baik dari pusat maupun propinsi, dan kegiatan-kegiatan pendampingan/penunjang atau pendukung program.

Hasil analisis isi yang mensinergikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan program/kegiatan dalam LAKIP Tahun Anggaran 2017-2018 diperoleh gambaran bahwa seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen PD diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan adanya relevansi antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya melibatkan satu PD saja, tetapi didukung pula dengan program/kegiatan dari PD lainnya. Dalam mengimplementasikan Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, PD yang terlibat hanyalah satu yaitu Dinas Pendidikan. Sementara terdapat 3 unit PD yang terlibat dalam mengimplementasikan Kebijakan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Masyarakat. Kebijakan yang paling banyak melibatkan PD adalah Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (6 unit PD), Kebijakan Pengarusutamaan Gender (6 unit PD) dan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Daerah (5 unit PD). Sementara itu Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial hanya diimplementasikan oleh 2 unit PD (Tabel 19).

Tabel 19. Jumlah PD yang Terlibat dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

No	Jenis Kebijakan	Jumlah PD yang terlibat	Keterangan
1.	Pendidikan	1	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan, DPMD, Bagian Kessos
3.	Infrastruktur	5	Dinas PUPR, Dishub, DLH, Dinas Rumkim
4.	Ekonomi	6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinsos, DiskopUMKM, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	Sosial	3	Dinsos, Disnakertrans dan Satpol PP
6.	Gender	7	Bagian Kessos, Dinsos, Disperindag, KopUMKM , Dinas Pertanian, Disdukcasip dan DP2KBP3A

Berdasarkan komponen program dan kegiatan yang terlibat dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2017 terdapat 60 program yang terlibat yang mencakup 146 jenis kegiatan. Jumlah seluruh kegiatan yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2017 adalah 171 kegiatan dengan 25 diantaranya merupakan kegiatan pendukung/pendampingan. Pada tahun 2018, sekalipun terjadi penurunan jumlah program, jumlah kegiatan yang terlibat meningkat menjadi 189 kegiatan, dimana terdiri dari 166 jenis kegiatan yang ditunjang oleh 23 kegiatan pendukung/pendampingan (Tabel 20).

Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat merupakan kebijakan yang diimplementasikan oleh paling banyak kegiatan, yaitu sebanyak 35 jenis kegiatan pada tahun 2017 dan 55 jenis kegiatan pada tahun 2018. Sedangkan kebijakan yang paling sedikit diimplementasikan adalah Kebijakan Pengarusutamaan Gender, yaitu sebanyak 17 jenis kegiatan pada tahun 2017 dan 13 jenis kegiatan pada tahun 2018. Namun jika dilihat dari segi jumlah implementasi program, Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat merupakan kebijakan yang paling banyak melibatkan program yaitu sebanyak 16 program (baik pada tahun 2017 maupun 2018) sehingga unit PD yang terlibat dalam mendukung kebijakan ini pun bervariasi.

Tabel 20. Jumlah Komponen Program dan Kegiatan yang Mendukung Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

No	Jenis Kebijakan	Komponen							
		Program		Jenis Kegiatan		Kegiatan Pendukung/ Pendampingan		Jumlah Kegiatan	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Pendidikan	4	4	35	55	12	10	47	65
2.	Kesehatan	11	9	28	23	1	3	29	26
3.	Infrastruktur	5	6	12	16	9	7	21	23
4.	Ekonomi	16	16	33	43	1	2	34	45
5.	Sosial	12	10	21	16	2	1	23	17
6.	Gender	12	10	17	13	0	0	17	13
	Jumlah	60	55	146	166	25	23	171	189

Banyaknya kegiatan saja tidak cukup mencerminkan bahwa kegiatan mencapai sasaran dan sesuai dengan output yang diharapkan. Kemampuan anggaran sangat menentukan kemampuan menangani luasnya cakupan kegiatan dalam mencapai tujuan. Alokasi anggaran yang dibelanjakan dalam mendukung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 cukup besar yaitu sebesar Rp 91.282.545.054 atau 32,76 persen dari total APBD Tahun 2017 (sebesar Rp 2,78 triliun). Dibandingkan tahun 2018, jumlah ini mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 120.423.540.000 miliar atau 41,96 persen dari total APBD Tahun 2018 (sebesar Rp 2,86 triliun).

Pada tahun 2017, porsi anggaran terbesar digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat yaitu sebesar Rp 38,199 miliar, disusul kebijakan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rp 33,942 miliar), Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Masyarakat (Rp 60 juta), Peningkatan Perlindungan Sosial (Rp 2,69 miliar), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Rp 52,637 miliar), dan Pengarusutamaan Gender (Rp 1,480 miliar).

Pada tahun 2018, porsi anggaran terbesar juga digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat yaitu sebesar Rp 56,3 miliar, disusul kebijakan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rp 69,6 miliar), Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Masyarakat (Rp 33,46 miliar), Peningkatan Perlindungan Sosial (Rp 29,05 miliar), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Rp 9,56 miliar), dan Pengarusutamaan Gender (Rp 1,59 miliar). Pada tahun anggaran ini, terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pengarusutamaan gender, tetapi terdapat peningkatan pada alokasi dana untuk kebijakan Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Peningkatan Perlindungan Sosial.

3.9. Keterpaduan Antar Program/Kegiatan

Pada umumnya seluruh program/kegiatan saling terpadu dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Namun jika dilihat dari jenis sarasannya, program/kegiatan ini dapat dikelompokkan sebagai kegiatan yang sarasannya langsung kepada masyarakat miskin dan kegiatan yang sarasannya tidak langsung kepada masyarakat miskin. Beberapa kegiatan yang sarasannya langsung kepada masyarakat miskin misalnya adalah Beasiswa bagi Siswa Putus Sekolah, Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil, kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan bagi PMKS, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan yang sarasannya tidak langsung kepada masyarakat miskin misalnya: Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Revitalisasi Posyandu, Pengembangan Jaringan Listrik Pedesaan, Pengembangan Agro Industri Pedesaan, Bantuan Tanggap Darurat Bencana, Pembinaan Keluarga Berencana, dan lain-lain.

Adanya penyertaan dua jenis kegiatan ini sebagai wujud implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kebutuhan langkah strategis dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan dipandang sebagai sebuah pekerjaan sistem, dimana untuk mengentaskan kemiskinan perlu dipertimbangkan juga aspek-aspek yang mempengaruhi kemiskinan. Sebagaimana hasil refleksi kemiskinan oleh masyarakat melalui metode PRA pada tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa persoalan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat berputar pada kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, aksesibilitas terhadap sarana umum, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, rendahnya harga hasil produksi, faktor keterisoliran, serta belum optimalnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Upaya mencapai keberhasilan suatu kegiatan juga didukung pula oleh langkah koordinatif dari masing-masing PD dalam mencapai tujuan kegiatan. Langkah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan penunjang atau pendampingan terhadap suatu kegiatan inti yang menjadi fokus utama. Beberapa fokus kegiatan yang melibatkan lintas instansi dan alokasi beragam sumber dana diantaranya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, Desa Siaga, Gerakan Masyarakat Mandiri, Pelatihan dan Pembentukan KUBE PMKS, Pemberdayaan Fakir Miskin, Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Penanganan WTS, Perkuatan Irigasi Partisipatif (WISMP), dan P2WKSS.

Adanya pelaksanaan lintas instansi berdampak negatif pada terjadinya kegiatan yang tumpang tindih (*overlapping*) akibat tumpang tindihnya tupoksi masing-masing instansi dan kurangnya koordinasi pada saat perencanaan. Namun untuk mencegah tumpang tindih di sasaran yang sama, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, mengambil jalan keluar dengan mengalokasikan kegiatan-kegiatan tersebut pada lokasi yang berbeda. Kegiatan yang tumpang tindih dapat dikategorikan tumpang tindih dalam hal kesamaan fokus keluaran dari kegiatan yang berbeda dan dari kegiatan yang sama. Beberapa kegiatan yang tumpang tindih dalam hal fokus keluaran dari kegiatan yang berbeda adalah: 1) Fokus keluaran pembangunan sarana pendidikan, jembatan, dan irigasi yang bertumpang tindih dengan fokus keluaran dari sub kegiatan dalam GSC, dan WISMP; dan 2) Penertiban WTS yang bertumpang tindih dengan fokus keluaran dari sub kegiatan Pembinaan WTS Melalui Upaya Repatriasi dan Penyaluran ke Panti Rahabilitasi WTS (BPMKS) dan Penertiban PSK (Sat Pol PP).

Beberapa kegiatan yang tumpang tindih dalam fokus keluaran dari kegiatan yang sama adalah: 1) Kegiatan Perkuatan Irigasi Partisipatif (WISMP) yang terdapat pada Bappelitbangda, Dinas RUMKIM, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan dana dari APBN dan APBD; dan 2) Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang terdapat pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR didanai oleh APBN dan APBD.

3.10. Harmonisasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Pusat

Jika melihat sebaran dan proporsi jumlah implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD cukup banyak berperan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terlihat pula dari sebaran kegiatan APBN yang mendukung ke-enam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Ini membuktikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat bersinergi dengan baik terhadap program penanggulangan kemiskinan daerah, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Program/kegiatan yang bersumber dana APBN murni ataupun APBN melalui dana dekonsentrasi ke Propinsi Jawa Barat pada dasarnya juga terdiri dari program/kegiatan yang sasarannya langsung dan yang tidak langsung kepada masyarakat miskin. Selaras dengan Kelompok Program Penanggulangan Nasional maka kondisi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat yang bersumber dana APBN dan termasuk dalam Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial adalah: Bantuan Siswa Miskin, BOS, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Bantuan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Yatim/Piatu Terlantar Dalam Panti. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat adalah: program-program dalam GSC, P3MD, PLD,dll, Pembinaan Keluarga Berencana, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Kemandirian Masyarakat masih belum ada yang bersumber dana dari APBN.

Jika dilihat dari aspek program/kegiatan berdasarkan sasaran yang langsung kepada masyarakat miskin, maka implementasinya lebih banyak yang tergolong dalam Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Program/kegiatan bersumber dana APBN yang termasuk dalam Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran langsung masyarakat miskin hanyalah PKH-KUBE. Dengan demikian upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat umumnya masih dalam bentuk memberikan bantuan langsung tunai (cash programme) dan bukan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan melihat adanya tipe kemiskinan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang tergolong kemiskinan kultural, memberikan bantuan cash programme hanya akan menambah sasaran penduduk miskin menjadi semakin malas dan tidak akan keluar dari kemiskinan.

Program/kegiatan yang tercakup dalam GSC pun pada dasarnya mempunyai isu sentral penanggulangan kemiskinan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur sosial dan aksesibilitasnya melalui pemberdayaan masyarakat untuk menangani permasalahan kemiskinan struktural, namun ternyata tidak dapat mengurangi jumlah kemiskinan secara signifikan karena sasarannya lebih kepada komunitas masyarakat secara umum daripada langsung kepada masyarakat miskin.

Secara internal Pemerintah Daerah melalui instansi pelaksana masih memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai sebuah proyek dan dilihat hanya dari sudut pandang ekonomi;

- 1) Masyarakat diposisikan sebagai obyek dan penerima pasif dari program;
- 2) Usulan maupun pilihan-pilihan yang diajukan masyarakat seringkali diintervensi dan diatur oleh aparat birokrasi, dimana aparat birokrasi menganggap dirinya lebih tahu dari masyarakat, sehingga melemahkan semangat partisipasi yang pada akhirnya dapat mematikan inisiatif lokal;
- 3) Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sering bertentangan dengan prinsip partisipasi, penghargaan terhadap hak masyarakat, serta lemahnya akuntabilitas publik;
- 4) Kebijakan Pemerintah Pusat seringkali tidak memperhatikan hak kepemilikan sumber daya alam oleh masyarakat, tidak memproteksi produksi masyarakat, ataupun tidak menjamin kebutuhan pasar untuk hasil bumi;
- 5) Terbatasnya infrastruktur dan sarana transportasi.

Dengan demikian apabila disinergikan antara program pusat yang diluncurkan dengan kendala yang dihadapi di Kabupaten Bandung Barat, maka permasalahan kemiskinan semakin rumit diatasi. Agar program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat, jalan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan program/kegiatan yang memberdayakan fakir miskin secara langsung dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan. Kegiatan yang termasuk dalam Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan sasaran utamanya memberdayakan fakir miskin hanya terdapat pada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan keterampilan bagi PMKS (sumber dana APBD), sekalipun proporsi kegiatan ini hanya 0,47 persen dari total anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2018, tapi efeknya dapat mengentaskan fakir miskin sebanyak 268 KK atau mewakili 1.317 jiwa. Dengan demikian mengembangkan program ini sangat berpotensi mengurangi kemiskinan karena sasarannya adalah langsung memberdayakan rumah tangga miskin dan di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat serta perguliran usaha sehingga keberhasilannya dapat ditularkan untuk mengentaskan fakir miskin lainnya.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.1 Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan Kab.Bandung Barat

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat selama kurun waktu 2018-2023 adalah: “Aspiratif-Kreatif-Unggul-Religius”. Visi tersebut dijabarkan dalam rangkaian misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

Di antara rangkaian tujuan dan sasaran tersebut, yang secara eksplisit mengerucut pada amanat penanggulangan kemiskinan, yaitu pada kemanfaatan (beneficiaries) targetnya adalah kelompok yang masuk pada kriteria rumah tangga/individu miskin sebagai berikut:

1. mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro;
2. mengembangkan lembaga pembiayaan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM);
3. penciptaan lapangan kerja baru;
4. penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan, terutama bagi penduduk miskin;
5. peningkatan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan nonformal untuk kecakapan hidup (life skill);
6. meningkatkan partisipasi pihak swasta (Corporate Social Responsibility/ CSR) dalam pendanaan pendidikan, terutama untuk pendidikan warga miskin;
7. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi, terutama penduduk miskin;
8. meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat;
9. penyusunan regulasi daerah supaya pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, termasuk pangan dan rumah layak huni yang mendukung pada upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
10. meningkatnya tertib hukum masyarakat atas tempat tinggal, khususnya dalam pengamanan dan penertiban tanah negara;
11. menuntaskan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
12. Penataan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Rumah Layak Huni permukiman kumuh; dan
13. Sasaran pembangunan jangka menengah yang bermuatan arah pembangunan berpihak pada kelompok miskin tersebut menjadi payung pengembangan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bandung Barat.

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya dikembangkan dalam strategi utama pemberdayaan masyarakat. Penggunaan pendekatan charity, yaitu tindakan bantuan langsung kepada masyarakat yang dilakukan dalam kerangka membangun kapasitas masyarakat supaya lebih memiliki kemampuan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Strategi umum penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat merujuk pada Perpres No. 15 Tahun 2010, memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

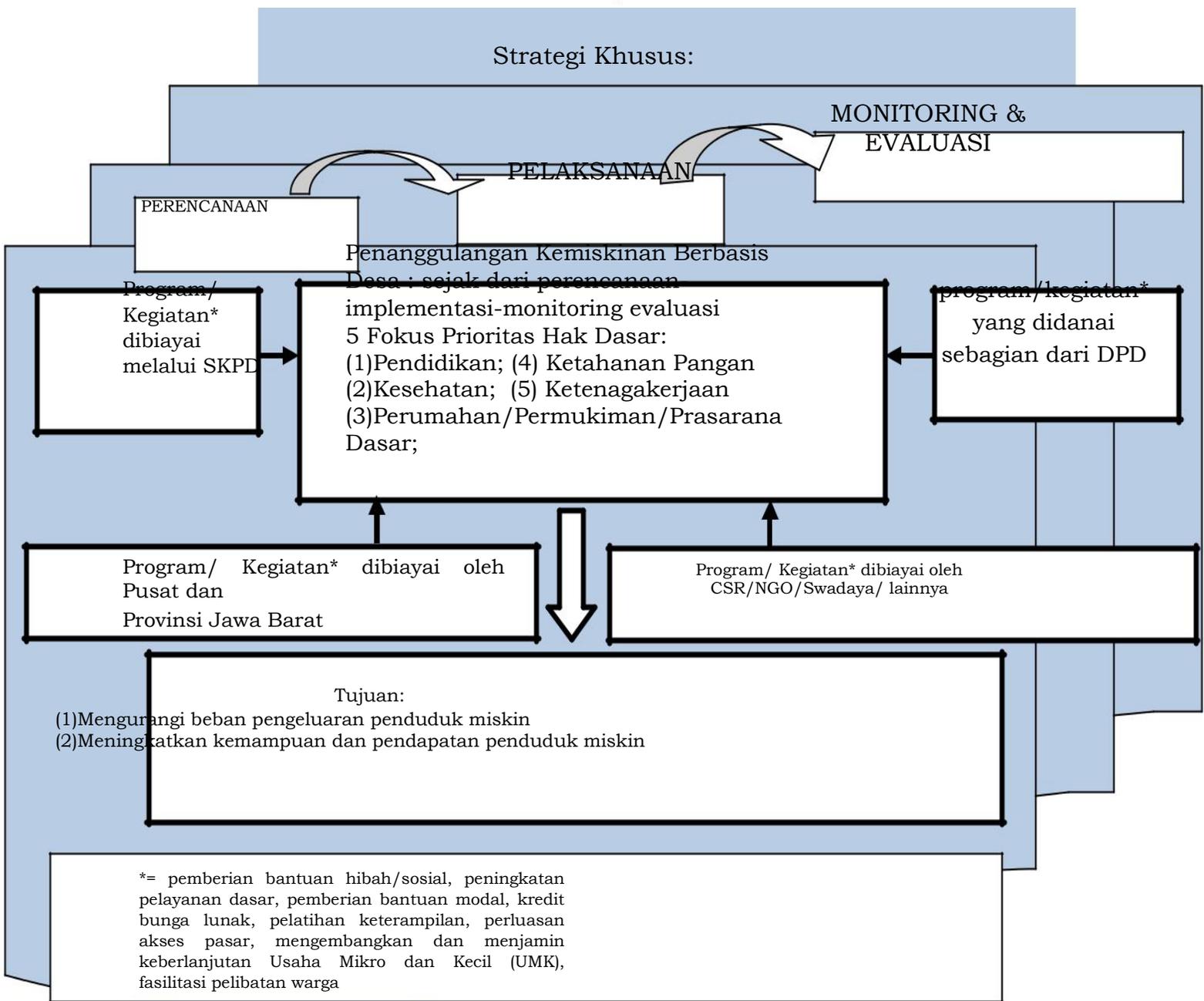
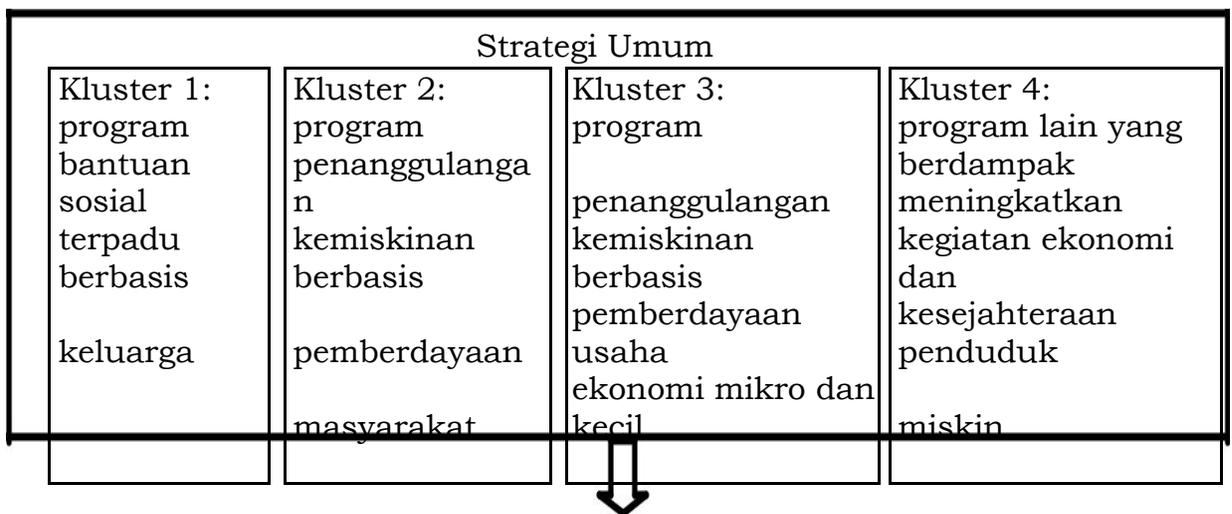
Ketiga tujuan tersebut dilakukan dengan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Bentuk sinergi ini dilaksanakan melalui strategi umum dilakukan dengan model / sistem klaster sebagai berikut:

1. Klaster 1 : Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
2. Klaster 2 : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Klaster 3 : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Klaster 4 : Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

Di Kabupaten Bandung Barat, strategi umum tersebut dikontekstualisasikan dengan pendekatan yang dijiwai oleh prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu perpaduan antara teknokratis, top down, bottom up dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung Barat akan mengembangkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pedesaan. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pedesaan, yaitu:

1. Mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap desa;
2. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber pendanaan: Pemerintah, swasta (Corporate Social Responsibility), dan swadaya masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap desa;
3. Mengaktifkan fasilitator lingkungan untuk memberdayakan masyarakat, basis memasukkan permasalahan kemiskinan komunitasnya ke dalam rencana strategis desa, terutama untuk pengelolaan penggunaan Dana Pembangunan Desa.

4. Fokus bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat selama kurun 2018-2023 akan dilakukan untuk bidang (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan/pemukiman/prasarana dasar; (4) Ketahanan Pangan; (5) Lapangan Pekerjaan. Apabila digambarkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:



Gambar 1: Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

Secara umum operasionalisasi strategi tersebut dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan strategi penanggulangan kemiskinan diawali dengan langkah:

- a. Pemetaan masalah kemiskinan, identifikasi jumlah rumah tangga/penduduk miskin;
- b. Merumuskan kriteria program dan kegiatan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan;
- c. Merumuskan sasaran dan target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Beberapa penjelasan terhadap tahap perencanaan strategi penanggulangan kemiskinan di atas adalah sebagai berikut:

A. Mekanisme Pemetaan Masalah Kemiskinan dan Pendataan Kelompok Sasaran

Pemetaan masalah kemiskinan diawali dengan pendataan kondisi dan jumlah penduduk miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang valid merupakan prasyarat mutlak bagi pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kondisi hidup orang miskin.

Pemetaan kelompok sasaran dilakukan berdasarkan indikator kemiskinan yang digunakan. Penggunaan indikator akan mempengaruhi jumlah kelompok sasaran dan tingkat keparahan kondisi kemiskinannya. Oleh karena itu, TKPKD Kabupaten Bandung Barat menggunakan komposit indikator dari berbagai sumber supaya lebih komprehensif dalam menjangkau kelompok penduduk miskin. Logika yang mendasari bahwa kemiskinan itu sebagai lingkaran setan; dimana sentra masalahnya saling terkait dan sangat kentara dalam area pendidikan; pendapatan/daya beli/pekerjaan/keterbatasan menanggung beban tanggungan keluarga; perumahan/permukiman/prasarana dasar; ketahanan pangan; dan kesehatan

Proses penetapan indikator kemiskinan yang akan digunakan untuk verifikasi penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dalam proses diskusi dengan stakeholder terkait bidang prioritas fokus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR (urusan perumahan/permukiman/prasarana dasar), Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan unsur stakeholder non pemerintah lainnya.

Indikator utama yang digunakan merujuk dari BPS (Badan Pusat Statistik) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk, terdiri atas 14 (empat belas) indikator, sehingga rancangan awal indikator kemiskinan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.

Tabel 21: Rancangan Awal Indikator Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator	Kriteria
	Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk, terdiri dari 14 (empat belas) indikator:	
1.	Luas lantai	< 8 m ² per kapita;
2.	Jenis lantai	tanah/ bambu/ kayu/ semen berkualitas rendah
3.	Jenis dinding	bambu/ rumbia/ kayu/ tembok berkualitas rendah;
4.	Fasilitas buang air besar	tidak punya/ bersama/ umum/ lainnya;
5.	Sumber air minum	sumur atau mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan;
6.	Penerangan utama	bukan listrik;
7.	Bahan bakar masak	kayu/ arang/ minyak tanah;
8.	Konsumsi makanan	membeli daging/ ayam/ susu maksimal 1 x dalam seminggu
9.	Frekuensi makan	makan maksimal 2 x sehari;
10.	Konsumsi pakaian	membeli pakaian maksimal 1 stel dalam 1 tahun
11.	Kemampuan berobat	tidak mampu ke puskesmas
12.	Pekerjaan	buruh tani/ bangunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,-
13.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
14.	Kepemilikan asset	tidak mempunyai tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk
--

Dalam perkembangannya pendataan BPS untuk Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang menjadi rujukan TNP2K mengembangkan indikatornya, dan secara umum menghasilkan potret kemiskinan berbasis rumah tangga dan individu yang dikategorikan berdasar status kesejahteraannya. Indikator yang sebagai berikut:

- 1) Unit rumah tangga dengan indikator:
 - a. Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga;
 - b. Umur Kepala Rumah Tangga saat Pendataan;
 - c. Pendidikan Kepala Rumah Tangga;
 - d. Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga;
 - e. Status kedudukan dalam pekerjaan Kepala Rumah Tangga;
 - f. Status penguasaan bangunan tempat tinggal;
 - g. Jenis Atap Terluas;
 - h. Jenis Dinding Terluas;
 - i. Jenis Lantai;
 - j. Sumber air minum;
 - k. Sumber penerangan utama;
 - l. Fasilitas tempat buang air besar;
 - m. Tempat pembuangan akhir tinja;
 - n. Jumlah Keluarga dalam satu rumah tangga;
 - o. Jumlah Individu yang menjadi tanggungan dalam 1 keluarga;
 - p. Gender kepala keluarga (apakah perempuan atau laki/laki yang menjadi kepala keluarga).
- 2) Unit Individu, dikelompokkan berdasar kategori penerima jamkesmas dan non jamkesmas; dengan indikator:
 - a) hubungan dengan Kepala Rumah Tangga;
 - b) hubungan dengan Kepala Keluarga;
 - c) jenis Kelamin;
 - d) umur;
 - e) jenis kecacatan;
 - f) penyakit kronis;
 - g) partisipasi sekolah;
 - h) ijazah tertinggi ;
 - i) kelas tertinggi;
 - j) lapangan Usaha;
 - k) status kedudukan dalam pekerjaan

Berdasar data resmi dari BPS diperoleh daftar jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah sebarannya di kecamatan dan desa. Informasi status kesejahteraan rumah tangga/individu disajikan data pada level kecamatan dalam kategori:

- 1) Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah;
- 2) Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah; dan
- 3) Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah.

Setelah BPS mengembangkan indikator untuk pendataan penduduk miskin (2015), maka TKPKD Kabupaten Bandung Barat melakukan penyesuaian indikator yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi hasil pendataan penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat. Penyesuaian indikator dari rancangan awal ke rancangan akhir diuraikan sebagai berikut.

Tabel 22: Proses Penyesuaian Rancangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator Lama	Baru		Sumber	
		Indikator	Kriteria		
(1)	(2)	(3)		(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Luas lantai	1.	Luas lantai	< 8 m ² per kapita;	BPS (PSEP)
2.	Jenis lantai	2.	Jenis lantai	tanah/ bambu/ kayu/ semen berkualitas rendah	
3.	Jenis dinding	3.	Jenis dinding	bambu/ rumbia/ kayu/ tembok berkualitas rendah;	
4.	Fasilitas buang air besar	4.	Fasilitas buang air besar	tidak punya/ bersama/ umum/ lainnya;	
		5.	Tempat pembuang -	1) Tangki/SPAL 2) Lainnya	BPS PBDT 2015

No	Indikator Lama	Baru		Sumber	
		Indikator	Kriteria		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			an akhir tinja rumah tangga		
5.	Sumber air minum	6.	Sumber air minum	1) Air Kemasan; 2) Air Ledeng; 3) Air Terlindung; 4) Sumur atau mata air tidak terlindung/ sungai/air hujan;	1) BPS PSEP 2) BPS PBDT 2015
6.	Penerangan utama	7.	Penerangan utama	1) Listrik PLN; 2) Listrik non-PLN; 3) Penerangan Minyak; 4) Tidak ada	
7.	Bahan bakar masak	8.	Bahan bakar masak	Kayu/ arang/ minyak tanah;	
8.	Konsumsi makanan	9.	Konsumsi makanan	Membeli daging/ ayam/ susu maksimal 1 x dalam seminggu	BPS PSEP
9.	Frekuensi makan	10.	Frekuensi makan	Makan maksimal 2 x sehari;	
10.	Konsumsi pakaian	11.	Konsumsi pakaian	Membeli pakaian maksimal 1 stel dalam 1 tahun	
11.	Kemampuan berobat	12.	Kemampuan berobat	Tidak mampu ke puskesmas	
12.	Pekerjaan	13.	Pekerjaan	1) Buruh tani/ bangunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan kota *(tahun 2010	1) BPS PSEP dengan garis kemiskinan -

			<p>Garis Kemiskinan Kota Surakarta Rp306.584,- per kapita)</p> <p>2 2) Jenis lapangan kerja: (a) Pertanian tanaman padi & palawija, (b) hortikultura, (c) perkebunan, (d) perikanan tangkap, (e) perikanan budi daya, (f) peternakan, (g) kehutanan/pertanian lainnya, (h) pertambangan/penggalian, (i) industri pengolahan, (j) listrik dan gas, (k) bangunan/ konstruksi, (l) perdagangan, (m) hotel dan rumah makan, (n) transportasi dan pergudangan, (o) informasi dan komunikasi, (p) keuangan dan asuransi, jasa, (q) lainnya</p> <p>3) Status KK dalam pekerjaan: (a) Berusaha sendiri; (b) Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar; (c) Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar; (d) Buruh / karyawan / pegawai swasta; (e) Pekerja bebas; (f) Pekerja keluarga / tidak dibayar</p>	<p>an 2) BPS PBDT 2015</p>
	14.	Status kerja anggota	<p>1 1) Ada usia anak (di bawah 18 tahun) yang bekerja</p>	<p>BPS PBDT 2015</p>

			Rumah Tangga Sasaran (RTS	2 Ada usia 18-60 tahun yang) tidak bekerja (dan tidak sedang bersekolah) 3) Ada usia lanjut (60 + tahun) yang masih bekerja	
No	Indikator Lama	Baru			Sumber
		Indikator	Kriteria		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
13.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	15 .	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	1) Tidak punya ijazah; 2) SD/ sederajat; 3) SMP/ sederajat; 4) SMA/ sederajat; 5) 5) Perguruan Tinggi	1) BPS PSEP 2013 2) BPS PBDT 2015
14.	Kepemilikan asset	16 .	Kepemilikan asset	Tidak mempunyai tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya	BPS PSEP 2013
15.	Jumlah penghuni rumah	17 .	Jumlah penghuni rumah	Lebih dari 1 keluarga (KK) dalam 1 rumah tangga	BPS PBDT5 2015
16.	Pembagian sekat ruangan	terintegrasi dalam indikator: luas lantai, jumlah penghuni rumah, dan jumlah KK dalam RT, untuk mengukur daya tampung rumah dan kesehatan penghuni			
17.	Pendapatan keluarga	Diintegrasikan dalam indikator pekerjaan; yang mencakup status kerja/tidak; batasan kategori penghasilan (garis kemiskinan kota); jenis pekerjaan; dan status dalam pekerjaan			
18.	Tanggungungan	18 .	Jumlah	lebih dari 4 orang	BPS untuk

	keluarga		tanggung n keluarga		Basis Data Terpadu
19.	Tingkat pendidikan anak usia sekolah	19 .	Anak usia sekolah yang tidak bersekolah :	1) usia 7-12 tahun 2) usia 13-15 tahun 3) usia 16-18 tahun	untuk Program Perlindungan Sosial 2015
20.	Keikutsertaan dalam asuransi kesehatan;	20 .	Kemampuan berobat/kepemilikan jaminan kesehatan	1) Tidak mampu ke puskesmas 2) Tidak memiliki asuransi/ jaminan kesehatan	BPS untuk Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2015
21.	Gangguan penyakit kardiastropik /menahun	21 .	Penderita Penyakit Kronis	1) Kelompok usia di bawah 15 tahun; 2) Kelompok usia 15-45 tahun; 3) Kelompok usia 45-60 tahun; 4) Kelompok 60+ tahun. Jenis penyakit: (a) Hipertensi; (b)) Rematik; (c) Asma; (d) Masalah jantung; (e) Diabetes; (f) Tuberculosis; (g) Stroke; (h) Kanker /tumor; (i) Lainnya (HIV/AIDS, dll.)	an Sosial 2015
22.	Penyakit sosial: cacat fisik/mental;	22 .	Penderita kecacatan	1) usia 0-15 tahun 2) usia 15-45 tahun 3) usia 45-60 tahun	

				4) usia 60+ tahun Jenis kecacatan: A. Tuna Netra B. Tuna Rungu dan Wicara C. Tuna Grahita D. Tuna Daksa	
23.	Penggunaan alat kontrasepsi PUS			diintegrasikan dalam indikator Jumlah tanggungan keluarga dan indikator kepemilikan jaminan kesehatan untuk mengukur kemampuan keluarga miskin mendapatkan alat kontrasepsi dalam rangka mengendalikan kelahiran yang berdampak pada beban tanggungan keluarga	
Indikator tambahan					
		23	Kepala Rumah	ya/tidak (untuk mengukur keberadaan kelompok rentan)	BPS PBDT 2015
			Tangga Perempuan		

Dari hasil penyesuaian indikator tersebut di atas, kemudian masing-masing indikator dikelompokkan dalam bidang fokus penanggulangan kemiskinan sebagai berikut.

Tabel 23: Checklist RT / Individu Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator	Kriteria	Hasil Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Perumahan/Pemukiman/Prasarana Dasar		
1.	Luas lantai	< 8 m ² per kapita	
2.	Jenis dinding	bambu/ rumbia/ kayu/ tembok berkualitas rendah	
3.	Jenis lantai	tanah/ bambu/ kayu/ semen	

		berkualitas	
		rendah	
4.	Penerangan utama	1) Listrik PLN; 2) Listrik non-PLN; 3) Penerangan Minyak; 4) Tidak ada	
5.	Fasilitas buang air besar	1) Tidak punya 2) Bersama/ umum 3) Lainnya	
6.	Tempat Pembuangan Akhir Tinja Rumah Tangga	1) Tangki/SPAL 2) Lainnya	
7.	Sumber air minum	1) Air Kemasan; 2) Air Ledeng; 3) Air Terlindung; Sumur atau mata air tidak 4) terlindung/ sungai/ air hujan;	
8.	Status tempat tinggal	1) Milik sendiri 2) Menumpang 3) Menyewa/kontrak	
9.	Jumlah penghuni rumah	Lebih dari 1 keluarga (KK) dalam 1 rumah tangga	
II.	Kemampuan pendapatan/Pekerjaan		
10.	Pekerjaan	Buruh tani/bangunan atau 1) pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan kabupaten *(tahun 2010 Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat Rp306.584,- per kapita). 2) Jenis lapangan kerja: (a) Pertanian tanaman padi & palawija, (b) hortikultura, (c) perkebunan, (d) perikanan tangkap, (e) perikanan budi	

		<p>daya, (f) peternakan, (g) kehutanan/pertanian lainnya, (h) pertambangan/penggalian, (i) industri</p> <p>pengolahan, (j) listrik dan gas, (k) bangunan/konstruksi, (l) perdagangan, (m)</p> <p>hotel dan rumah makan, (n) transportasi</p> <p>dan pergudangan, (o) informasi dan komunikasi, (p) keuangan dan asuransi,</p> <p>jasa, (q) lainnya</p> <p>Status KK dalam</p> <p>3) pekerjaan:</p>	
No	Indikator	Kriteria	Hasil Temuan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>(a) Berusaha sendiri; (b) Berusaha dibantu</p> <p>buruh tidak tetap/tidak dibayar; (c) Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar;</p> <p>(d). Buruh/karyawan/ pegawai swasta; (e)</p> <p>Pekerja bebas; (f) Pekerja keluarga/tidak dibayar</p>	
11.	<p>Status kerja anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rumah tangga:</p>	<p>Ada usia anak (di bawah 18 tahun)</p> <p>1) yang bekerja</p> <p>Ada usia 18-60 tahun yang tidak</p> <p>2) bekerja (dan tidak sedang bersekolah)</p> <p>Ada usia lanjut (60 + tahun) yang</p> <p>3) masih bekerja</p>	
12.	<p>Kepemilikan asset</p>	<p>Tidak mempunyai tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, atau barang modal lainnya.</p>	

13.	Jumlah tanggungan keluarga	lebih dari 4 orang	
14.	Kepala Rumah Tangga Perempuan	ya	
III.	Pendidikan		
15.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga	(a) Tidak punya ijazah; (b) SD/ sederajat; (c) SMP/ sederajat; (d) SMA/ sederajat; (e) Perguruan Tinggi	
16.	Anak usia sekolah yang tidak bersekolah:	1) usia 7-12 tahun 2) usia 13-15 tahun 3) usia 16-18 tahun	
IV	Kesehatan		
17.	Kemampuan berobat/kepemilikan jaminan kesehatan	tidak mampu ke 1) puskesmas 2) tidak memiliki asuransi/ jaminan kesehatan	
18.	Penderita kecacatan	1) usia 0-15 tahun 2) usia 15-45 tahun 3) usia 45-60 tahun 4) usia 60+ tahun Jenis kecacatan: A. Tuna Netra B. Tuna Rungu dan Wicara C. Tuna Grahita D. Tuna Daksa	
19.	Penderita Penyakit Kronis	1) Kelompok usia di bawah 15 tahun; Kelompok usia 15-45 tahun; 2) tahun; Kelompok usia 45-60 tahun; 3) tahun; 4) Kelompok 60+ tahun. Jenis penyakit: (a) Hipertensi; (b) Rematik; (c) Asma;	

		(d) Masalah jantung; (e) Diabetes; (f) Tuberculosis; (g) Stroke; (h) Kanker /tumor; (i) Lainnya (HIV AIDS, dll.)	
20.	Konsumsi pakaian	Membeli pakaian maksimal 1 stel dalam 1 tahun	
V.	Ketahanan Pangan		
21.	Bahan bakar masak	Kayu/ arang/ minyak tanah	
22.	Konsumsi makanan	Membeli daging/ ayam/ susu maksimal 1 x dalam seminggu	
23.	Frekuensi makan	Makan maksimal 2 x sehari	

Sumber: Diolah dari gabungan indikator: (1) BPS

Jadi, strategi pendataan kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bandung Barat dilakukan dalam tahapan proses sebagai berikut:

- 1) basis data awal jumlah rumah tangga miskin/penduduk miskin menggunakan hasil pendataan BPS yang dipublikasikan oleh TNP2K tentang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat;
- 2) strategi pendataan kedua adalah berdasar data BPS dilakukan verifikasi kelompok sasaran di tingkat desa. Verifikasi rumah tangga/individu sasaran menggunakan checklist indikator gabungan dari BPS untuk pendataan Sosial Ekonomi Penduduk dan BPS untuk Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 2015,; dan
- 3) strategi pendataan ketiga adalah mengembangkan dan memperbaharui (up dating) data pokok (base data) secara periodik (tahunan) untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, akurat, dan terstruktur.

Data pokok kemiskinan yang diupayakan untuk disajikan adalah data kelompok sasaran (rumah tangga/individu) dari indikator kemiskinan dari sisi kemampuan pendapatan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan kemampuan ketahanan pangan. Kondisi kemiskinan merupakan hasil kumulatif dari banyak variabel, sehingga dalam pembaharuan data kemiskinan ini juga akan dikembangkan basis data pendukung mengenai karakteristik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi meningkatkan/ menurunkan tingkat keparahan dan kedalam kemiskinan.

B. Menentukan Kriteria program dan kegiatan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan

Sesuai dengan strategi utama yang dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat untuk penanggulangan kemiskinan, maka program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan harus memenuhi kriteria:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin untuk meningkatkan kualitas;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk penyerapan tenaga kerja dari penduduk miskin.

Berdasar kriteria tersebut maka kisi-kisi program dan kegiatan prioritas di bidang fokus penanggulangan kemiskinan, yaitu: kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, ketahanan pangan dan perumahan/pemukiman/prasarana Dasar, disarikan dari daftar Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan sebagai berikut.

- 1) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.
 - a) penurunan persentase ibu, bayi dan anak balita dengan status gizi buruk maupun gizi kurang menurun;
 - b) cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin;
 - c) pemenuhan jasa pelayanan, sarana, kegiatan operasional dan pemeliharaan bagi pelayanan kesehatan program jamkesmas; dan
 - d) penyediaan Sarana Air Bersih Terutama Bagi penduduk miskin.
- 2) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan
 - a) pemenuhan Layanan Pendidikan bagi siswa dari penduduk miskin; dan
 - b) Semua komponen masyarakat (laki-laki dan perempuan), terutama dari penduduk miskin, dan kelompok berkebutuhan khusus memiliki akses yang setara dan adil untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya.
- 3) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan.
 - a) pelatihan bagi wanita rawan sosial;
 - b) meningkatkan keterampilan berkreasi para penyandang cacat;
 - c) penanganan anak terlantar;
 - d) meningkatkan usaha ekonomi produktif bagi kepala rumah tangga perempuan yang mempunyai potensi usaha dan keterampilan;

- e) pengembangan informasi tenaga kerja, pendidikan, pelatihan, dan permodalan bagi keluarga miskin (status kesejahteraan 1, 2, 3); dan
 - f) meningkatnya kemampuan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan.
- 4) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan.
- a) kecukupan ketersediaan produk pangan dan terkendalinya harga produk pangan untuk penduduk miskin;
 - b) kecukupan ketersediaan LPG 3 kg dan terkendalinya harga LPG 3 kg; dan
 - c) penyediaan dan perluasan akses pangan masyarakat bagi penduduk miskin (status kesejahteraan 1, 2, 3).
- 5) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang perumahan/pemukiman/prasarana dasar:
- a) relokasi bantaran sungai;
 - b) pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
 - c) penyediaan Sarana Sanitasi Terutama Bagi penduduk miskin.
- 6) Prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang regulasi dan kegiatan administrasi pendukung
- a) validasi data penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat dengan data dasar hasil PBDT/ TNP2K;
 - b) penetapan penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat melalui SK Bupati;
 - c) pembaharuan data dasar (up dating base) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 - d) pengembangan model distribusi pangan yang efisien untuk rakyat miskin;
 - e) penetapan pronangkis dalam prioritas pembangunan daerah;
 - f) pelatihan untuk menghasilkan fasilitator perencanaan dan monitoring program dan pronangkis berbasis masyarakat di tingkat desa; dan
 - g) pengembangan kerjasama dengan stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasar strategi umum dan prioritas fokus penanggulangan kemiskinan, maka rencana makro prioritas program sebagai berikut:

Tabel 24: Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

STRATEGI UMUM	STRATEGI KHUSUS	PROGRAM PRIORITAS					
		Pendidikan	Kesehatan	Ketenagakerjaan	Ketahanan Pangan	Perumahan/ Permukiman/ Prasarana Dasar	Prog. Adm. Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Klaster 1: Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan	1) Bantuan Hibah 2) Bantuan sosial 3) Penyediaan pelayanan dasar	1) Peningkatan kemampuan siswa dari penduduk miskin melanjutkan pendidikan 12 tahun 2) Peningkatan cakupan pelayanan	1) Penurunan persentase ibu, bayi dan anak balita dengan status gizi buruk maupun gizi kurang 2) Peningkatan kemampuan cakupan	1) Penanganan PMKS 2) Fasilitasi/ bantuan modal/ pemasaran untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif bagi kepala rumah	1) Kecukupan ketersediaan produk pangan dan terkendalinya harga produk pangan untuk penduduk miskin (pengendalian inflasi daerah)	1) Relokasi bantaran sungai 2) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3) Penyediaan sarana air bersih terutama bagi	

<p>pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;</p>		<p>pendidikan bagi semua komponen masyarakat (laki-laki dan perempuan), terutama dari penduduk miskin, termasuk kelompok berkebutuhan khusus memiliki akses yang setara dan adil untuk</p>	<p>pelayanan kesehatan penduduk miskin</p> <p>3) Penurunan persentase penyakit kronis, katrastopik atau menahun, HIV/AIDS</p>	<p>tangga perempuan yang mempunyai potensi usaha dan keterampilan</p> <p>3) Pengembangan informasi tenaga kerja, pendidikan, pelatihan, dan permodalan bagi keluarga miskin (status kesejahteraan</p>	<p>2) Kecukupan ketersediaan LPG 3 kg dan terkendalinya harga LPG 3 kg</p> <p>3) Penyediaan dan perluasan akses pangan masyarakat bagi penduduk miskin (status kesejahteraan 1, 2, 3)</p> <p>4) Pengembangan model</p>	<p>penduduk miskin</p> <p>4) Penyediaan Rumah Layak Huni</p>	
--	--	--	---	---	--	--	--

		mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya		1, 2, 3) 4) Program padat karya untuk Anggota	distribusi pangan yang efisien untuk penduduk		
				Rumah Tangga kelompok 1, 2,3	miskin		
2. Klaster 2: Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan	Fasilitasi Pelibatan warga di perencanaan lingkungan untuk mensinergikan dan optimalkan sumberdaya yang ada untuk	Pendidikan keterampilan yang diselenggarakan untuk penduduk miskin dengan memperhatikan aspek kesehatan		1) Pelatihan bagi PMKS 2) Meningkatkan keterampilan berkreasi para penyandang cacat dengan memperhatikan aspek		1) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2) Penyediaan Sarana Sanitasi Terutama Bagi penduduk	1) Pelatihan untuk menghasilkan fasilitator perencanaan dan monitoring program dan pronangkis berbasis masyarakat di

<p>untuk mengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan</p>	<p>program penanggulangan kemiskinan</p>			<p>kesehatan</p> <p>3) Pelatihan keterampilan kerja untuk individu/RT kelompok 1, 2, 3</p> <p>4) Pengembangan kemampuan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan</p> <p>5) Pemberian akses fasilitas berusaha bagi</p>		<p>miskin</p> <p>3) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman kumuh</p>	<p>tingkat kelurahan</p> <p>2) Pengembangan kerjasama dengan stakeholders (LKK/Lemba ga Kemasyarak atan Kelurahan) dalam penanggulan gan kemiskinan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

masyarakat ;				PKL dari penduduk miskin			
3. Klaster 3: Kelompok	Pemberian bantuan modal,			1) P2MBG (Program			
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan	kredit bunga lunak, pelatihan keterampilan, perluasan akses pasar, perkuatan Koperasi & KUBE			Pemberdayaan Masyarakat berbasis Gender) 2) KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 3) Menjamin keberlanjutan usaha mikro			

<p>akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;</p>				<p>dan kecil 4) Memperluas akses pasar produk usaha mikro kecil</p>			
<p>4. Klaster 4: Program-</p>	<p>Program/kegiatan lintas SKPD</p>			<p>5) Koperasi 6) Memperluas akses permodalan bagi penduduk miskin 7) Mendorong tumbuh kembang BUMM (Badan Usaha Milik Masyarakat)</p>			<p>1) Regulasi yang mengatur</p>

program lainnya yang baik secara	atau lintas pelaku (swasta atau swadaya						percepatan penanggulangan kemiskinan
langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	masyarakat)						<p>2) Validasi data masyarakat miskin Kota Surakarta dengan data dasar hasil PPLS/ TNP2K</p> <p>3) Penetapan Penduduk Miskin Kota Surakarta melalui SK walikota</p> <p>4) Pembaharuan data dasar (up</p>

							dating base) Penyandang Masalah Kesejahteraan
--	--	--	--	--	--	--	--

C. Mekanisme Perencanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat menggunakan pendekatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa untuk mendorong partisipasi masyarakat di tingkat desa dalam proses pembangunan di wilayahnya dan menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran untuk kelompok miskin dan kelompok rentan di desa masing-masing.

Pendekatan ini memerlukan ketersediaan Fasilitator Lingkungan (Fasling) yang dapat diperankan oleh tokoh - tokoh masyarakat/pengurus kelembagaan kemasyarakatan untuk membantu masyarakat menganalisis kebutuhan dasar masyarakat, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi kelangsungan hidup kelompok miskin dan kelompok rentan di lingkungan masing-masing.

Mekanisme perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dalam tahapan proses berikut:

- 1) Melaksanakan pemetaan permasalahan, kebutuhan, dan potensi di lingkup RW/ RT dan Desa untuk memperoleh gambaran kondisi rumah tangga miskin, kerentanan kemiskinan dan potensi untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta peta kemiskinan. Di dalam survei rumah tangga ini digunakan untuk memotret aspirasi dan kebutuhan penduduk miskin.
- 2) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan di lingkup desa untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan (Tahun 2018 - 2023). Renstra Masyarakat merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa untuk periode 5 (lima) tahun yang disinkronkan dan disinergikan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersumber dari aspirasi, kebutuhan, dan pengembangan potensi masyarakat serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di lingkup desa (DPD, CSR, Swadaya Masyarakat, dan sebagainya).
- 3) Renstra Masyarakat memuat prioritas masalah kemiskinan di lingkup desa dan rencana kebutuhan kegiatan untuk peningkatan kemampuan hidup penduduk miskin menjadi masukan bagi penyusunan RKPD dan Renja - SKPD.
- 4) Hubungan keterkaitan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis desa dengan dokumen perencanaan daerah.

Sementara itu, sinergitas penanggulangan kemiskinan ditingkat desa dapat dilakukan dengan cara dan mekanisme sebagai berikut:

- 1) mengembangkan sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya: alokasi ADD, Rehab RTLH, Program KUBE, pemberdayaan Koperasi dan UMK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Sanimas, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG);

- 2) program Sanimas, Keramikisasi, Rehab RTLH, Posyandu, Pelatihan keterampilan untuk peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja, disinergikan dengan program lainnya dengan kerangka perencanaan pada rencana program penanggulangan kemiskinan, P2MBG, dan Program KUBE diberdayakan untuk memperkuat sinergi tersebut, P2MBG fokus pada pemberdayaan perempuan, KUBE diarahkan pada kelompok usaha kecil yang sudah dibina;
- 3) Meningkatkan peran Kepala Desa untuk membangun koordinasi dan kolaborasi antara LKM, Pokja, Pengurus KUBE, Koperasi, dan stakeholders di tingkat desa serta lembaga lain yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan; dan
- 4) Mengoptimalkan peran LPMD dalam mengembangkan sinergi program-program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat basis. Tim ini berperan dalam koordinasi dan sinergi penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan PJM Pronangkis dan Renstra Pronangkis serta Renstra Masyarakat Desa.

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023

SPKD Kabupaten Bandung Barat

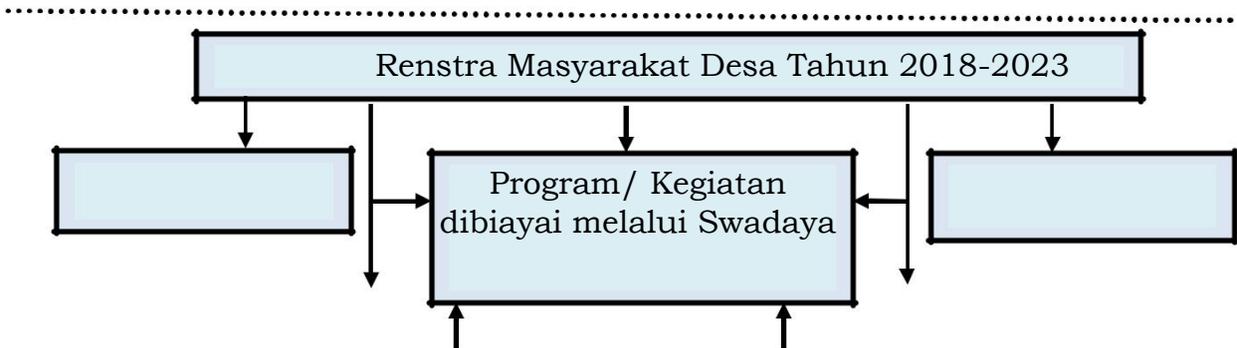
Renstra SKPD Kab.bandung Barat Tahun 2018-2023

Renstra Masyarakat Desa Tahun 2018-2023

Rencana Kerja SKPD Bandung Barat

Rencana Tahunan Pronangkis

1. Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan ADD
2. Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan DD
3. Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Swadaya Masyarakat
4. Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh CSR / NGO / sumber lainnya



Sinergi Penanggulangan Kemiskinan :
Pengurangan Beban Masyarakat, Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Program/ Kegiatan dibiayai oleh Pusat / Provinsi Jabar

Program/ Kegiatan dibiayai oleh CSR/NGO/ Sumber lainnya

Gambar 2: Perencanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan

2. Tahap Pelaksanaan

a. Peran dan Fungsi TKPKD Kabupaten Bandung Barat

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan sesuai dengan Bab I Pasal 1, ayat (5) maka di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat kabupaten yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten. Pembentukan TKPKD tingkat kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
4. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
5. pengendalian evaluasi pelaksana program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
6. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
7. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

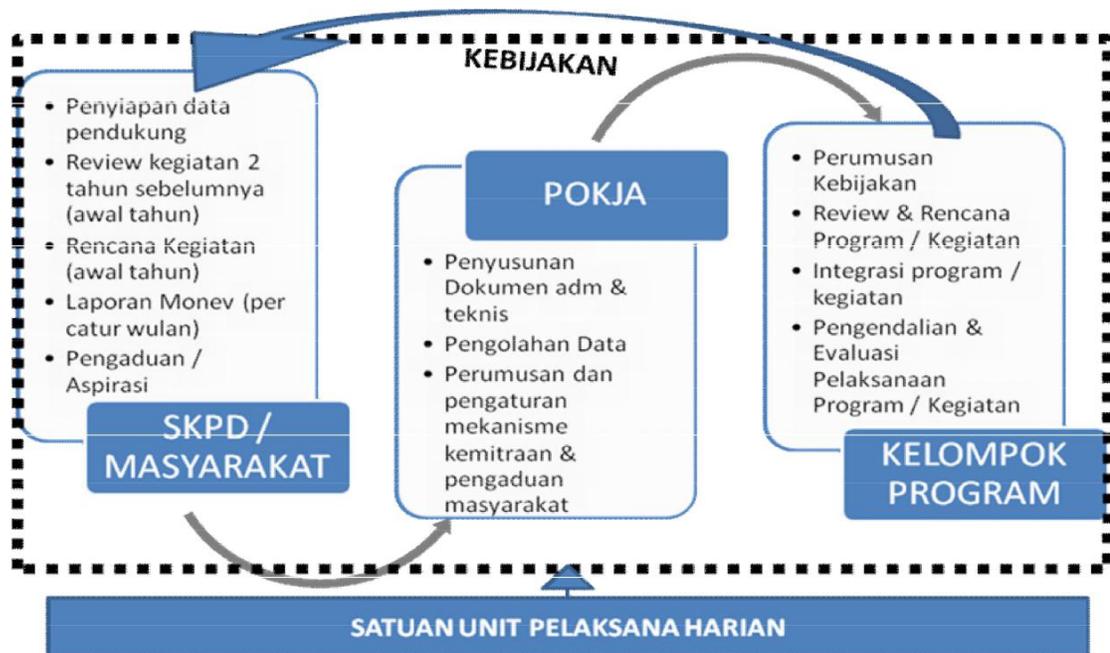
Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibantu oleh kelompok program yang terdiri dari: (i) Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (ii) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (iii) Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kelompok Program bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta memberikan masukan dan pertimbangan bagi Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Program dibantu oleh Sekretariat. Peran dan tugas sekretariat ini adalah membantu dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pencapaian tujuan, dan memberikan masukan penyempurnaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta melakukan koordinasi pemberian informasi, diseminasi, dan penanganan pengaduan

masyarakat. Untuk menjalankan fungsi sekretariat yang baik, sekretaris akan dibantu oleh:

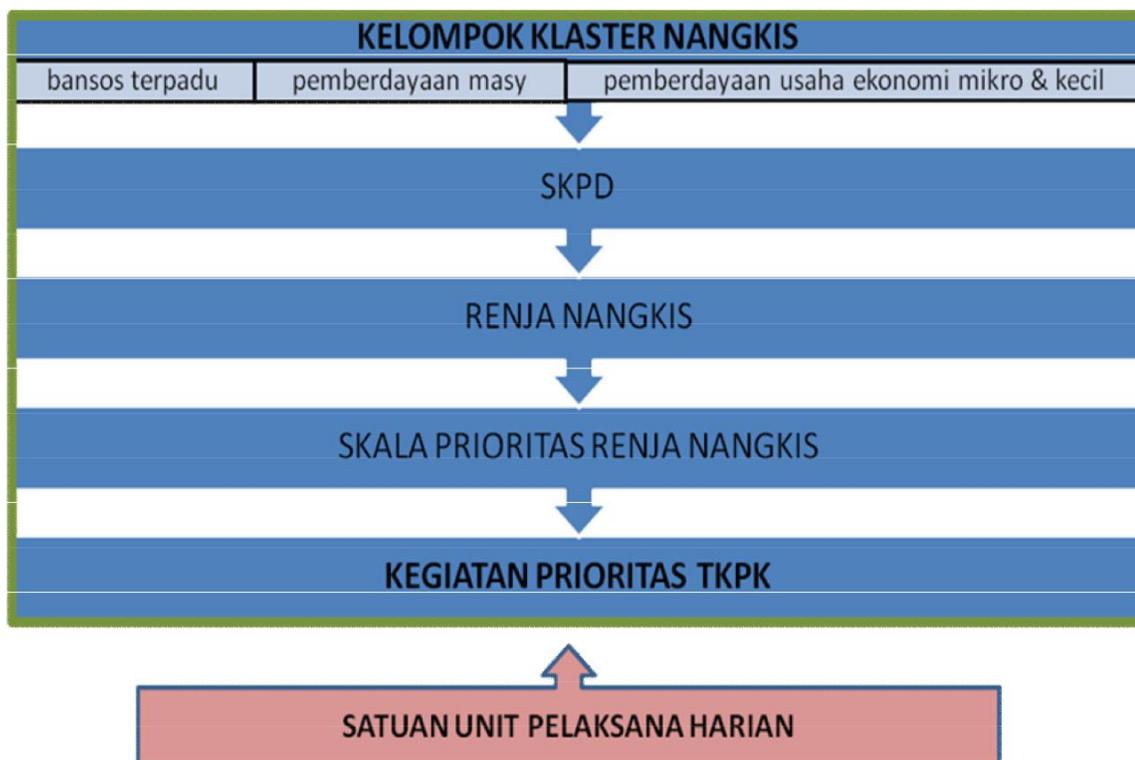
- (i) Pokja Pendataan dan Sistem informasi;
- (ii) Pokja Pengembangan Kemitraan;
- (iii) Pokja Pengaduan Masyarakat; dan
- (iv) Sekretariat dalam hal ini akan dibantu satuan unit pelaksana harian.



Gambar 3: Mekanisme Kerja TKPK



Gambar 4: Pembagian Peran Kelompok Program dan Kelompok Kerja pada TKPK



Gambar 5: Pelaksanaan Alur Kerja TKPK

- b. Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan
Pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Sinergitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergitas semua komponen pilar governance, yaitu: (i) pemerintah, (ii) pelaku usaha/bisnis, dan (iii) masyarakat sipil. Pembagian peran antar pelaku untuk strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 25: Sinergitas Antar Pelaku Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Aktor/ Pelaku	Peran	Langkah Aksi
(1)	(2)	(3)
Pemerintah KBB	<p>Menyediakan</p> <p>1) kebijakan</p> <p>dan regulasi yang menghargai dan melindungi hak-hak penduduk miskin;</p> <p>Meningkatkan</p> <p>2) pelayanan publik yang murah, cepat</p>	<p>1) Bersama DPRD memprioritaskan anggaran dan sumberdaya guna mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan, melalui produk regulasi maupun</p> <p>produk pelayanan publik</p> <p>2) Pembaruan data kemiskinan yang</p>

	<p>dan bermutu; Melakukan fasilitasi</p> <p>3) dan mediasi; mendorong pelaku pembangunan lain untuk menjadi pelaku aktif dalam</p>	<p>valid dan akurat</p> <p>3) Menjamin prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan langsung tercakup dalam RKPD dan Renja</p> <p>4) Mengoptimalkan fungsi Komite</p>
	<p>penanggulangan kemiskinan</p>	<p>Penanggulangan Kemiskinan Daerah</p> <p>5) Mengembangkan indikator kinerja dan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan, terutama di bidang prioritas penanggulangan kemiskinan, yaitu: kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan perumahan/permukiman/prasarana dasar.</p>
<p>Pelaku Usaha Swasta</p>	<p>1) Pelaku kegiatan investasi, produksi dan distribusi barang dan jasa yang memberikan dampak pada penduduk miskin.</p> <p>2) Penyediaan modal dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, penyumbang penerimaan pajak dan pengembangan</p>	<p>1) Menyediakan akses lapangan kerja dan usaha pada penduduk miskin melalui kemitraan usaha dan keterkaitan usaha.</p> <p>2) Memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah melalui dana perbankan, bantuan teknis dan pendampingan usaha mikro.</p> <p>3) Memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan</p>

	<p>fasilitas.</p> <p>3) Bertanggungjawab untuk</p> <p>tidak abai dampak negatif usahanya seperti</p> <p>kerusakan lahan, pencemaran air, udara,</p> <p>tanah, dan sungai</p>	<p>dalam perekrutan pegawai dan</p> <p>pengembangan usaha.</p> <p>4) Meningkatkan pertanggungjawaban</p> <p>sosial dalam berbagai bentuk (beasiswa, pengembangan masyarakat, dukungan kepada lembaga pendidikan dan penelitian)</p>
Lembaga Swadaya	Melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol	1) Melakukan pendampingan dan advokasi bagi kelompok miskin,
Masyarakat, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi	<p>sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>kaum perempuan, anak-anak, kelompok marjinal lainnya untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan mereka.</p> <p>Melakukan kontrol sosial</p> <p>2) terhadap kinerja dan mutu layanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha.</p> <p>3) Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan anggaran yang berpihak pada kelompok miskin.</p> <p>4) Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelebagaan forum warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah</p>

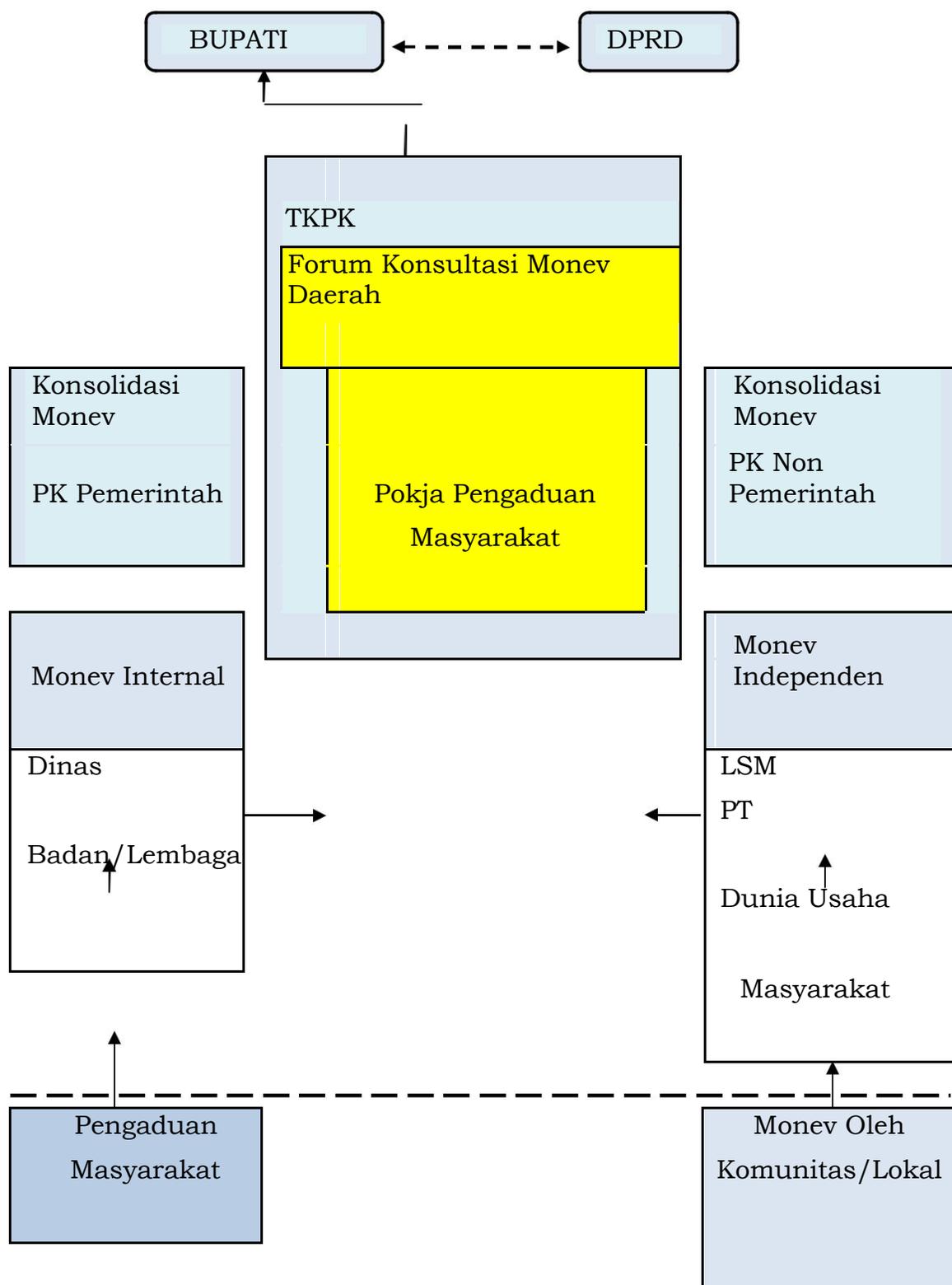
		partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan berpihak pada kelompok miskin.
Forum stakeholder Desa terdiri dari LPMD, organisasi kemasyarakatan di tingkat desa yang fokus pada penanganan kemiskinan, dan Penduduk Miskin Tingkat Desa	1) Identifikasi permasalahan kemiskinan di lingkungannya Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan 2) Menerima pengaduan masyarakat atas program-program penanggulangan kemiskinan	Terlibat aktif dalam proses 1) Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP); Terlibat dalam proses 2) penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan tingkat desa

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mekanisme monitoring dan evaluasi di tingkat daerah terdiri atas 4 (empat) langkah, yaitu: (i) Pengumpulan dan analisis data, (ii) Evaluasi dan pelaporan, (iii) Desiminasi, dan (iv) Pemanfaatan hasil dan tindak lanjut.

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilandasi oleh prinsip sinergis dan integratif. Artinya, kerja sama diantara para pelaku dan diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang rutin, menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem monev RPJM, RKPD, dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Ilustrasi mekanisme dan prosedur monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 6: Mekanisme dan Prosedur Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

B. Sinergitas Antarpelaku dalam Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Sinergitas antar pelaku dalam monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, selengkapnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 26: Sinergitas antar Pelaku dalam Monitoring Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

Unsur	Pelaksanaan	Output
(1)	(2)	(3)
Pelaku Monev	TKPKD	Memfasilitasi Forum Konsultasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
	Konsultasi Forum Monev	(1) Membahas dan mengkaji hasil-
	Daerah (forum lembaga- lembaga non pemerintah)	hasil monev yang telah dikonsolidasi oleh Pokja Monev (2) Menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke TKPKD
	Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi	Kompilasi, verifikasi, dan konsolidasi hasil-hasil monev yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah

Unsur	Pelaksanaan	Output
(1)	(2)	(3)
	Internal SKPD dan internah pemerintah daerah	Memeriksa kesesuaian implementasi kegiatan dengan rencana
	Perguruan tinggi, LSM	Memonitor dan mengkaji implementasi kegiatan pelayanan hak dasar kelompok miskin
	masyarakat penerima program penanggulangan kemiskinan	Menyampaikan “suaranya” tentang pemenuhan hak dasar warga
Waktu	Pelaksanaan monev dapat dilakukan setiap saat	Hasil monev disampaikan sebelum perencanaan tahun berikutnya dimulai
Pemanfaatan hasil monev	Hasil-hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan menjadi umpan balik dan pertimbangan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran	Perencanaan dan penganggaran daerah memiliki keberpihakan kepada penduduk miskin secara berkelanjutan.
Kebutuhan pengembangan lembaga pelaksana dan sistem monev	Akurasi dan validasi Ketersediaan data jumlah orang miskin	(1) Kerja sama dengan berbagai lembaga untuk openyediaan data (2) Updating instrumen penggalan data dan indikator yang digunakan (3) Updating data supaya

	akurat dan valid dan pilah gender
Aksesibilitas Penyajian data kondisi kemiskinan	Menyebarkan hasil evaluasi kondisi pemenuhan hak dasar kelompok miskin
Pemanfaatan data	Menindaklanjuti hasil monev dalam perencanaan program kegiatan tahun berikutnya

BAB V

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PERAN PARA PIHAK

- 5.1. Tujuan koordinasi adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui sinkronisasi, penyerasian, dan pemaduan antara berbagai kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan. Penguatan koordinasi dilakukan di setiap tingkatan administrasi mulai tingkat kabupaten sampai desa, dengan peran dan fungsi yang spesifik.
- 5.2. Di tingkat kabupaten peran koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Fungsi koordinasi diantaranya diharapkan bias menciptakan lingkungan kebijakan daerah yang mendukung kebijakan percepatan penurunan angka kemiskinan daerah. Fungsi koordinasi ditingkat kabupaten diharapkan memastikan dipenuhinya sumber daya untuk intervensi dalam proses perencanaan, penganggaran dan implementasinya. Di tingkat kabupaten dilakukan pula pemantauan melalui pertemuan pada rapat-rapat koordinasi pada level Top Pimpinan Perangkat Daerah (PD), Middle Pimpinan (para kepala bidang) dan para kepala seksi.
- 5.3. Di tingkat kecamatan, koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di pimpin oleh camat. Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa dan masyarakat untuk membahas kemajuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan, membantu proses perencanaan dan penyelenggaraan berbasis data, melakukan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan di tingkat desa.
- 5.4. Di tingkat desa, kepala desa menjadi penanggung jawab kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat desa, diawali dengan memastikan tersedianya data sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan, antara lain data keluarga dan individu miskin berdasarkan BDT. Kepala Desa bertanggung jawab untuk memasyikan tersedianya kader yang berfungsi sebagai kader pembangunan manusia untuk memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
- 5.5. Dunia Usaha, berperan dalam pengembangan pelaksanaan program pro poor-pro job-pro growth, berupa implementasi TJSL, CSR dan Comdev.
- 5.6. Organisasi Masyarakat Sipil, melakukan advokasi, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dukungan teknis dan finansial kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas serta manajemen kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
- 5.7. Universitas, Akademisi dan Organisasi Profesi, memberikan masukan dalam pengembangan dan perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Akademisi dan Organisasi Profesi dapat memberikan masukan berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah seputar penanggulangan kemiskinan sehingga intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah senantiasa berbasis bukti dan sesuai dengan konteks di daerah.

- 5.8. Media, melakukan advokasi, sosialisasi, kampanye, dan komunikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan ditingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa.
- 5.9. Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, adanya peningkatan peran swasta dan peran masyarakat dilandasi tujuan untuk menggalang dukungan para pihak. Strategi peningkatan peran swasta, masyarakat, akademisi dan media massa adalah sebagai berikut:
- 1) meningkatkan pemahaman dan komitmen dunia usaha tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) menyusun pemetaan kebutuhan intervensi prioritas penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan sumber daya; dan
 - 3) melibatkan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya di dalam proses penilaian dan diagnosis permasalahan kemiskinan serta dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan riset.

BAB VI

PENUTUP

RAD Penanggulangan Kemiskinan ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga bisa lebih tepat dalam mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, mengidentifikasi prioritas wilayah dan mengidentifikasi prioritas penerima manfaat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

RINCIAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. DINAS KOPRASI DAN UMKM																	4,906,304,597		
Meningkatkan Pertumbuhan Dunia Usaha Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Dunia Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Dibina, Persentase Usaha Mikro yang Berkembang, Jumlah WUB	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif																
			SOSIALISASI KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH	jumlah peserta yang memahami tentang Kebijakan yang berhubungan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah, DAN Meningkatkan kesadaran hukum para pelaku UMKM		80 Peserta	73,347,800	90 Peserta	100,000,000	100 Peserta	120,000,000	110 Peserta	150,000,000	120 Peserta	175,000,000	500 Peserta	618,347,800	DiskopUMK	
			FASILITASI KEMUDAHAN FORMALISASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Terlaksananya Fasilitas PIRT dan halal untuk Usaha Mikro, DAN Pelaku Usaha Mikro KBB mendapatkan fasilitas Ijin PIRT dan halal sehingga mereka mendapatkan legalitas dalam berproduksi		25 Peserta Legalitas PIRT dan 15 peserta sertifikat HALAL, dan Gaji Non PNS KBB 6 bulan	270,569,300	30 Peserta Legalitas PIRT dan 20 peserta sertifikat HALAL dan Gaji Non PNS KBB 6 bulan	297,626,230	35 Peserta Legalitas PIRT dan 25 peserta sertifikat HALAL dan Gaji Non PNS KBB 6 bulan	327,388,853	40 Peserta Legalitas PIRT dan 30 peserta sertifikat HALAL dan Gaji Non PNS KBB 6 bulan	360,127,738	45 Peserta Legalitas PIRT dan 35 peserta sertifikat HALAL dan Gaji Non PNS KBB 6 bulan	396,140,512	185 Peserta dan 125 Koperasi Baru dan Gaji Non PNS KBB 30 bulan	1,651,852,633	DiskopUMK	
			PERENCANAAN KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, DAN tervalidasinya data Pelaku UMKM KBB, Adanya Kajian pengembangan UMKM, Pendampingan Usaha Mikro		1 KEGIATAN (KAJIAN, PENDATAAN, PENDAMPINGAN USAHA MIKRO)	69,966,748	1 KEGIATAN (KAJIAN, PENDATAAN, PENDAMPINGAN USAHA MIKRO)	83,960,098	1 KEGIATAN (KAJIAN, PENDATAAN, PENDAMPINGAN USAHA MIKRO)	100,752,117	1 KEGIATAN (KAJIAN, PENDATAAN, PENDAMPINGAN USAHA MIKRO)	120,902,541	5 KEGIATAN (KAJIAN, PENDATAAN, PENDAMPINGAN USAHA MIKRO)	145,083,049	520,664,552	DiskopUMK		
			PENGEMBANGAN JARINGAN INFRASTRUKTUR USAHA KECIL DAN MENENGAH	berkembangnya Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah, DAN Meningkatnya jaringan gerai di Kecamatan		GERAI DI 5 KECAMATAN dan Gaji Non PNS KBB 2 bulan	101,807,500	GERAI DI 5 KECAMATAN dan Gaji Non PNS KBB 2 bulan	122,169,000	GERAI DI 6 KECAMATAN dan Gaji Non PNS KBB 2 bulan	146,602,800	GERAI DI 7 KECAMATAN dan Gaji Non PNS KBB 2 bulan	175,923,360	GERAI DI 9 KECAMATAN dan Gaji Non PNS KBB 2 bulan	211,108,032	16 GERAJ DI 16 KECAMATAN dan Gaji Non PNS KBB 10 bulan	757,610,692	DiskopUMK	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT PERKOPERASIAN	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pengurus dan pengawas koperasi yang meningkatkan daya saing usaha koperasi		60 Peserta	40,951,000	60 Peserta	49,141,200	60 Peserta	58,969,440	60 Peserta	70,763,328	60 Peserta	84,915,994	300 Peserta	304,740,962	DiskopUKM
			SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengurus, pengawas dan anggota koperasi terhadap peraturan perkoperasian bagi koperasi baru		60 Peserta dan 10 Koperasi Baru	276,935,000	60 Peserta dan 10 Koperasi Baru	332,322,000	60 Peserta dan 10 Koperasi Baru	398,786,400	60 Peserta dan 10 Koperasi Baru	478,543,680	60 Peserta dan 10 Koperasi Baru	574,252,416	300 Peserta dan 50 Koperasi Baru	2,060,839,496	DiskopUKM
			PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	jumlah koperasi sehat menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang profesional dan terpercaya		180 Koperasi	189,746,000	180 Koperasi	227,695,200	180 Koperasi	273,234,240	180 Koperasi	327,881,088	180 Koperasi	393,457,306	900 Peserta	1,412,013,834	DiskopUKM
			PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		180 Koperasi	116,054,000	180 Koperasi	139,264,800	180 Koperasi	167,117,760	180 Koperasi	200,541,312	180 Koperasi	240,649,574	900 Peserta	863,627,446	DiskopUKM
			RINTISAN PENERAPAN TEKNOLOGI SEDERHANA MANAJEMEN MODERN PADA JENIS USAHA KOPERASI	Terciptanya tata kelola usaha Koperasi berbasis teknologi		70 Koperasi	72,868,000	70 Koperasi	87,441,600	70 Koperasi	104,929,920	70 Koperasi	125,915,904	70 Koperasi	151,099,085	350 Peserta	542,254,509	DiskopUKM
2. DINAS SOSIAL																		
			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional		TKSK Kab. Bandung Barat	200000000	60 Orang	227375811.9	60 Orang	1027375812	Bidang Sosial						
Mewujudkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan			Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS		30 anggaran dan 59 TKSK	450000000	30 PSM & 59 TKSK	500000000	30 PSM & 59 TKSK	500000000	30 PSM & 59 TKSK	522022613	30 PSM & 59 TKSK	522022613	30 PSM & 59 TKSK	2494045226	Bidang Sosial
			Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat diklat dan bantuan		1 Lembaga	50000000	30 Lembaga	50000000	30 Lembaga	50000000	30 Lembaga	50000000	30 Lembaga	50000000	30 Lembaga	250000000	Bidang Sosial
			Pendidikan dan pelatihan assesment pengelolaan LK3	Jumlah pengolah LK3 yang Pendidikan dan pelatihan assesment		40 orang	150000000	40 orang	150000000	40 orang	150000000	40 orang	150000000	40 orang	150000000	40 orang	750000000	Bidang Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) tingkat nasional	Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi antar Aparat Pemerintah dalam Peringatan HKSN dan Hari Pahlawan		1 Kegiatan	200000000	2 Kegiatan	196500000	2 Kegiatan	986000000	Bidang Sosial						
			Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP untuk Meningkatkan Usahanya		20 Kelompok	100000000	20 Kel/kegiatan taruna	100000000	20 Kel/kegiatan taruna	100000000	20 Kel/kegiatan taruna	100000000	20 Kel/kegiatan taruna	100000000	20 Kel/kegiatan taruna	500000000	Bidang Sosial
			Pemberian bantuan jaminan sosial melalui lembaga Askesos	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat bantuan pengelolaan askesos		-	-	1 Lembaga	90990000	1 Lembaga	272970000	Bidang Sosial						
			Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas Lembaga RTPC yang dibina		16 Petugas RTPC	200000000	20 orang pengelola RTPC	200000000	20 orang pengelola RTPC	200000000	20 orang pengelola RTPC	200000000	20 orang pengelola RTPC	200000000	20 orang pengelola RTPC	1000000000	Bidang Sosial
	a. Meningkatkan ya kesempatan kerja	a. Angka partisipasi angkatan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Cakupan pelayanan ketenagakerjaan	10	20	1125000000	30	1137375000	40	1205617500	50	1222134460	60	1242666319	60	5932793278	
	b. Meningkatkan ya perlindungan ketenagakerjaan	b. Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja	Tersedianya penyusunan Informasi Bursa kerja		1 Kegiatan	225000000	1 Kegiatan	137375000	1 Kegiatan	157981250	1 Kegiatan	34705544.5	1 Kegiatan	39911376.18	1 Kegiatan	594973170.7	Bidang Tenaga Kerja
3. DINAS PENDIDIKAN																		
Meningkatkan Layanan Pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI							1,088,850,000		1,140,000,000		1,194,000,000		1,253,600,000			
			Pembangunan gedung sekolah (PAUD)	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	5 lembaga	1 lembaga	91,000,000.00	1	53,550,000	1	56,000,000	1	58,000,000	1	60,900,000			Disdik
			Penambahan ruang kelas sekolah	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	20 lembaga	4 lembaga	160,000,000.00	4	367,500,000	4	385,000,000	4	404,000,000	4	424,200,000			Disdik
			Pembangunan sarana dan prasarana bermain PAUD	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	100 lembaga	20 lembaga	34,000,000.00	20	35,700,000	20	37,000,000	20	38,000,000	20	39,900,000			Disdik
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	100 lembaga	20 lembaga	76,500,000.00	19	80,325,000	19	84,000,000	19	88,000,000	19	92,400,000			Disdik
			Pengadaan meubelair sekolah	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	50 lembaga	10 lembaga		10	105,000,000	10	110,000,000	10	115,000,000	10	120,700,000			Disdik
			Pengadaan perlengkapan sekolah (PAUD)	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	205 paket	41 paket	165,500,000.00	41	173,775,000	41	182,000,000	41	191,000,000	41	200,500,000			Disdik
			Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	150 kegiatan	30 kegiatan	160,000,000.00	30	273,000,000	30	286,000,000	30	300,000,000	30	315,000,000			Disdik
			PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN						37,496,130,500		39,208,300,000		41,010,300,000		42,903,500,000			
			Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS)	719 ruang	35 ruang	1,000,000,000.00	35	2,075,850,000	35	2,179,000,000	35	2,287,000,000	35	2,401,300,000			Disdik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SD/MI	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	30 unit	6 unit		6	189,000,000	6	198,000,000	6	207,000,000	6	217,300,000			Disdik
			Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir SD/MI	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	300 sekolah	60 sekolah		60	2,129,253,000	60	2,235,000,000	60	2,346,000,000	60	2,463,300,000			Disdik
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/MI	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	145 sekolah	29 sekolah	500,000,000.00	29	441,000,000	29	463,000,000	29	486,000,000	29	510,300,000			Disdik
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	Meningkatnya Angka Kelulusan	40 paket	20 paket		5	494,000,000	5	503,000,000	5	514,000,000	5	524,000,000			Disdik
			Pengadaan mebeluer SD/MI sesuai dengan SPM SD/MI	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	10 unit	2 unit	220,000,000.00	2	214,725,000	2	225,000,000	2	236,000,000	2	247,800,000			Disdik
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Meningkatnya Jumlah Bangunan Kelas Kondisi Baik	3399 ruang	15 ruang		15	512,925,000	15	538,000,000	15	564,000,000	15	592,200,000			Disdik
			Pembinaan SMP terbuka	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)	5 lembaga	1 lembaga	120,250,000.00	1	21,262,500	1	22,000,000	1	23,000,000	1	24,100,000			Disdik
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	5 siswa	1 siswa		1	2,625,000,000	1	2,756,000,000	1	2,893,000,000	1	3,037,600,000			Disdik
			Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS)	5 kegiatan	1 kegiatan	900,488,000.00	1	7,287,000,000	1	7,651,000,000	1	8,033,000,000	1	8,434,600,000			Disdik
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS)	5 kegiatan	1 kegiatan	703,750,000.00	1	443,100,000	1	465,000,000	1	488,000,000	1	512,400,000			Disdik
			Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS)	10 kegiatan	2 kegiatan	1,000,000,000.00	2	1,365,000,000	2	1,433,000,000	2	1,504,000,000	2	1,579,200,000			Disdik
			Monitoring evaluasi dan pelaporan SD/MI	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan	5 keg	1 keg		1	368,550,000	1	386,000,000	1	405,000,000	1	425,200,000			Disdik
			Pengadaan Tanah SD/MI	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	5 lokasi	1 lokasi		1	2,362,500,000	1	2,480,000,000	1	2,604,000,000	1	2,734,200,000			Disdik
			Penambahan ruang kelas sekolah SMP/MTs	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah (RLS)	190 ruang	15 ruang	910,000,000.00	15	1,748,565,000	15	1,835,000,000	15	1,926,000,000	15	2,022,300,000			Disdik
			Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	75 sekolah	15 sekolah	535,000,000.00	15	1,665,300,000	15	1,665,300,000	15	1,665,300,000	15	1,665,300,000			Disdik
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	55 unit	11 unit		11	256,000,000	11	256,000,000	11	256,000,000	11	256,000,000			Disdik
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	40 set	20 set	100,000,000.00	5	494,000,000	5	503,000,000	5	514,000,000	5	524,000,000			Disdik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP/MTs	Meningkatnya Jumlah Bangunan Kelas Kondisi Baik	1323 ruang	5 ruang	200,000,000.00	5	164,000,000	5	167,000,000	5	171,000,000	5	174,000,000			Disdik
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)	5 kegiatan	1 kegiatan	340,000,000.00	1	142,000,000	1	144,000,000	1	148,000,000	1	150,000,000			Disdik
			Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)	5 keg	1 keg	1,000,000,000.00	1	451,000,000.00	1	459,000,000.00	1	469,000,000.00	1	478,000,000.00			Disdik
			Monitoring evaluasi dan pelaporan SMP/MTs	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan	5 keg	1 keg	350,000,000.00	1	116,000,000	1	119,000,000	1	121,000,000	1	123,000,000			Disdik
			Pengadaan Tanah SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)	70 lokasi	14 lokasi		14	2,018,100,000	14	2,119,000,000	14	2,224,000,000	14	2,335,200,000			Disdik
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	5 keg	1	2,750,000,000	1	2,625,000,000	1	2,756,000,000	1	2,893,000,000	1	3,037,600,000			Disdik
			Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)	6 keg	1		1	7,287,000,000	1	7,651,000,000	1	8,033,000,000	1	8,434,600,000			Disdik
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD)	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	5 keg	1 keg	250,000,000.00											Disdik
			PENDIDIKAN NON FORMAL						3,313,275,000		3,475,000,000		3,643,000,000		3,825,000,000			
			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Meningkatkan mutu PTK non formal	150 peserta	30 peserta		30	91,875,000	30	96,000,000	30	100,000,000	30	105,000,000			Disdik
			Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (PAUD)	Peserta didik memiliki kesiapan dan kecakapan mental, sosial untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar	100 lembaga	20 lembaga		20	105,000,000	20	110,000,000	20	115,000,000	20	120,700,000			Disdik
			Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	265 peserta	53 peserta	415,892,000.00	53	483,000,000	53	507,000,000	53	532,000,000	53	558,600,000			Disdik
			Pengembangan pendidikan keaksaraan	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	750 peserta	150 peserta		#REF!	714,000,000	#REF!	749,000,000	#REF!	786,000,000	150	825,300,000			Disdik
			Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	ingkatan kualitas SDM masyarakat	20 lembaga	4 lembaga		4	239,400,000	4	251,000,000	4	263,000,000	4	276,100,000			Disdik
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terfasilitasinya kebutuhan UNBK pendidikan kesetaraan	25 lembaga	5 lembaga		5	525,000,000	5	551,000,000	5	578,000,000	5	606,900,000			Disdik
			Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	Meningkatnya kompetensi PTK non formal	16 kecamatan	16 kecamatan			315,000,000		330,000,000		346,000,000		363,300,000			Disdik
			Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kab Bandung Barat	15 keg	3 keg	212,156,800.00	3	223,125,000	3	234,000,000	3	245,000,000	3	257,200,000			Disdik

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
T.3 Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar lainnya	S.5 Terwujudnya ketahanan pangan	Penguatan cadangan Pangan		Tersusunnya Dokumen Food Security and Vornability Atlas (FSVA)		1 paket	50,000,000											DISTAN PANGAN		
				Paket Sembako		300 paket	200,000,000	400 paket		400 paket		400 paket		400 paket		400 paket			DISTAN PANGAN	
				Bintek DEMAPAN		1 kali	50,000,000													DISTAN PANGAN
				Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi di Desa Mandiri Pangan di Wilayah KBB		10 desa	100,000,000													DISTAN PANGAN
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan			405,575,000			614,068,000				687,756,160			770,286,899		862,721,327	DISTAN PANGAN
				vertikultur		13 kelompok	130,000,000	20 Kelompok			25 Kelompok				30 Kelompok		35 Kelompok			DISTAN PANGAN
				vacum frying Untuk 5 KWT		7 unit	140,000,000													DISTAN PANGAN
				Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok		laporan Pemantauan harga-harga pangan pokok di wilayah Kabupaten Bandung Barat		1 tahun	214,600,000	1 tahun	239,680,000	1 tahun	268,441,600	1 tahun	300,654,592	1 tahun	336,733,143			DISTAN PANGAN
				Pengembangan Cadangan Pangan Daerah			762,225,600				572,572,672				641,281,393		718,235,160		804,423,379	DISTAN PANGAN
				moisture tester untuk PUPM (pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)		14 unit	7,000,000													DISTAN PANGAN
				Terlaksananya Sosialisasi dan Pemantauan Ketersediaan Cadangan Pangan di Wilayah KBB		1 kali	50,000,000	1 kali				1 kali			1 kali		1 kali			DISTAN PANGAN
				bintek lumbung		1 kali	50,000,000													DISTAN PANGAN
				Lumbung Pangan Desa di wilayah KBB		5 kelompok	250,000,000													DISTAN PANGAN
				Peyusunan Perda CPPD		1 dokumen	-													DISTAN PANGAN
				Beras CPPD		20 Ton				51 ton			51 ton							
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan yang dikonsumsi Masyarakat KBB			224,225,000			317,940,000			356,092,800		398,823,936		446,682,808	DISTAN PANGAN
				bintek keamanan pangan		50 orang	50,000,000	50 orang				50 orang			50 orang		50 orang			DISTAN PANGAN
				Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif			864,580,000				1,003,878,400			1,124,343,808		1,259,265,065		1,410,376,873		DISTAN PANGAN
				study banding MP3L (Model Pengembangan Pnagn Lokal)		1 paket	75,000,000													DISTAN PANGAN
				Bintek Pangan alternatif		1 kali	50,000,000	1 kali				1 kali			1 kali		1 kali			DISTAN PANGAN
	Gerakan Pangan Lokal (non-Beras non-Terigu)		100 paket	45,000,000	100 paket				100 paket			100 paket		100 paket			DISTAN PANGAN			
	Pengembangan Diversifikasi Pangan							320,000,000			358,400,000		401,408,000		449,576,960		DISTAN PANGAN			
	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat		Bantuan Kelompok LDPM					5 kelompok	350,000,000	5 kelompok	392,000,000	5 kelompok	439,040,000	kelompe	491,724,800		DISTAN PANGAN			
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa		Bantuan Kelompok Lumbung					4 kelompok	300,000,000	4 kelompok	336,000,000	4 kelompok	376,320,000	kelompe	421,478,400		DISTAN PANGAN			
	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat		bantuan Kelompok PUPM					1 kelompok	285,000,000	1 kelompok	319,200,000	1 kelompok	357,504,000	kelompe	400,404,480		DISTAN PANGAN			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan penangkar benih tanaman hortikultura	1 paket		482,524,900												DISTAN PANGAN
				Pembangunan lab mini kultur jaringan	1 paket														DISTAN PANGAN
			Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan																DISTAN PANGAN
			Pengembangan agribisnis hortikultura (pengembangan kluster)		1 kluster		1,879,150,000												DISTAN PANGAN
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan																DISTAN PANGAN
				Jumlah penyediaan benih/bibit tanaman pangan (padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, serelia)	1 paket		433,492,100												DISTAN PANGAN
				Jumlah penyediaan bahan, pupuk organik dan pestisida nabati tanaman pangan	1 paket														DISTAN PANGAN
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian hortikultura																DISTAN PANGAN
				Jumlah penyediaan bibit / benih tanaman hortikultura (sayuran, floritikultura, fruitikultura, biofarmaka)	1 paket		398,245,000												DISTAN PANGAN
				Jumlah penyediaan bahan, pupuk organik dan pestisida nabati hortikultura	1 paket														DISTAN PANGAN
			Pengembangan bibit unggul tanaman pangan																DISTAN PANGAN
				Pembangunan persemaian / pembenihan tanaman pangan															DISTAN PANGAN
				Pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan penangkar benih tanaman pangan															DISTAN PANGAN
				Penyusunan & penerapan standar teknis perbenihan (SOP Pembenihan), penyebarluasan informasi perbenihan / pembibitan tanaman pangan															DISTAN PANGAN
Prgram dan kegiatan baru																			
			Program peningkatan produksi Tanaman Pangan																DISTAN PANGAN
			Penyediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan	bantuan sarana Produksi tanaman pangan (benih, pupuk, pertisida)				8 Kelompok	465,000,000	8 Kelompok	520,800,000	8 Kelompok	583,296,000	Kelomp	653,291,520				DISTAN PANGAN
			Pengadaan bibit/ benih berkualitas tanaman pangan	Bantuan Benih unggul tanaman Pangan				8 Kelompok	475,000,000	8 Kelompok	532,000,000	8 Kelompok	595,840,000	Kelomp	667,340,800				DISTAN PANGAN
			Pencegahan dan Pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan	SL- Pengendalian Hama Terpadu				3 Kelompok	425,000,000	3 Kelompok	476,000,000	3 Kelompok	533,120,000	Kelomp	597,094,400				DISTAN PANGAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian tanaman pangan	Pengadaan Infrastruktur Tanaman Pangan (JUT, JIDES, Embung, DII) dan Alsintan					1,760,000,000		1,971,200,000		2,207,744,000		2,472,673,280			DISTAN PANGAN
			Pengembangan perbenihan tanaman pangan (UPTD)	Kelompok Pengankar benih tanaman Pangan				2 Kelompok	525,000,000	2 Kelompok	588,000,000	2 Kelompok	658,560,000	Kelomp	737,587,200			DISTAN PANGAN
			Program peningkatan kualitas produk tanaman pangan															DISTAN PANGAN
			Penanganan pasca panen Tanaman Pangan	Pengadaan Power Therser, terpal, Lantan Jemur, gudang					520,000,000		582,400,000		652,288,000		730,562,560			DISTAN PANGAN
			pengolahan pasca panen tanaman pangan	RMU, alat Kemas					650,000,000		728,000,000		815,360,000		913,203,200			DISTAN PANGAN
			Program peningkatan produksi tanaman Hortikultura															DISTAN PANGAN
			Penyediaan sarana produksi pertanian Hortikultura	bantuan sarana Produksi Hortikultura (benih, pupuk, pertisida)				8 Kelompok	465,000,000	8 Kelompok	520,800,000	8 Kelompok	583,296,000	Kelomp	653,291,520			DISTAN PANGAN
			Pengadaan bibit/ benih berkualitas Hortikultura	Bantuan Benih unggul Hortikultura				8 Kelompok	475,000,000	8 Kelompok	532,000,000	8 Kelompok	595,840,000	Kelomp	667,340,800			DISTAN PANGAN
			Pencegahan dan Pengendalian organisme pengganggu Hortikultura	SL- Pengendalian Hama Terpadu				3 Kelompok	425,000,000	3 Kelompok	476,000,000	3 Kelompok	533,120,000	Kelomp	597,094,400			DISTAN PANGAN
			Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian Hortikultura	Pengadaan Infrastruktur Hortikultura (JUT, JIDES, Embung, DII) dan Alsintan					1,760,000,000		1,971,200,000		2,207,744,000		2,472,673,280			DISTAN PANGAN
			Pengembangan perbenihan Hortikultura (UPTD)	Kelompok Pengankar benih Hortikultura				2 Kelompok	525,000,000	2 Kelompok	588,000,000	2 Kelompok	658,560,000	Kelomp	737,587,200			DISTAN PANGAN
			Program peningkatan kualitas produk Hortikultura															
			Penanganan pasca panen hortikultura						520,000,000		582,400,000		652,288,000		730,562,560			
			pengolahan Pasca panen hortikultura	alat kemas					650,000,000		728,000,000		815,360,000		913,203,200			
			Program peningkatan kualitas produk Perkebunan															DISTAN PANGAN
			Penyediaan sarana produksi pertanian Perkebunan	bantuan sarana Produksi Perkebunan (benih, pupuk, pertisida)				8 Kelompok	465,000,000	8 Kelompok	520,800,000	8 Kelompok	583,296,000	Kelomp	653,291,520			DISTAN PANGAN
			Pengadaan bibit/ benih berkualitas Perkebunan	Bantuan Benih unggul Perkebunan				8 Kelompok	475,000,000	8 Kelompok	532,000,000	8 Kelompok	595,840,000	Kelomp	667,340,800			DISTAN PANGAN
			Pencegahan dan Pengendalian organisme pengganggu Perkebunan	SL- Pengendalian Hama Terpadu				3 Kelompok	425,000,000	3 Kelompok	476,000,000	3 Kelompok	533,120,000	Kelomp	597,094,400			DISTAN PANGAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Perkebunan	Pengadaan Infrastruktur Perkebunan (JUT, JIDES, Embung, Dll) dan Alsintan					625,000,000		700,000,000		784,000,000		878,080,000			DISTAN PANGAN
			Pengembangan perbenihan Perkebunan (UPTD)	Kelompok Pengakar benih Perkebunan				2 Kelompok	525,000,000	2 Kelompok	588,000,000	2 Kelompok	658,560,000	Kelompok	737,587,200			DISTAN PANGAN
			Program peningkatan kualitas produk perkebunan															DISTAN PANGAN
			Penanganan pasca panen perkebunan	lantai jem,ur, gudang					842,000,000		943,040,000		1,056,204,800		1,182,949,376			DISTAN PANGAN
			pengolahan Pasca panen Perkebunan	mesin sangrai kopi, alat kemas					1,150,000,000		1,288,000,000		1,442,560,000		1,615,667,200			DISTAN PANGAN
			Program pembangunan agropolitan															DISTAN PANGAN
			Pengembangan agribisnis Tanaman Pangan (Kluster)	bantuan sarana produksi, infrastruktur, alsintan tanaman pangan				1 gapoktan	1,800,000,000	1 gapoktan	2,016,000,000	1 gapoktan	2,257,920,000	1 gapoktan	2,528,870,400			DISTAN PANGAN
			Pengembangan agribisnis tanaman hortikultura (Kluster)	bantuan sarana produksi, infrastruktur, alsintan Hortikultura				1 gapoktan	1,500,000,000	1 gapoktan	1,680,000,000	1 gapoktan	1,881,600,000	1 gapoktan	2,107,392,000			DISTAN PANGAN
			Pengembangan agribisnis Perkebunan (Kluster)	bantuan sarana produksi, infrastruktur, alsintan perkebunan				1 gapoktan	1,700,000,000	1 gapoktan	1,904,000,000	1 gapoktan	2,132,480,000	1 gapoktan	2,388,377,600			DISTAN PANGAN
			Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau															DISTAN PANGAN
			Penanganan Panen dan Pasca Panen															DISTAN PANGAN
				Pelatihan pengolahan tembakau				50 orang			50 orang		50 orang	50 orang				DISTAN PANGAN
				sarana dan prasarana produksi					3,500,000,000		3,920,000,000		4,390,400,000		4,917,248,000			DISTAN PANGAN
				pengolahan dan pasca panen tembakau														DISTAN PANGAN
6. DP2KBP3A																		
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh	S.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	TFR	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
		IPG	Pengembangan pusat pelayanan terpadu dalam pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	1. Tersosialisasikannya p2tp2a ke masyarakat 2. Terlatihnya pengelola P2TP2A 3. Rekrutment tenaga ahli														DP2KBP3A
		IDG	Penguatan kelembagaan pengaruh utamaan gender dan anak	1. Terbentuknya forum anak daerah di 16 kecamatan 2. Terfasilitasinya kota layak anak 3. Terfasilitasinya SEKOLAH RAMAH ANAK				138,500,000										
			Evaluasi pelaksanaan PUG	1. Tersosialisasinya PUG di tatanan Stake holder se-KBB 2. Terlaksananya penerapan		Workshop		305,500,000		159,275,000		183,166,250		210,641,188		242,237,366		DP2KBP3A
								Mentor	280,515,000	Data Terpilah	200,000,000	Mentor	364,669,500	Group Di	175,000,000			DP2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan															DP2KBP3A
			Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	1. Terbinanya 500 KK binaan pra KS dan KS 1	1000 kk	100	505,550,000	100	556,105,000	100	611,715,500	100	672,887,050	100	740,175,755			DP2KBP3A
				2. Jumlah Sekolah Ibu	-	33	33											
			Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dan pengelola usaha	1. Jumlah Kelompok PEKKA	307	33	86,702,800	33	468,592,697	33	538,881,601	33	619,713,841	33	712,670,917			
				2. Terbentuknya 50 kelompok PEKKA di lokasi P2WKSS					1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok					
			Program Keluarga Berencana															DP2KBP3A
			Penyedia pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana			339,384,000	13.500 Akseptor baru	364,119,059	14.500 Akseptor Baru	400,530,965	15.500 Akseptor Baru	440,584,061	16.500 Akseptor Baru	484,642,468			DP2KBP3A
			Pelayanan KIE	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana			316,327,800	32 Gerak	379,593,360	33 Gerak	455,512,032	34 Gerak	546,614,438	35 Gerak	655,937,326			DP2KBP3A
			Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Akseptor KB				38 Kasus	81,466,000	44 Kasus	89,612,600	50 Kasus	98,573,860	56 Kasus	108,431,246			DP2KBP3A
			Promosi Pelayanan Khiba	Terwujudnya Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak yang Berkualitas				330 Ibu Bayi dan Balita	88,351,261	360 Ibu Bayi dan Balita	97,186,387	390 Ibu Bayi dan Balita	106,905,026	420 Ibu Bayi dan Balita	117,595,528			DP2KBP3A
			Pembinaan Keluarga Berencana	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana			552,720,000	84 orang	848,000,000	90 Orang	848,000,000	95 Orang	1,105,000,000	100 Orang	1,320,000,000	105 Orang	1,610,000,000	DP2KBP3A
			Peningkatan partisipasi Pria dalam KB dan KR	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana			79,306,000	250 orang	165,470,404	300	165,470,404	350	200,219,189	450	220,241,108			DP2KBP3A
			Bantuan Operasional KB (DAK)				4,480,875,000	14 kegiatan	4,928,962,500	14 kegiatan	5,421,858,750	14 kegiatan	5,964,044,625	14 kegiatan	6,560,449,088			
			Program Kesehatan				115,500,000											DP2KBP3A
			Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi masyarakat	Tercapainya Kesehatan Reproduksi Remaja				500 orang	203,500,000	550 orang	223,850,000	600 orang	246,235,000	650 orang	270,858,500			DP2KBP3A
			Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Tercapainya Kesehatan Reproduksi Remaja				90 orang	117,588,672	100 orang	129,347,539	110 orang	142,282,293	120 orang	156,510,522			DP2KBP3A
			Program Pelayanan Kontrasepsi															DP2KBP3A
			Pelayanan Konseling KB	Meningkatnya program pelayanan kontrasepsi				80 orang	88,000,000	90 orang	96,800,000	100 orang	106,480,000	110 orang	117,128,000			DP2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi			380,900,000	990 akseptor imp dan iud	82,500,000	1100 akseptor imp dan iud	90,750,000	1200 akseptor imp dan iud	99,825,000	1300 akseptor imp dan iud	109,807,500			DP2KBP3A
			Pengadaan Alat Kontrasepsi	Terwujudnya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi			72,042,000	32 orang	78,884,766	50 orang	86,773,243	65 orang	95,450,567	81 Orang	104,995,624			DP2KBP3A
			Program Peningkatan kualitas															DP2KBP3A
			Fasilitasi upaya perlindungan	Tersosialisasinya UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan)			79,250,000	165 orang	221,518,750	181 orang	254,746,563	165 orang	292,958,547	64 orang	336,902,329			DP2KBP3A
			Program Pembinaan Peran Serta															DP2KBP3A
			Pembentukan kelompok	Terwujudnya Kualitas Peran Serta Masyarakat dalam	Kampung KB		3,047,230,000	100 Kampung KB	300,000,000	120 Kampung KB	350,000,000	140 Kampung	400,000,000	165 Kampu	440,000,000			DP2KBP3A
			Pembinaan Kelompok	Terlaksananya kegiatan lomba IMP dan pembinaan Forum	3 Kegiatan		18,725,000	169 Pos KB dan 2379 Sub Pos KB	630,000,000	169 Pos KB dan 2379 Sub Pos KB	756,000,000	169 Pos KB dan 2379	831,600,000	169 Pos KB	914,760,000			DP2KBP3A
			Koordinasi Pengelolaan Program (Rakerda KB)	Penyelenggaraan Rakerda tk Kabupaten			251,150,000											DP2KBP3A
			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Kelompok UPPKS		200 orang	438,105,000	352 orang	525,726,000	384 orang	630,871,200	416 orang	693,958,320	448 orang	763,354,152			DP2KBP3A
			Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya data program KKBPK, PP dan PA		228 orang	181,750,000											DP2KBP3A
			Pengelolaan parameter kependudukan	Tersedianya data parameter kependudukan Kab. Bandung Barat		16 Sekolah Siaga kependudukan	166,500,000	32 Sekolah Siaga kependudukan	250,000,000	48 Sekolah Siaga kependudukan	275,000,000	64 Sekolah Siaga kependudukan	310,000,000	80 Sekolah Siaga kependudukan	350,000,000			DP2KBP3A
			Program Pengembangan															DP2KBP3A
			Pendirian Pusat Pelayanan informasi	Terwujudnya pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan				32 Kelompok PIK Remaja di Sekolah	240,000,000	48 Kelompok PIK Remaja di Sekolah	288,000,000	64 Kelompok	316,800,000	80 Kelomp	348,480,000			DP2KBP3A
			Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok	Terlaksananya Lomba Kelompok PIK remaja, Duta		240 orang	158,645,000	264 orang	190,374,000	288 orang	228,448,800	320 orang	251,293,680	352 orang	276,423,048			DP2KBP3A
			Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS															DP2KBP3A
			Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS di Sekolah	Jumlah Peserta Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS				320 orang	312,000,000	384 orang	374,400,000	448 orang	449,280,000	480 orang	539,136,000			
			Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan ke masyarakat				2900 siswa	71,771,383	3400 siswa	78,948,521	3900 siswa	86,843,373	4400 siswa	95,527,711			DP2KBP3A
			Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak															DP2KBP3A
			Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Terlaksananya pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				192 orang	105,444,887	224 orang	126,533,864	256 orang	139,187,251	288 orang	153,105,976			DP2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pembinaan Kelompok Pendukung ASI di Puskesmas Mukapayung	Desa Mukapayung	1 Kelompok		17,800,000.00	19,580,000											dinkes
			Pembinaan Program Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak	Desa Mukapayung	73 Posyandu x 2 orang x 100.000		14,600,000.00	16,060,000											dinkes
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat					-											dinkes
			Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat					-											dinkes
			Sosialisasi Tentang Lingkungan Sehat	Puskesmas Saguling	6 Desa Sekecamatan Saguling		15,000,000.00	16,500,000											dinkes
			Sosialisasi Tentang Lingkungan Sehat	Puskesmas Saguling	6 Desa Sekecamatan Saguling		15,000,000.00	16,500,000											dinkes
			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita					-											dinkes
			Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita				154,340,000.00	169,774,000											dinkes
			KIA Pembinaan/ Sosialisasi TB Paru, Ibu Hamil	Kecamatan Saguling	6 Desa Seecamatan Saguling (Desa Saguling, JAti,		35,000,000.00	38,500,000											dinkes
							1,045,817,561	1,150,399,317											dinkes
								-											dinkes
								550,000,000											dinkes
			Program sunatan masal				500,000,000	550,000,000											dinkes
8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP																			
MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG LEBIH BAIK MELALUI PENGENDALIAN PENCEMARAN	MENINGKATKAN PENGURANGAN SAMPAH DAN PENANGANAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase kelompok masyarakat aktif yang mengelola sampah (3R)															DLH
			Peningkatan peran serta masyarakat	Jumlah bank sampah (Unit)		0	0	5	320	5	320	5	320	5	320	20	1,280		DLH
				Jumlah rumah kompos (Unit)		0	0	5	300	5	300	5	300	5	300	20	1,200		DLH
				Monitoring aksi 3R (dok)		1	100	1	150	1	150	1	150	1	150	5	700		DLH
				Pelatihan 3R (kelompok masyarakat, kader posyandu dan P2WKSS) (Kali)		3	120	5	350	5	350	5	350	5	350	23	1,520		DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9. DISNAKERTRANS																		
		Persentase Angkatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas				2,350,500,000.50		2,585,550,000.55		2,844,105,000.61		3,128,515,500.67		1,139,402,550.73		NAKERTRANS	KBB
		Persentase Peningkatnya Kesempatan Kerja	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah angkatan kerja yang memiliki keterampilan		18 angkatan	1,729,500,000.00	18 angkatan	1,902,450,000.00	18 angkatan	2,092,695,000.00	18 angkatan	2,301,964,500.00	18 angkatan	230,196,450.00		NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Keterampilan Melalui	Jumlah pencari kerja yang terampil melalui pemagangan		140 orang (7 kegiatan)	621,000,000.50	140 orang (7 kegiatan)	683,100,000.55	140 orang (7 kegiatan)	751,410,000.61	140 orang (7 kegiatan)	826,551,000.67	140 orang (7 kegiatan)	909,206,100.73		NAKERTRANS	KBB
			Program Peningkatan				339,349,977.15		373,284,974.87		410,613,472.35		451,674,819.59		496,842,301.55		NAKERTRANS	KBB
			Penyebarluasan informasi bursa	Jumlah perusahaan yang menyebarkan informasi bursa	100 perusahaan		121,872,500.00	100 perusahaan	134,059,750.00	100 perusahaan	147,465,725.00	100 perusahaan	162,212,297.50	perusahaan	178,433,527.25		NAKERTRANS	KBB
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah calon tenaga i kerja siap pakai	asi PTKLN, 1 paket penatausa		109,083,817.15	paket penatausaha	119,992,198.87	1 paket penatausaha	131,991,418.75	ket penatausa	145,190,560.63	t penata	159,709,616.69		NAKERTRANS	KBB
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan	Jumlah calon wirausahaan yang memiliki keterampilan wira usaha	1 pkt kegiatan		108,393,660.00	1 pkt kegiatan	119,233,026.00	1 pkt kegiatan	131,156,328.60	1 pkt kegiatan	144,271,961.46	kt kegia	158,699,157.61		NAKERTRANS	KBB
			Peningkatan Kesempatan Kerja														NAKERTRANS	KBB
			kelembagaan produktivitas dan														NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya	Cikahuripan, Desa Pagerwangi, Desa Cibodas		4 desa	200,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Usulan Untuk Padat karya	Desa Jambudipa		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Usulan Padat Karya	Padaasih		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Usulan Padat Karya	Pasirlangu		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Usulan Padat Karya	Sadangmekar		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Peningkatan Kesempatan Kerja	Desa Cikalong	Cikalong, Cisomang,		200,000,000										NAKERTRANS	KBB
			usulan untuk padat karya kampung KB	desa pakuhaji		1 RW	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			pengembangan kelembagaan produktifitas dan	desa sukatani		1 rw	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			program padat karya	desa ngamprah		1 rw	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			program padat karya	desa margajaya		1 rw	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Kegiatan padat karya	Desa ciptaharja, mandalawangi, kertamukti		3 desa	150,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Kegiatan Pelatihan Tata Rias	sumurbandung, cirawamekar, kertamukti, ciptaharja,		12 Desa	40,000,000										NAKERTRANS	KBB
			pelatihan otomotif perbengkelan	Desa Rajamandalakulon		20 Orang	40,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Tataboga (seni Memasak)	Desa Sarimukti		30 Orang	60,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Kewirausahaan	Kampung KB Desa Cicangkanghilir		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Kewirausahaan	Keluarga binaan di Kampung KB Desa Sirnagalih		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Kewirausahaan	Kampung KB Desa Sukamulya		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Kewirausahaan	Kampung KB Desa Karang Sari		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya di lokasi kampung KB 	Desa Cintakarya		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya di lokasi Kampung KB	Desa Sindangkerta		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya di lokasi kampung KB	Desa Puncaksari		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya di lokasi Kampung KB	Desa Weninggalih		1 Paket	50,000,000										NAKERTRANS	KBB

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Padat Karya	Kampung KB		1 Kegiatan	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya	Kampung KB		1 Kegiatan	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya	Kampung KB		1 Kegiatan	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya	Kampung KB		1 Kegiatan	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Padat Karya	Kampung KB		1 Kegiatan	50,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Kewirausahaan	Kecamatan Saguling 4 Desa		Sekecamatan Saguling (200,000,000										NAKERTRANS	KBB
							1,940,000,000										NAKERTRANS	KBB
																	NAKERTRANS	KBB
			Pelatihan Pengolahan Kopi terhadap Komunitas se KBB				195,000,000										NAKERTRANS	KBB
							195,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja (1,200,000,000										NAKERTRANS	KBB
							1,200,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Hari Pekerjaan Nasional				200,000,000										NAKERTRANS	KBB
							200,000,000										NAKERTRANS	KBB
			Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Belanja Bantuan Sarana kewirausahaan		22 paket	2,000,000,000										NAKERTRANS	KBB
10. DISPORA																		
Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan dunia usaha	Peningkatan Jumlah Peserta Aksi Bhakti Sosial	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	-Peningkatan Jumlah Peserta Aksi Bhakti Sosial	150 Peserta	175 Peserta	157,241,500	180 Peserta	172,965,650	195 Peserta	190,262,215	200 Peserta	209,288,437	205 Peserta	230,217,280			DISPORA
		Terlatihnya pemuda dibidang kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang terampil di bidang kewirausahaan		19.9%	121,495,100.00	19.9%	133,644,610	19.9%	147009071	19.9%	161709978.1	20.4%	177880975.9			DISPORA
		Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Pemuda	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	-Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Pemuda			190,000,000.00	209,000,000	229900000	252890000	278179000							DISPORA
11. DINAS PUPR																		
Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan	Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan	Persentase jaringan jalan dan jembatan, sapsas kebinamargaan kabupaten dalam kondisi baik	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	78.40%	78.40%	122,952,793,000.00	83.80%	159,838,630,900.00	89.20%	207,790,220,170.00	94.60%	270,127,286,221.00	100%	351,165,472,087.30	100%		PUPR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perencanaan pembangunan jalan	-Terlaksananya Penyusunan perencanaan pembangunan jalan	5 Dokumen	5 Dokumen	2,305,440,000.00	13 Dokumen	2,997,072,000	8 Dokumen	3,896,193,600	1 Dokuem	5,065,051,680		6,584,567,184			PUPR
			Pembangunan jalan	-Terlaksananya Pembangunan Jalan	1 Lokasi Pemb.Jalan	1 Lokasi Pemb.Jalan	2,446,868,000.00	1 Lokasi Pemb.Jalan	3,180,928,400	1 Lokasi Pemb.Jalan	4,135,206,920	1 Lokasi Pemb.Jalan	5,375,768,996	1 Lokasi Pemb.Jalan	6,988,499,695			PUPR
			Pembangunan jembatan	-Terlaksananya pembangunan jembatan	11 Lokasi Jembatan	11 Lokasi Jembatan	5,999,499,000.00	10 Jembatan	7,799,348,700	10 Jembatan	10,139,153,310	10 Jembatan	13,180,899,303	10 Jembatan	17,135,169,094			PUPR
			Peningkatan Jalan	-Terlaksananya Peningkatan jalan	54 Lokasi Peningkatan Jalan	54 Lokasi Peningkatan Jalan	112,200,986,000.00	54 Lokasi Peningkatan Jalan	145,861,281,800	54 Lokasi Peningkatan Jalan	189,619,666,340	54 Lokasi Peningkatan Jalan	246,505,566,242	54 Lokasi Peningkatan Jalan	320,457,236,115			PUPR
			Program pembangunan saluran	Presentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	85%	85%	17,307,815,280.00	89%	22,500,159,864.00	93%	29,250,207,823.20	96%	38,025,270,170.16	99%	49,432,851,221.21	99%		PUPR
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	29 Lokasi	29 Lokasi	10,812,996,280.00	29 Lokasi	14,056,895,164	29 Lokasi	18,273,963,713	29 Lokasi	23,756,152,827	29 Lokasi	30,882,998,675			PUPR
			Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-Tersedianya saluran drainase yang baik	45 Lokasi Drainase Permukiman	45 Lokasi Drainase Permukiman	6,494,819,000.00	45 Lokasi Drainase Permukiman	8,443,264,700	45 Lokasi Drainase Permukiman	10,976,244,110	45 Lokasi Drainase Permukiman	14,269,117,343	45 Lokasi Drainase Permukiman	18,549,852,546			PUPR
			Program pembangunan turap/talud/bronjong	Presentase turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	85%	85%	12,684,195,000.00	90%	16,489,453,500.00	92%	21,436,289,550.00	97%	27,867,176,415.00	100%	36,227,329,339.50	100%		PUPR
			Pembangunan turap/talud/bronjong	-Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong	25 Lokasi	25 Lokasi	12,684,195,000.00	25 Lokasi	16,489,453,500	25 Lokasi	21,436,289,550	25 Lokasi	27,867,176,415	25 Lokasi	36,227,329,340			PUPR
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	78,40%	78,40%	21,760,784,463.00	83.80%	28,289,019,801.90	89.20%	36,775,725,742.47	94.60%	47,808,443,465.21	100%	62,150,976,504.77	100%		PUPR
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	-Terlaksananya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	3 Dokumen Perc. Jalan	3 Dokumen Perc. Jalan	356,724,000.00	3 Dokumen Perc. Jalan	463,741,200	3 Dokumen Perc. Jalan	602,863,560	3 Dokumen Perc. Jalan	783,722,628	3 Dokumen Perc. Jalan	1,018,839,416			PUPR
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	-Terlaksananya Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	4 Dokumen Perencanaan Jembatan	4 Dokumen Perencanaan Jembatan	439,813,500.00	4 Dokumen Perencanaan Jembatan	571,757,550	4 Dokumen Perencanaan Jembatan	743,284,815	4 Dokumen Perencanaan Jembatan	966,270,260	4 Dokumen Perencanaan Jembatan	1,256,151,337			PUPR
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	-Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	81 Lokasi Rehab Jalan	81 Lokasi Rehab Jalan	18,403,765,963.00	81 Lokasi Rehab Jalan	23,924,895,752	81 Lokasi Rehab Jalan	31,102,364,477	81 Lokasi Rehab Jalan	40,433,073,821	81 Lokasi Rehab Jalan	52,562,995,967			PUPR
			Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	-Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	8 Lokasi Rehab Jembatan	8 Lokasi Rehab Jembatan	2,560,481,000.00	10 Lokasi Rehab Jembatan	3,328,625,300	10 Lokasi Rehab Jembatan	4,327,212,890	10 Lokasi Rehab Jembatan	5,625,376,757	10 Lokasi Rehab Jembatan	7,312,989,784			PUPR
			Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Kondisi Jalan dan Jembatan	3 Dokumen	3 Dokumen	590,000,000.00	3 Dokumen	767,000,000.00	3 Dokumen	997,100,000.00	3 Dokumen	1,296,230,000.00	3 Dokumen	1,685,099,000.00	3 Dokumen		PUPR
			Inspeksi kondisi jalan	-Terlaksananya Inspeksi kondisi jalan	2 Dokumen	2 Dokumen	325,000,000.00	2 Dokumen	422,500,000	2 Dokumen	549,250,000	2 Dokumen	714,025,000	2 Dokumen	928,232,500			PUPR
			Inspeksi kondisi jembatan	-Terlaksananya Inspeksi kondisi jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	265,000,000.00	1 Dokumen	344,500,000	1 Dokumen	447,850,000	1 Dokumen	582,205,000	1 Dokumen	756,866,500			PUPR
			Program pembangunan sistem	Tersedianya Dokumen Informasi data dasar Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	520,330,000.00	1 Dokumen	676,429,000.00	1 Dokumen	879,357,700.00	1 Dokumen	1,143,165,010.00	1 Dokumen	1,486,114,513.00	1 Dokumen		PUPR
			Penyusunan sistem informasi/data base jalan	-Tersusunnya sistem informasi/database jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	520,330,000.00	1 Dokumen	676,429,000	1 Dokumen	879,357,700	1 Dokumen	1,143,165,010	1 Dokumen	1,486,114,513			PUPR
			Program peningkatan sarana dan prasarana	Presentase peningkatan sarana dan prasarana Kebinarmargaan	65%	65%	9,647,795,000.00	75%	12,542,133,500.00	80%	16,304,773,550.00	85%	21,196,205,615.00	90%	27,555,067,299.50	90%		PUPR
			Pengadaan alat-alat berat	-Tersedianya alat-alat berat	5 Unit Alat Berat	5 Unit Alat Berat	7,937,801,000.00	3 Unit Alat Berat	10,319,141,300	3 Unit Alat Berat	13,414,883,690	3 Unit Alat Berat	17,439,348,797	3 Unit Alat Berat	22,671,153,436			PUPR
			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	-Tersedianya alat-alat berat yang memadai	21 jenis	21 jenis	1,709,994,000.00	21 jenis	2,222,992,200	21 jenis	2,889,889,860	21 jenis	3,756,856,818	21 jenis	4,883,913,863			PUPR
Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Presentase kondisi jaringan irigasi dalam keadaan baik	73%	73%	17,630,027,800.00	75%	22,919,036,140.00	80%	29,794,746,982.00	85%	38,733,171,076.60	95%	50,353,122,399.58			PUPR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	-terlaksananya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	18 Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	18 Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	3,184,220,500.00	5 Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	4,139,486,650	5 Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	5,381,332,645	5 Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	6,995,732,439	5 Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi	9,094,452,170			PUPR
			Perencanaan pembangunan reservoir	-Terlaksananya Perencanaan pembangunan reservoir	2 Dokumen Perencanaan Reservoir	2 Dokumen Perencanaan Reservoir	407,650,000.00	4 Dokumen Perencanaan Reservoir	529,945,000	4 Dokumen Perencanaan Reservoir	688,928,500	4 Dokumen Perencanaan Reservoir	895,607,050	4 Dokumen Perencanaan Reservoir	1,164,289,165			PUPR
			Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	-Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	44 Lokasi Jaringan Irigasi, 5 Dok. Pengawasan	44 Lokasi Jaringan Irigasi, 5 Dok. Pengawasan	7,438,048,300.00	38 Lokasi Jaringan Irigasi	9,669,462,790	42 Lokasi Jaringan Irigasi	12,570,301,627	45 Lokasi Jaringan Irigasi	16,341,392,115	50 Lokasi Jaringan Irigasi	21,243,809,750			PUPR
			Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir	-Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir	13 Lokasi, 2 Dokumen Pengawasan	13 Lokasi, 2 Dokumen Pengawasan	2,965,110,000.00	28 Lokasi reservoir	3,854,643,000	32 Lokasi reservoir	5,011,035,900	35 Lokasi reservoir	6,514,346,670	42 Lokasi reservoir	8,468,650,671			PUPR
			Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	-Terlaksananya Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1 Lokasi Jaringan Irigasi	1 Lokasi Jaringan Irigasi	3,349,799,000.00	1 Lokasi Jaringan Irigasi	4,354,738,700	1 Lokasi Jaringan Irigasi	5,661,160,310	1 Lokasi Jaringan Irigasi	7,359,508,403	1 Lokasi Jaringan Irigasi	9,567,360,924			PUPR
			Pemberdayaan petani pemakai air	-Terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai air	16 Kecamatan	16 Kecamatan	285,200,000.00	16 Kecamatan	370,760,000	16 Kecamatan	481,988,000	16 Kecamatan	626,584,400	16 Kecamatan	814,559,720			PUPR
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Presentase kondisi jaringan irigasi dalam keadaan baik	73%	73%	100,000,000.00	75%	130,000,000.00	80%	169,000,000.00	85%	219,700,000.00	95%	285,610,000.00			PUPR
			Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	-Terlaksananya Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	2 Wilayah	2 Wilayah	100,000,000.00	2 Wilayah	130,000,000	2 Wilayah	169,000,000	2 Wilayah	219,700,000	2 Wilayah	285,610,000			PUPR
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber	Presentase kondisi jaringan irigasi dalam keadaan baik	73%	73%	450,000,000.00	75%	585,000,000.00	80%	760,500,000.00	85%	988,650,000.00	95%	1,285,245,000.00			PUPR
			Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	-Terpeliharanya dan terlaksananya rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	2 Wilayah	2 Wilayah	200,000,000.00	2 Wilayah	260,000,000	2 Wilayah	338,000,000	2 Wilayah	439,400,000	2 Wilayah	571,220,000			PUPR
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	-Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	16 Kecamatan	16 Kecamatan	250,000,000.00	16 Kecamatan	325,000,000	16 Kecamatan	422,500,000	16 Kecamatan	549,250,000	16 Kecamatan	714,025,000			PUPR
			Program Pengendalian Banjir	Presentase kondisi jaringan irigasi dalam keadaan baik	73%	73%	1,764,100,000.00	75%	2,293,330,000.00	80%	2,981,329,000.00	85%	3,875,727,700.00	95%	5,038,446,010.00			PUPR
			Pembangunan reservoir pengendali banjir	-Terlaksananya Pembangunan reservoir pengendali banjir	1 Lokasi	1 Lokasi	100,000,000.00	1 Lokasi	130,000,000	1 Lokasi	169,000,000	1 Lokasi	219,700,000	1 Lokasi	285,610,000			PUPR
			Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	-Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	8 Lokasi	8 Lokasi	1,136,760,000.00	8 Lokasi	1,477,788,000	8 Lokasi	1,921,124,400	8 Lokasi	2,497,461,720	8 Lokasi	3,246,700,236			PUPR
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	-Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangann banjir	2 Wilayah	2 Wilayah	344,450,000.00	2 Wilayah	447,785,000	2 Wilayah	582,120,500	2 Wilayah	756,756,650	2 Wilayah	983,783,645			PUPR
			Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	-Terlaksananya Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	2 Wilayah	2 Wilayah	182,890,000.00	2 Wilayah	237,757,000	2 Wilayah	309,084,100	2 Wilayah	401,809,330	2 Wilayah	522,352,129			PUPR
Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik air minum dan sanitasi	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	58,03%	58,03%	11,493,844,960.00	64.03%	14,941,998,448.00	70.03%	19,424,597,982.40	76.03%	25,251,977,377.12	82.03%	32,827,570,590.26			PUPR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan	-Tersedianya Sistem pengelolaan air minum yang berkualitas	6 % peningkatan penduduk berakses air minum 1 unit	6 % peningkatan penduduk berakses air minum 1 unit	7,637,211,960.00	6 % peningkatan penduduk berakses air minum, 1 unit WTP (water Treatment Plan)	9,928,375,548	6 % peningkatan penduduk berakses air minum, 1 unit WTP (water Treatment Plan)	12,906,888,212	6 % peningkatan penduduk berakses air minum 1 unit	16,778,954,676	6 % peningkatan penduduk berakses air minum 1 unit	21,812,641,078.96			PUPR
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	-Meningkatnya kualitas sanitasi di lokasi sasaran	20 Lokasi dan 1 dok Kajian IPLT KBB	20 Lokasi dan 1 dok Kajian IPLT KBB	3,707,760,000.00	20 Lokasi dan 1 dok Kajian IPLT KBB	4,820,088,000	20 Lokasi dan 1 dok Kajian IPLT KBB	6,266,114,400	20 Lokasi dan 1 dok Kajian IPLT KBB	8,145,948,720	20 Lokasi dan 1 dok Kajian IPLT KBB	10,589,733,336			PUPR
			Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	-Meningkatnya akses sanitasi di lokasi sasaran	1 Dokumen	1 Dokumen	148,873,000.00	1 Dokumen	193,534,900	1 Dokumen	251,595,370	1 Dokumen	327,073,981	1 Dokumen	425,196,175			PUPR
			Program pembangunan infrastruktur	Persentase pembangunan di wilayah desa			150,000,000.00		195,000,000.00		253,500,000.00		329,550,000.00		428,415,000.00			PUPR
			Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	-Tertatanya pembangunan di wilayah desa	10 Desa	10 Desa	150,000,000.00	15 Desa	195,000,000	20 Desa	253,500,000	25 Desa	329,550,000	30 Desa	428,415,000			PUPR
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Presentase Rumah tangga pengguna air bersih			3,954,870,000.00		5,141,331,000.00		6,683,730,300.00		8,688,849,390.00		11,295,504,207.00			
			Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi	-Tersedianya sitem pengelolaan air bersih	10 Lokasi SPAM	10 Lokasi SPA	3,954,870,000.00	10 Lokasi SPAM	5,141,331,000	10 Lokasi SPAM	6,683,730,300	10 Lokasi SPA	8,688,849,390	10 Lokasi SPA	11,295,504,207			
		Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			30 Unit	196,750,000.00	33 Unit	255,775,000.00	37 Unit	332,507,500.00	41 Unit	432,259,750.00	46 Unit	561,937,675.00			
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	-Tersedianya prasarana persampahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat	1 TPST pendukung P2WKSS, 1 kontainer dan 1 landasan Kontainer , pendukung adipura (Tong	1 TPST pendukung P2WKSS, 1 kontainer dan 1 landasan Kontainer , pendukung	196,750,000.00	33 Unit	255,775,000	37 Unit	332,507,500	41 Unit	432,259,750	46 Unit	561,937,675			
Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, monitoring penataan ruang di daerah	Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Implementasi dokumen perencanaan pembangunan di kawasan pusat pertumbuhan	3 Dokumen	3 Dokumen	1,793,858,950.00	3 Dokumen	2,332,016,635.00	3 Dokumen	3,031,621,625.50	3 Dokumen	3,941,108,113.15	3 Dokumen	5,123,440,547.10			PUPR
			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	-Tersedianya Dokumen Materi teknis dan Ranperda RDTR	3 Dokumen	3 Dokumen	798,310,550.00	3 Dokumen	1,037,803,715	3 Dokumen	1,349,144,830	3 Dokumen	1,753,888,278	3 Dokumen	2,280,054,762			PUPR
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang	-Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang RDTR	2 Kecamatan Objek sosialisasi	2 Kecamatan Objek	120,488,000.00	2 Kecamatan Objek sosialisasi	156,634,400	2 Kecamatan Objek sosialisasi	203,624,720	2 Kecamatan Objek	264,712,136	2 Kecamatan Objek	344,125,777			PUPR
			peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan	-Terciptanya peran Masyarakat yang aktif	1 Trip	1 Trip	66,766,000.00	1 Trip	86,795,800	1 Trip	112,834,540	1 Trip	146,684,902	1 Trip	190,690,373			PUPR
			Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	-Terciptanya koordinasi dalam rencana Tapak	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	172,896,300.00	1 Dokumen laporan	224,765,190	1 Dokumen laporan	292,194,747	1 Dokumen laporan	379,853,171	1 Dokumen laporan	493,809,122			PUPR
			Revisi rencana tata ruang	-Tersedianya dokumen revisi RDTR	2 Dokumen	2 Dokumen	635,398,100.00	2 Dokumen	826,017,530	2 Dokumen	1,073,822,789	2 Dokumen	1,395,969,626	2 Dokumen	1,814,760,513			PUPR
			Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen NSPK			1,627,530,000.00		2,115,789,000.00		2,750,525,700.00		3,575,683,410.00					PUPR
			peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan	-Terciptanya peran masyarakat yang aktif	1 Trip	1 Trip	71,800,000.00	1 Trip	93,340,000	1 Trip	121,342,000	1 Trip	157,744,600	1 Trip	205,067,980			PUPR
			Survey dan pemetaan	-Tersedianya dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen Teknis Pemanfaatan Ruang RTRW	1 Dokumen Teknis Pemanfaatan Ruang	1,412,730,000.00	1 Dokumen Teknis Pemanfaatan Ruang RTRW dan	1,836,549,000	1 Dokumen Teknis Pemanfaatan Ruang RTRW dan 3 Dokumen Peta	2,387,513,700	1 Dokumen Teknis Pemanfaatan Ruang	3,103,767,810	1 Dokumen Teknis Pemanfaatan Ruang	4,034,898,153			PUPR
			Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur	-Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KBU	1 Jumlah kecamatan yang menjadi	1 Jumlah kecamatan yang	62,000,000.00	1 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	80,600,000	1 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	104,780,000	1 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	136,214,000	1 Jumlah kecamatan yang	177,078,200			PUPR
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-Tersusunnya laporan monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	81,000,000.00	1 Dokumen	105,300,000	1 Dokumen	136,890,000	1 Dokumen	177,957,000	1 Dokumen	231,344,100			PUPR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase laporan pengawasan dan respon terhadap pengaduan permasalahan pemanfaatan ruang yang cepat tanggap			2,095,250,000.00		2,723,825,000.00		3,540,972,500.00		4,603,264,250.00		5,984,243,525.00			PUPR	
			Pengawasan pemanfaatan ruang	-Tersedianya dokumen laporan pengawasan dan respon terhadap pengaduan permasalahan pemanfaatan ruang yang cepat tanggap	4 Dokumen	4 Dokumen	1,659,250,000.00	4 Dokumen	2,157,025,000	4 Dokumen	2,804,132,500	4 Dokumen	3,645,372,250	4 Dokumen	4,738,983,925			PUPR	
			Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	-Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan site plan	3 Jumlah kecamatan yang menjadi	3 Jumlah kecamatan yang menjadi	120,000,000.00	3 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	156,000,000	3 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	202,800,000	3 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	263,640,000	3 Jumlah kecamatan yang menjadi objek	342,732,000			PUPR	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-Tersusunnya laporan monitoring IMB	100 % Kegiatan	100 % Kegiatan	316,000,000.00	100 % Kegiatan	410,800,000	100 % Kegiatan	534,040,000	100 % Kegiatan	694,252,000	100 % Kegiatan	902,527,600			PUPR	
Meningkatkan fungsi bangunan publik, serta meningkatkan sumber daya manusia teknik yang berdaya saing	Meningkatnya fungsi bangunan publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas, serta meningkatkan SDM teknik yang tersertifikasi	Persentase bangunan publik yang memadai	Program Pembangunan Fasilitas Publik	Jumlah Fasilitas Publik yang terbangun dalam kondisi baik	5 Unit		36,994,810,000.00		48,093,253,000.00		62,521,228,900.00		81,277,597,570.00		105,660,876,841.00			PUPR	
			Pembangunan Fasilitas Publik dan gedung kantor	-Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dewan dan Fasilitas Publik Lainnya	Gedung Dewan, Penataan Masjid Agung Lanjutan, Penataan Plaza Bawah Lanjutan, DED Mall Perijinan, DED Miniatur	Gedung Dewan, Penataan Masjid Agung Lanjutan, Penataan Plaza Bawah Lanjutan, DED Mall	34,498,050,000.00	10 Unit	44,847,465,000	10 Unit	58,301,704,500	10 Unit	75,792,215,850	10 Unit	98,529,880,605			PUPR	
			Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Publik dan	-Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas Publik Lainnya	3 Lokasi Kantor Kecamatan	3 Lokasi Kantor Kecamatan	2,496,760,000.00	3 Lokasi Kantor Kecamatan	3,245,788,000	3 Lokasi Kantor Kecamatan	4,219,524,400	3 Lokasi Kantor Kecamatan	5,485,381,720	3 Lokasi Kantor Kecamatan	7,130,996,236			PUPR	
			Program Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana untuk Rumah sederhana sehat			17,528,850,106.00		22,787,505,137.80		29,623,756,679.14		38,510,883,682.88		50,064,148,787.75				
			Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	-Tersedusunya Norma, Standar, Pedoman dan Manual (Harga Satuan)	1 Dokumen	1 Dokumen	134,460,000.00	1 Dokumen	174,798,000	1 Dokumen	227,237,400	1 Dokumen	295,408,620	1 Dokumen	384,031,206				
			Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	-Tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman	125 Lokasi	125 Lokasi	17,394,390,106.00	125 Lokasi	22,612,707,138	125 Lokasi	29,396,519,279	125 Lokasi	38,215,475,063	125 Lokasi	49,680,117,582				
			Persentase pelaksanaan jasa konstruksi dan SDM teknik yang tersertifikasi	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Tenaga terampil tersertifikasi	100%	339,960,000	100%	441,948,000	100%	574,532,400	100%	746,892,120	100%	970,959,756				
			Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	-Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang jasa konstruksi	Orang Tersertifikasi	Orang Tersertifikasi	339,960,000	80 Orang Tersertifikasi	441,948,000	80 Orang Tersertifikasi	574,532,400	80 Orang Tersertifikasi	746,892,120	80 Orang Tersertifikasi	970,959,756				
12. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Total Anggaran Rp)																			
BIDANG PERUMAHAN																			
			Program Pengembangan Perumahan																
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah kumuh perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	Minimalis kawasan kumuh perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penataan kawasan kumuh permukiman	108.28 hektar dan 24000 rumah tidak layak huni	0 hektar	1,092,368,500.00	0 hektar	726,907,875.00	0 hektar	0 hektar	726,907,875.00	0 hektar kawasan kumuh dan 0 rumah tidak layak huni						
																		4,000,000,000.00	Disperkim

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Akur dengan penataan pembangunan permukiman dan perumahan yang berdaya guna, serasi dan ramah lingkungan	-Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Optimalisasi Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)perumahan dan permukiman kumuh, PSU kawasan Strategis dan Rehabilitasi Sanitasi.	Peningkatan norma di bidang perumahan dan kawasan permukiman	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah dibidang perumahan	108.28 hektar dan 24000 rumah tidak layak huni	7 pengembangan	101,461,000.00	7 pengembangan	24,634,750.00	0 hektar kawasan kumuh dan 0 rumah tidak layak	2,000,000,000.00	Disperkim							
		Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pendampingan kegiatan RTLH dengan sumber anggaran APBN / APBD provinsi	108.28 hektar dan 24000 rumah tidak layak huni	500	1,059,170,000.00	500	985,207,500.00	500	985,207,500.00	500	985,207,500.00	400	985,207,500.00	2400	5,000,000,000.00	Disperkim	
		Peningkatan jumlah rumah layak huni	Pembangunan Perumahan Swadaya	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (APBD)	108.28 hektar dan 24000 rumah tidak layak huni	0	493,350,500.00	0	18,626,662,375.00	0	18,626,662,375.00	0	18,626,662,375.00	0	18,626,662,375.00	0	18,626,662,375.00	0 hektar kawasan kumuh dan 0 rumah tidak layak huni	750,000,000.00
			Program Lingkungan Sehat Perumahan																
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah kumuh perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	Penataan kawasan permukiman di Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Peningkatan kualitas perumahan Kawasan Terpilih Pertumbuhan Desa	2 lokasi	4 lokasi	990,130,600.00	4 lokasi	1,502,467,350.00	4 lokasi	10 lokasi	7,000,000,000.00	Disperkim						
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam																
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah kumuh perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	Pendampingan program KOTAKU	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kegiatan pendamping dan kolaborasi untuk kegiatan nasional KOTAKU	10828 hektar kawasan	44 lokasi kegiatan	11,882,100.00	44 lokasi kegiatan	11,882,100.00	44 lokasi kegiatan	11,882,100.00	44 lokasi kegiatan	11,882,100.00	0 hektar kawasan kumuh	2,000,000,000.00	Disperkim	KBB	Disperkim	
			Program Pemberdayaan Komunitas																
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah kumuh perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	Peningkatan kualitas perumahan melalui program Community Action Plan RPP	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Pembangunan infrastruktur	108.28 hektar kawasan kumuh dan 46.251 backlog perumahan	16 Kecamatan penataan wilayah pencegahan kumuh	1,476,663,000.00	16 Kecamatan penataan wilayah pencegahan kumuh	119,162,750.00	16 Kecamatan penataan wilayah pencegahan kumuh	119,162,750.00	16 Kecamatan penataan wilayah pencegahan kumuh	119,162,750.00	16 Kecamatan penataan wilayah pencegahan kumuh	119,162,750.00	0 hektar kawasan kumuh dan 20.000 backlog perumahan	1,000,000,000.00	Disperkim	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial																
Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Akur dengan penataan pembangunan permukiman dan perumahan yang berdaya guna, serasi dan ramah lingkungan.	-Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Optimalisasi Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU)perumahan dan permukiman kumuh, PSU kawasan Strategis dan Rehabilitasi Sanitasi.	Pengurangan rumah di kawasan rawan bencana	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	Penanganan perumahan pasca tanggap bencana	1 lokasi	2 lokasi	188,538,000.00	2 lokasi	702,865,500.00	2 lokasi	702,865,500.00	2 lokasi	702,865,500.00	2 lokasi	702,865,500.00	6 lokasi	3,000,000,000.00	Disperkim	
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah dasar perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perumahan kawasan (agropolitan, minapolitan) serta KTP2D	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	- Pendamping kegiatan satuan kerja infrastruktur - Pembangunan infrastruktur skala kawasan	2 lokasi	12 lokasi	950,186,100.00	12 lokasi	1,012,453,475.00	12 lokasi	1,012,453,475.00	12 lokasi	1,012,453,475.00	12 lokasi	1,012,453,475.00	12 lokasi	5,000,000,000.00	Disperkim	
BIDANG PERTAMAMAN																			
			Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah															500,000,000.00	
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah kumuh perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	tersedianya dokumen perencanaan	Fasilitasi dan Evaluasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1.pembuatan dokumen perencanaan desa mekarsari 2. Pembuatan dokumen perencanaan Desa Cilame 3. Pembuatan perencanaan kantor Kecamatan Sindangkerta 4. Pembuatan Penlok 5. Pembuatan perencanaan islamic Center	- - - - -	5 Dokumen perencanaan 5 Dokumen perencanaan Pengadaan lahan untuk kantor kecamatan Sindangkerta Pengadaan lahan untuk islamic centre	424,889,500.00	2 Dokumen perencanaan 2 Dokumen perencanaan - - -	3,777,625.00	2 Dokumen perencanaan 2 Dokumen perencanaan - - -	3,777,625.00	2 Dokumen perencanaan 2 Dokumen perencanaan - - -	3,777,625.00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	200,000,000.00 500,000,000.00	Disperkim

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab										
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Kondisi Kinerja Pada Akhir											
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan																								
meningkatkan ketersediaan RTH di wilayah KBB dalam rangka mendukung program penyehatan lingkungan	Meningkatnya jumlah RTH yang tersedia	Tersedianya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-	1 konflik	150,037,500.00	1 konflik	40,812,500.00	1 konflik	40,812,500.00	1 konflik	40,812,500.00		40,812,500.00			200,000,000.00	Disperkim								
			Program pengelolaan areal pemakaman																								
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan layanan pembangunan yang berkualitas pada wilayah kumuh perkotaan dan pedesaan dengan infrastruktur	tersedianya dokumen perencanaan makam	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	perencanaan TPU	-	1 lokasi pengaadaan lahan untuk TPU	850,673,500.00	1 lokasi pengaadaan lahan untuk TPU	25,287,332,625.00	1 lokasi pengaadaan lahan untuk TPU	25,287,332,625.00	1 lokasi pengaadaan lahan untuk TPU	25,287,332,625.00							Disperkim							
		Tersedianya tanah untuk pemakaman umum di KBB		Pengadaan tanah TPU	-	4 pembuatan DED TPU		4 dokumen pembuatan DED TPU		3 dokumen pembuatan DED TPU		3 dokumen pembuatan DED TPU					2.55E+13	Disperkim									
		Pembangunan jalan makam, pemagaran, piang makam dan patok		Pengadaan sarana dan prasarana TPU	-	5 Lokasi pembangunan an sarana dan prasarana TPU		4 Lokasi pembangunan sarana dan prasarana TPU		4 Lokasi pembangunan sarana dan prasarana TPU		3 Lokasi pembangunan an sarana dan prasarana TPU							Disperkim								
			Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																								
Meningkatnya ketersediaan RTH di wilayah KBB dalam rangka mendukung program penyehatan lingkungan.	Meningkatnya jumlah RTH yang tersedia	keyamanan dan tertatanya taman kota di perkantoran taman KBB	Penataan RTH	penataan taman kota perkantoran pemda KBB	-	5 taman publik	4,889,781,393.00	5 taman publik	10,202,554,652.00	4 taman publik	10,202,554,652.00	4 taman publik	10,202,554,652.00							45,700,000.00	Disperkim						
				Penataan taman kota di wilayah KBB	-	5 taman publik		5 taman publik		4 taman publik		4 taman publik						Disperkim									
				Jasa konsultasi penataan RTH privat																							
				Perencanaan taman kota																							
				Pengadaan tanah untuk taman kota	-	5 taman publik		5 taman publik		4 taman publik		4 taman publik									Disperkim						
BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS																											
			Program Pengembangan Perumahan																								
Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat	-Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat	Tersusunnya dokumen NSPM Bidang PSU PKP	- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Tersusunnya Norma Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	1 Dokumen	5 Dokumen	226,678,500.00	5 Dokumen	630,830,375.00	5 Dokumen	630,830,375.00	5 Dokumen	630,830,375.00	Dokume	630,830,375.00	5 Dokumen	2,750,000,000.00	Disperkim									
		Terselenggaranya fasilitas penyelenggaraan pengembangan perumahan di KBB	-Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terselenggaranya fasilitas penyelenggaraan pengembangan perumahan di KBB	7 Dokumen	4 Dokumen Kajian bidang PSU PKP	585,618,500.00	4 Dokumen Kajian bidang PSU PKP	1,853,595,375.00	4 Dokumen Kajian bidang PSU PKP	1,853,595,375.00	4 Dokumen Kajian bidang PSU PKP	1,853,595,375.00	4 Dokumen Kajian bidang PSU PKP	1,853,595,375.00	20 Dokumen Kajian bidang PSU PKP	8,000,000,000.00	Disperkim									
		Terlaksana pembangunan perumahan formal oleh pengembang di KBB	-Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	Terselenggarannya pembangunan perumahan formal oleh pengembang di KBB	16 Kecamatan	16 Kecamatan	588,863,500.00	16 Kecamatan	1,852,784,125.00	16 Kecamatan	1,852,784,125.00	16 Kecamatan	1,852,784,125.00	16 Kecamatan	1,852,784,125.00	16 Kecamatan	8,000,000,000.00	Disperkim									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat Akur dengan penataan pembangunan permukiman dan perumahan yang berdaya guna, serasi dan ramah lingkungan.	-Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. - Optimalisasi Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh, PSU kawasan Strategis dan Rehabilitasi Sanitasi.	Terlaksananya penataan dan pembangunan fisik sumber mata air (Bak penampung dan sal utama)	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Terlaksananya lingkungan sehat perumahan	...% cakupan air bersih	Kenaikan...% Cakupan air bersih	1,341,318,500.00	Kenaikan...% Cakupan air bersih	2,164,670,375.00	Kenaikan...% Cakupan air bersih	10,000,000,000.00	Disperkim							
Meningkatkan budaya baca, pembinaan dan pelayanan perpustakaan	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi bahan pustaka	Pembentukan pojok baca di desa	Jumlah pojok baca desa		54 desa	1,350,000,000	27 desa		27 desa		28 desa		29 desa				Disarpus	
			Pelatihan pengelolaan perpustakaan desa	Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mendapat pelatihan pengelolaan perpustakaan		6 desa	100,000,000	6 desa		6 desa		6 desa		6 desa				Disarpus	
			Pelatihan keterampilan berbasis literasi untuk masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapat pelatihan keterampilan				5 desa		5 desa		5 desa		5 desa				Disarpus	
13. BPBD																			
Pengurangan Resiko Bencana	meningkatkan kesiapsiagaan bencana	persentase penanggulangan dan perlindungan masyarakat korban bencana	1 .Program Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanggulangan Bencana dan Perlindungan masyarakat		100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	BPBD	Bandung Barat
			Sosialisasi terhadap Masyarakat dalam rangka pencegahan bencana	jumlah orang yang memahami pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		200 Orang	1,417,930,000	200 Orang	1,534,300,000	200 Orang	7,151,807,000	200 Orang	7,841,564,700	200 Orang	8,605,721,170	200 Orang		BPBD	Bandung Barat
			Pelatihan Simulasi Penanganan	jumlah orang yang terampil terhadap penanganan tanggap		200 org	130,000,000	200 org	143,000,000	200 org	157,300,000	200 org	173,030,000	200 org	190,333,000	200 org		BPBD	Bandung Barat
			Pembentukan Unit Pelaksana Lapangan (ULP dan TRC)	jumlah UCS dan TRC yang terbentuk		78 OB SI 130 OB SMU	200,000,000	78 OB SI 130 OB SMU	200,000,000	78 OB SI 130 OB SMU	200,000,000	78 OB SI 130 OB SMU	200,000,000	78 OB SI 130 OB SMU	200,000,000	78 OB SI 130 OB SMU		BPBD	Bandung Barat
			Fasilitasi Operasional Satgas/TRC	Jumlah Operasional satgas yang terfasilitasi		1 Paket	455,000,000	1 Paket	500,500,000	1 Paket	550,550,000	1 Paket	605,605,000	1 Paket	666,165,500	1 Paket		BPBD	Bandung Barat
			Penyusunan Analisis Resiko Bencana	Jumlah Dokumen analisis resiko bencana		1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	66,000,000	1 Dokumen	72,600,000	1 Dokumen	79,860,000	1 Dokum	87,846,000	1 Dokume		BPBD	Bandung Barat
			Sosialisasi Sekolah Siaga Bencana	Jumlah sekolah yang memahami tentang siaga		50 orang Guru	54,230,000	50 orang Guru	54,230,000	50 orang Guru	54,230,000	50 orang Guru	54,230,000	50 orang	59,653,000	50 orang Guru		BPBD	Bandung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)			Kondisi Kinerja Pada Akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pelatihan Penaksiran Kerugian Akibat Bencana Alam	jumlah orang yang diwilayah kecamatan mampu melakukan penaksiran kerugian akibat bencana alam		80 Orang	50,000,000	80 Orang	55,000,000	80 Orang	5,550,000,000	80 Orang	6,105,000,000	80 Orang	6,715,500,000	80 Orang	BPBD	Bandung Barat	
			Penyelenggaraan Posko Pengendalian	Jumlah Posko pengendalian bencana di Bandung Barat		16 Kecamatan	120,000,000	16 Kecamatan	132,000,000	16 Kecamatan	145,200,000	16 Kecamatan	159,720,000	16 Kecamatan	175,692,000	16 Kecamatan	BPBD	Bandung Barat	
			Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat	Jumlah masyarakat korban bencana diwilayah kecamatan yang terlayani pada masa tanggap darurat		16 Kecamatan	178,000,000	16 Kecamatan	195,800,000	16 Kecamatan	215,380,000	16 Kecamatan	236,918,000	16 Kecamatan	260,609,800	16 Kecamatan	BPBD	Bandung Barat	
			Sosialisasi Perbaikan Lingkungan, Prasarana dan Sarana Umum Pasca Bencana	Jumlah masyarakat diwilayah yang memahami perlunya perbaikan lingkungan prasarana dan sarana umum pasca bencana		6 Kecamatan	170,700,000	6 Kecamatan	187,770,000	6 Kecamatan	206,547,000	6 Kecamatan	227,201,700	6 Kecamatan	249,921,870	6 Kecamatan	BPBD	Bandung Barat	
			2. Program Pengembangan	Persentase Penanganan Darurat Bencana				100%	1 Milyar		100%	1.1 Milyar	100%	1.2 Milyar	100%	1.3 Milyar	5 kecamatan	BPBD	Bandung Barat
			3. Program Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas	Persentase Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap resiko bencana		0.22	10.61 mly	1%	11.5 mly	2%	13.1 mly	3%	14.7 mly	4%	16.3 mly	5 kecamatan	BPBD	Bandung Barat	
				Persentase desa tangguh bencana yang terbentuk		20%		40%		60%		80%	100%				BPBD	Bandung Barat	
			MUSRENBANG																Bandung Barat
			Penanggulangan Bencana dan																Bandung Barat
			Penyebarluasan Informasi Kebencanaan kepada Masyarakat			2 Paket												BPBD	Bandung Barat
			Siaga Tanggap Bencana	16 Desa di Wilayah Kecamatan Lembang			100,000,000											BPBD	Bandung Barat
			Desa Siaga Bencana			70 orang												BPBD	Bandung Barat
			penanganan/tanggap darurat bencana	Desa Ciptaharja, Nyalindung			50,000,000											BPBD	Bandung Barat
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																			
Meningkatkan budaya baca, pembinaan dan pelayanan perpustakaan	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi bahan pustaka	Pembentukan pojok baca di desa	Jumlah pojok baca desa		54 desa	1,350,000,000	27 desa		27 desa		28 desa		29 desa				Disarpus	KBB
			Pelatihan pengelolaan perpustakaan desa	Jumlah pengelola perpustakaan yang telah mendapat pelatihan pengelolaan perpustakaan		6 desa	100,000,000	6 desa		6 desa		6 desa		6 desa				Disarpus	KBB
			Pelatihan keterampilan berbasis literasi untuk masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapat pelatihan keterampilan				5 desa		5 desa		5 desa		5 desa				Disarpus	KBB
15. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
		Peningkatan Jumlah Peserta Aksi Bhakti Sosial	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	-Peningkatan Jumlah Peserta Aksi Bhakti Sosial	150 Peserta	175 Peserta	157,241,500	180 Peserta	172,965,650	195 Peserta	190,262,215	200 Peserta	209,288,437	205 Peserta	230,217,280			DISPORA	16 Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan dunia usaha	Terlatihnya pemuda dibidang kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang terampil di bidang kewirausahaan		19,9%	121,495,100.00	19,9%	133,644,610	19,9%	147009071	19,9%	161709978.1	20,4%	177880975.9		DISPORA	16 Kecamatan
		Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Pemuda	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	-Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Pemuda			190,000,000.00		209,000,000				229900000		252890000	278179000	DISPORA	16 Kecamatan
16. DISPARBUD																		
Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar lainnya	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keragaman budaya dan toleransi	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya															
			Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya skala provinsi dan nasional	5 festival	3 festival	1,505,250,000.00	3 festival	1,655,775,000.00	3 festival	1,821,352,500.00	4 festival	2,003,487,750.00	4 festival	2,203,836,525.00		Bidang Kebudayaan	KBB
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	% Kenaikan PAD Sektor Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata															
			Pengembangan objek pariwisata unggulan	-Jumlah destinasi Wisata di KBB dalam skala prioritas untuk dikembangkan	3 destinasi	3 destinasi	400,000,000.00	3 destinasi	440,000,000.00	3 destinasi	484,000,000.00	4 destinasi	532,400,000.00	4 destinasi	585,640,000.00		Bidang Kepariwisataaan	KBB
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-Jumlah objek wisata yang dipelihara/dibangun	5 destinasi	6 destinasi	1,254,778,900.00	6 destinasi	1,380,260,000.00	6 destinasi	1,518,286,000.00	7 destinasi	1,670,115,000.00	7 destinasi	1,837,130,000.00		Bidang Kepariwisataaan	KBB
	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif, UMKM dan wirausaha	Peningkatan jumlah industri kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif															
			Peningkatan kemampuan kreasi dan produksi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi	-	100 orang	526,000,000.00	150 orang	578,600,000.00	200 orang	636,460,000.00	250 orang	700,106,000.00	300 orang	770,120,000.00		Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif	KBB
			Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jejaring ekonomi kreatif	Jumlah pelaku kreatif yang mengalami penguatan jejaring	-	100 orang	439,974,700.00	150 orang	483,973,000.00	200 orang	532,375,000.00	250 orang	585,615,000.00	300 orang	644,177,000.00		Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif	KBB
TOTAL							4,126,003,600.00		4,538,608,000.00		4,992,473,500.00		5,491,723,750.00		6,040,903,525.00			
17. BAGIAN KESRA																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah)										Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun -1 (2019)		Tahun -2 (2020)		Tahun -3 (2021)		Target -4 (2022)		Target -5 (2023)		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan	Persentase data dan informasi Kesejahteraan Rakyat yang dimanfaatkan menjadi Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	21 Keg	1,251,151,000	24 Keg	1,288,685,530	27 Keg	1,327,346,096	30 Keg	1,367,166,478	33 Keg	1,408,181,472	IPM Meningkat	KESRA	KBB
			Peningkatan Mutu Ke	Rapat Koordinasi tentang Kesejahteraan Rakyat	100%	8 Keg	300,651,000	9 keg	309,670,530	10 keg	318,960,645	11 keg	328,529,464	12 keg	338,385,347		KESRA	KBB
			Peningkatan Mutu Pe	Rapat Koordinasi Pendidikan dan Olahraga	100%	4 Keg	250,500,000	5 Keg	258,015,000	6 Keg	265,755,450	7 Keg	273,728,113	8 Keg	281,939,956		KESRA	KBB
			Peningkatan Mutu K	Rapat Koordinasi tentang Kesehatan Masyarakat	100%	9 Keg	700,000,000	10 Keg	721,000,000	11 Keg	742,630,000	12 Keg	764,908,900	13 Keg	787,856,167		KESRA	KBB

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA